



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERAN TNI ANGKATAN DARAT
DALAM MENDUKUNG KETAHANAN NASIONAL**

**(Studi Tentang Kegiatan Pembinaan Teritorial Di Jajaran
Komando Teritorial TNI Angkatan Darat)**

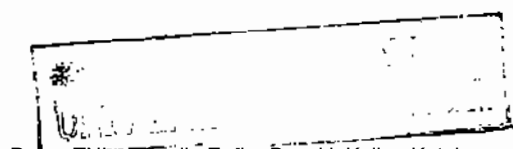
TESIS

**Diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Sains (M.Si) pada Program Studi Kajian Strategik Ketahanan Nasional**

Disusun oleh :
SUSILO ENDRO BASUKI
NPM 0606023596

T
25508

**PROGRAM STUDI KAJIAN STRATEGIK KETAHANAN NASIONAL
PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS INDONESIA
2008**





**PROGRAM STUDI KAJIAN STRATEJIK KETAHANAN NASIONAL
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS INDONESIA**

LEMBAR PERSETUJUAN

Nama : SUSILO ENDRO BASUKI
NPM : 0606023596
Tahun Masuk : 2006 / PKN A.25
Program : KAJIAN STRATEJIK KETAHANAN NASIONAL
Judul Tesis : PERAN TNI ANGKATAN DARAT DALAM
MENDUKUNG KETAHANAN NASIONAL
(Studi Tentang Kegiatan Pembinaan Teritorial di
Jajaran Komando Teritorial TNI Angkatan Darat)

Telah disetujui untuk diuji

PEMBIMBING I

Letjen TNI (Purn) Purbo S. Suwondo

PEMBIMBING II

Sutoyo, SH., M.Si




PENGESAHAN TESIS

Tesis ini telah dipertahankan dihadapan Sidang Panitia Penguji Program Studi Kajian Strategik Ketahanan Nasional Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, pada :

Hari : Jum'at
Tanggal : 24 Oktober 2008
Pukul : 14.00 s.d 16.00 WIB
Dinyatakan : L U L U S

Selanjutnya telah dilakukan perbaikan dan dilengkapi berdasarkan arahan hasil Sidang Panitia Penguji, dengan susunan kepanitiaan saebagai berikut :

Panitia Penguji :

Ketua/Penguji I : Dr. Amirsyah Sahil, SE, M.Si. 

Penguji II : Prof.Dr.Wan Usman 

Pembimbing I : Letjen TNI (Purn) Purbo S. Suwondo 

Pembimbing II : Sutoyo, SH, M.Si. 

KATA PENGANTAR

Tesis ini membahas mengenai kontribusi pelaksanaan Pembinaan Teritorial TNI AD terhadap ketahanan nasional, khususnya pasca dibentuknya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat kontribusi yang signifikan (walaupun bukan satu-satunya faktor) atas pelaksanaan Pembinaan Teritorial terhadap Ketahanan Nasional. Pembinaan Teritorial yang dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan mampu memberikan sumbangan yang positif bagi Ketahanan Nasional. Harus diakui Pembinaan Teritorial tidak berdiri sendiri akan tetapi tentunya dengan berbagai upaya pembangunan nasional lainnya, yang dilakukan oleh instansi pemerintah lainnya.

Puji syukur kepada Allah SWT, menjadi prioritas utama yang Penulis pertama lakukan sehubungan dengan selesainya penyusunan tesis ini. Selanjutnya sudah barang penulis juga perlu menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut membantu dalam menyelesaikan tesis ini, diantaranya kepada :

1. Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus yang telah memberikan kesempatan sepenuhnya kepada penulis untuk melanjutkan studi S-2 Pasca Sarjana Universitas Indonesia.
2. Prof. Dr. Ronny Nitibaskara, selaku Ketua Program PKN UI yang telah mendukung dan memberikan arahan yang sangat berguna dalam penyelesaian tesis ini.
3. Dr. Amirsyah Syahil, SE, M.Si, selaku Sekretaris Program sekaligus Ketua Tim Penguji yang telah membantu dalam melengkapi dokumen-dokumen untuk kepentingan penelitian sekaligus memberikan koreksi dan arahan dalam upaya perbaikan tesis ini.
4. Letjen TNI Purbo S. Suwondo, selaku pembimbing I, yang dengan segala pengetahuan dan pengalaman serta ketelatenan telah banyak

memberikan masukan dan arahan akademis yang sangat berguna dalam penyelesaian tesis ini.

5. Prof. Dr. Wan Usman, selaku dosen sekaligus penguji yang telah memberikan masukan dalam upaya perbaikan tesis ini.

6. Sutoyo, SH, M.Si, selaku pembimbing II, yang juga dengan segala perhatian memberikan masukan, bimbingan dan koreksi dalam penyusunan tesis ini.

7. Asintel Danjen Kopassus yang telah memberikan kesempatan penuh kepada penulis untuk melaksanakan kegiatan akademis disela-sela kesibukan kegiatan dinas sebagai Perwira Komando Pasukan Khusus.

8. Rekan-rekan PKN UI Angkatan 25 yang telah memberikan dorongan semangat dan masukan melalui diskusi kecil dan koreksi sehingga tesis ini bisa terselesaikan.

9. Istri dan kedua anaku serta kedua orang tua yang senantiasa memberikan dorongan semangat dan waktu serta doa yang tiada henti agar tesis ini terselesaikan.

Akhirnya kata Penulis berharap bahwa tesis ini dapat memberikan sumbangan atau kontribusi bagi pengembangan Kajian Strategi Ketahanan Nasional, khususnya dan pada Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat pada umumnya, dalam membantu pemerintah dalam mengembangkan ketahanan nasional melalui pembinaan teritorial.

Jakarta, 24 Oktober 2008

Penulis

Susilo Endro Basuki

ABSTRAK

Pembinaan Teritorial yang dilaksanakan beberapa waktu yang lalu, utamanya pada masa Orde Baru telah memberikan bekas yang mendalam bagi masyarakat, bahwa pada saat itu pembinaan teritorial telah menjadi kepanjangan tangan dari politik penguasa untuk melanggengkan kekuasaan. Hal ini menyadarkan para pemimpin TNI untuk melakukan pembenahan ke dalam agar TNI yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat ini, tidak tercabut dari akarnya yaitu rakyat itu sendiri; untuk itu kemudian lahir berbagai upaya reformasi atau penataan kembali yang salah satunya kemudian lahir Undang-Undang Nomor 34/2004 tentang TNI. Berpedoman pada peraturan inilah kemudian TNI melaksanakan Pembinaan Teritorial, yang diharapkan dapat membantu pemerintah dalam penyiapan potensi pertahanan khususnya dan membantu meningkatkan ketahanan nasional pada umumnya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran pembinaan teritorial oleh satuan komando kewilayahan, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembinaan teritorial (Binter) dan bagaimana sebaiknya pembinaan teritorial dimasa yang akan datang. Penelitian dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif melalui studi dokumen yang diambil dari catatan, buku dan dokumen lainnya yang memuat data pelaksanaan pembinaan teritorial oleh Satuan Komando Teritorial dan dilengkapi dengan wawancara dengan beberapa nara sumber.

Melalui serangkaian analisis secara kualitatif dihadapkan pada prinsip ketahanan nasional menunjukkan bahwa terdapat kontribusi yang signifikan dari pelaksanaan pembinaan teritorial terhadap upaya peningkatan ketahanan nasional, walaupun tidak bisa dikatakan sebagai satu-satunya faktor yang mendorong meningkatnya ketahanan nasional. Dengan dilaksanakannya pembinaan teritorial oleh TNI AD di berbagai daerah telah membuka peluang bagi meningkatnya kegiatan perekonomian serta meningkatnya kesejahteraan dan keamanan yang pada gilirannya akan menunjang ketahanan nasional. Berbagai kegiatan Binter telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi meningkatnya ketahanan nasional. Namun demikian dalam pelaksanaannya masih saja ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi terutama adalah masalah payung hukum atau undang-undang yang sampai saat ini belum ada yang mengatur, pembinaan teritorial belum tersosialisasi secara luas di kalangan masyarakat dan adanya rasa trauma dari sebagian kalangan atas pelaksanaan pembinaan teritorial pada masa lalu. Oleh sebab itu dimasa yang akan datang pembinaan teritorial, sebaiknya Binter direvitalisasi sehingga cocok dan sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini. Binter agar dimasukkan menjadi bagian dari OMSP, dan dijalankan dengan menetapkan skala prioritas, misalnya untuk daerah konflik, daerah rawan konflik, daerah perbatasan dan daerah tertinggal/terbelakang, serta dengan menetapkan prioritas permasalahan dengan disertai jangka waktu pelaksanaan dan target yang akan dicapai sebagai ukuran keberhasilan serta harus memperhatikan aspek non militer di daerah.

ABSTRACT

Being the continuation of the rulers' power politic during the "New Order" Era, pervasive image of territorial command has entrenched for quite sometime within the Indonesian society. Given this fact, leaders of TNI, clearly grasp the counter productive results of such legacy, have initiated internal reform within the institution. This particular reform is aimed at refurbishing the flawed image of TNI so that its original identity remain rooted as the soldiers of the people, originated from the people, manned by the people and devoted for the sake of the people. Subsequently, this endeavour leads to reformation and transformation within the TNI, which eventually grounded the passing of the National Legislation Act No.34/2000 on TNI. This very legislation eventually enacts as a legal umbrella for the TNI in performing territorial function in preparing the national defence potentials in particular and bolstering national resilience in more broad sense.

This research was held to provide, *inter alia*, clear-cut description and analysis to the role of territorial function executed by territorial command, firm comprehension of affecting factors during the process and possible best practice in the future. Further, this research was conducted through qualitative approach which drawn from numerous resources ranging from official notes, books a long with other form of documents containing data of territorial activities performed by territorial command, in addition to records of interviews with some subject matter expert figures.

Even tough territorial management does not deserve all the tribute of being the only factor held accountable for the rise of the level of national resilience, scores of qualitative analysis in term of national defence principles have clearly shown that territorial function does produce significant contribution toward the effort in strengthening national defence. The Indonesian Army territorial management, which has been conducted in some regions within the Indonesian territory, has opened the door of opportunity in stimulating economics activities which eventually boost up national prosperity and security in lead up to further enhancement in the level of national resilience. Equally, significant contribution in procurement of national resilience is resulted from series of territorial management's efforts which cover several methods of approach, ranging from geography, demography, social condition, civic mission to social communication. Some urgent issues which may affected the application of territorial management are the absence of legal umbrella and constitutional ground, limited dissemination of the idea of territorial management to the society and traumatic experience in some parts of the society for the possibility of abuse in the practice of territorial management as happen in the past. Given that, future territorial management should be revitalised to fit in to the present situation and condition. The territorial management, as part of Military operation Other Than War (MOOTW), is applied with clear scale of priority to give clear distinction in its practices, i.e., conflict zones, possible conflict zones, border zones, and less developed regions. Another way to further enhance the effectiveness of this effort is by setting problems' priority along with clear time frame and target to measure the level of success while still paying considerable attention toward non-military aspects in the regions.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Susilo Endro Basuki**
NPM : 0606023596
Program Studi : **Kajian Stratejik Ketahanan Nasional**
Fakultas : **Pasca Sarjana**

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis Tugas Akhir ini adalah **ASLI** yang dibuat oleh saya berdasarkan penelitian sesuai dengan prosedur penulisan ilmiah.

Dengan pernyataan ini saya buat dan bersedia menanggung akibatnya apabila pernyataan ini tidak benar dikemudian hari.

Jakarta, Oktober 2008

Penulis

(Susilo Endro Basuki)

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| LEMBAR PERSETUJUAN | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iii |
| ABSTRAK | iv |
| ABSTRACK | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| DAFTAR ISI | viii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| 1. Umum | 1 |
| 2. Kepentingan Binter TNI AD | 10 |
| 3. Persoalan di Sekitar Ketahanan Nasional | 15 |
| B. Rumusan Permasalahan | 19 |
| C. Ruang Lingkup dan Pembatasan Masalah | 19 |
| D. Pertanyaan Penelitian | 19 |
| E. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 20 |
| F. Sistematika Penulisan | 21 |
| | |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | |
| A. Peran | 23 |
| B. Pembinaan Teritorial | 25 |
| C. Konsep Pemberdayaan Masyarakat..... | 29 |
| D. Konsep Pertahanan Teritorial | 31 |
| E. Sistem Pertahanan Semesta | 36 |
| D. Konsep Ketahanan Nasional | 41 |
| | |
| BAB III METODODOLI PENELITIAN | |
| A. Jenis Penelitian | 47 |

| | |
|--------------------------------------|----|
| B. Tempat dan Waktu Penelitian | 48 |
| C. Tehnik Pengumpulan Data | 48 |
| D. Metode Analisis Data | 49 |

BAB IV PEMBINAAN TERITORIAL TNI ANGKATAN DARAT DAN KETAHANAN NASIONAL

| | |
|--|----|
| A. Lahirnya Konsep Teritorial | 50 |
| 1. Teritorial Versi AH Nasution | 53 |
| 2. Teritorial Era Orde Baru | 57 |
| 3. Teritorial di Era Reformasi | 60 |
| B. Pentingnya Komando Teritorial | 61 |
| 1. Pendekatan dari Aspek Akademis | 62 |
| 2. Pendekatan dari Aspek Geografi..... | 65 |
| 3. Pendekatan dari Aspek Demografi | 67 |
| 4. Pendekatan dari Aspek Sosial, Budaya dan Agama.... | 68 |
| 5. Pendekatan dari Aspek Kemungkinan Ancaman..... | 71 |
| 6. Pendekatan dari Aspek Dukungan Binter Pada Fungsi Pertahanan Negara..... | 76 |
| C. Pelaksanaan Pembinaan Teritorial | 77 |
| D. Kegiatan Pembinaan Teritorial Ditinjau dari Ketahanan Nasional..... | 85 |
| 1. Ditinjau dari Aspek Ketahanan Idiologi | 85 |
| 2. Ditinjau dari Aspek Ketahanan Politik | 86 |
| 3. Ditinjau dari Aspek Ketahanan Ekonomi..... | 87 |
| 4. Ditinjau dari Aspek Ketahanan Sosial Budaya..... | 88 |
| 5. Ditinjau dari Aspek Ketahanan Hankam | 88 |
| E. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Binter | 90 |
| G. Beberapa Pendapat Tentang Binter | 92 |

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

| | |
|---------------------|-----|
| A. Kesimpulan | 107 |
| B. Saran | 108 |

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Umum

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya. Di lain pihak Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia mengamanatkan tugas pokok TNI adalah melakukan operasi militer untuk perang (OMP) dan operasi militer selain perang (OMSP) yang salah satunya adalah pemberdayaan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta. TNI Angkatan Darat (TNI-AD) dalam melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat melakukan berbagai upaya, pekerjaan dan tindakan yang selama ini dikenal dengan sebutan pembinaan teritorial.

Esensi pembinaan teritorial (Binter) yang dilaksanakan TNI AD saat ini sangat berbeda dengan yang dilakukan pada masa lalu. TNI AD dengan komando kewilayahannya dari tingkat Komando Daerah Militer (Kodam) sampai Komando Rayon Militer (Koramil) serta kegiatan pembinaan teritorial yang dilaksanakannya sudah tidak lagi menjalankan politik praktis. Menurut Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad)¹ Komando Kewilayahan saat

¹ Kasad Jenderal TNI Djoko Santoso, Majalah Patriot, Edisi No.36 Tahun-IX Januari 2008, hal. 6

ini bukan lagi sebagai alat kekuasaan, tetapi kehadirannya dengan Binter yang benar akan mewujudkan kemanunggalan TNI-Rakyat sebagai kekuatan sinergik untuk membantu tugas pemerintah dan kekuatan seperti itu diperlukan dalam menyukseskan pembangunan bangsa. Pelaksanaan Binter dalam pemberdayaan wilayah pertahanan darat senantiasa diterapkan oleh Angkatan Darat dalam tugas-tugas membantu pemerintah di bidang pertahanan dengan memberdayakan kekuatan pendukungnya secara dini.

Implementasi Binter akan selalu dilaksanakan melalui tiga dimensi. Pertama, selalu dalam konteks membantu pemerintah dan tidak pernah sekali-kali ingin mengintervensi tugas pemerintah. Kedua, selalu melibatkan rakyat sebagai warga negara untuk diposisikan dalam kekuatan pendukung, yang dilakukan atas kepentingan pertahanan negara atau kepentingan nasional. Ketiga, selalu dilakukan di setiap wilayah secara dini di dalam wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang menjamin bahwa wilayah pertahanan yang dijadikan sasaran pemberdayaan adalah berada dalam wilayah kedaulatan NKRI, di mana rakyat dan TNI juga sama-sama hidup di dalamnya.

Pada dasarnya Binter adalah kebijakan manajemen yang ditempuh oleh TNI AD dalam mewujudkan tugas pemberdayaan wilayah pertahanan sesuai amanat konstitusi dalam rangka mewujudkan kesiapan pertahanan negara di darat.² Konsep yang digali, disusun dan dirumuskan dari

² Hotmangaradja Panjaitan, Majalah Patriot, Edisi No.36 Tahun-IX Januari 2008, hal. 7

pengalaman perjuangan bersenjata dan telah teruji kebenaran serta keampuannya dalam menghadapi masalah-masalah keamanan dalam negeri kemudian dibakukan dalam bentuk Doktrin Teritorial Nusantara.³ Penyelenggaraan pembinaan teritorial telah lahir bersamaan dengan pelaksanaan perang kemerdekaan yang diawali dengan terbentuknya kantong-kantong gerilya (*wehrkreise*). Perkembangan selanjutnya dibentuklah satuan teritorial dengan nama Bintara Onder Distrik Militer (BODM), Komando Distrik Militer (KDM), Divisi Teritorial dan Teritorium. Periode berikutnya diadakan penyederhanaan organisasi dibentuk satuan-satuan Komando Teritorial (Koter) yaitu Komando Daerah Militer (Kodam), Komando Resort Militer (Korem), Komando Distrik Militer (Kodim) dan Komando Rayon Militer (Koramil) sebagai institusi yang diberi tanggung jawab melaksanakan pembinaan teritorial.⁴

Pembinaan teritorial dilaksanakan dalam upaya mewujudkan potensi geografi, demografi dan kondisi sosial menjadi ruang, alat dan kondisi (RAK) juang yang tangguh dalam menangkal musuh.⁵ Ruang juang merupakan perwujudan dari hasil pembinaan aspek geografi, yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan segenap potensi sumber kekayaan alam dibina menjadi kekuatan geografi, dalam wujud ruang juang yang tangguh dan

³ Purbo S. Suwondo, *Beberapa Catatan dari Sejarah Pembinaan Teritorial*, Majalah Karya Wira Jati No. 60 Tahun 1986, hal. 8

⁴ Syarifudin Tippe, *Binter dalam Perspektif Empiris dan Dinamis*, Seskoad, Bandung, 2003, hal. 5

⁵ Hotmangaradja Panjaitan, *Opcit*, hal. 7-9

memiliki daya tangkal kewilayahan untuk kepentingan pertahanan. Ruang juang ini dapat dijadikan sebagai ruang manuver dan medan pertahanan untuk mendukung strategi pertahanan yang diwujudkan dalam klasifikasi daerah pangkal perlawanan. Disamping berfungsi untuk manuver satuan, ruang juang ini juga berfungsi sebagai logistik wilayah untuk mendukung strategi pertahanan. Bentuk kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan ruang juang adalah melaksanakan pengumpulan data yang terkait dengan tata ruang pertahanan darat, melakukan analisis terhadap potensi wilayah maupun potensi pertahanan, melaksanakan koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk menyingkronkan RUTR Wilhan dengan RT-RW, menyiapkan klasifikasi daerah tempur, daerah komunikasi, daerah belakang dan daerah pangkal perlawanan, mentransformasikan pembangunan yang ada untuk mewedahi kepentingan pertahanan jika negara dalam kondisi perang, seperti jalan-jalan yang ada dimanfaatkan sebagai jalan pendekat dan sarana prasarana lain seperti lapangan terbang, sumber air, telekomunikasi dan sebagainya dapat digunakan untuk mendukung kepentingan pertahanan, melaksanakan Bhakti TNI melalui TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD), Pekan Bhakti TNI dan Karya Bhakti dengan membangun, membuka jalan baru, jembatan, sarana komunikasi dan lain-lain dalam tata ruang wilayah pertahanan darat.

Sedangkan untuk kepentingan logistik wilayah dalam bentuk cadangan materiil strategis dilakukan dengan melaksanakan pengumpulan dan

inventarisasi data tentang potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Buatan (SDB) serta sarana prasarana yang dapat digunakan untuk mendukung kepentingan pertahanan negara. Melaksanakan koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait dalam pembinaan dan pendayagunaan potensi SDA dan SDB untuk kepentingan pertahanan negara. Membantu pemerintah mentransformasikan potensi SDA dan SDB dari bentuk sumber daya flora dan fauna, bahan tambang serta sumber-sumber energi yang memiliki nilai strategis menjadi cadangan materiil strategis dalam rangka mendukung logistik wilayah dalam bentuk logistik tempur, energi, pelumas, suku cadang dan bahan baku serta fasilitas pendukung lainnya. Membantu pemerintah melestarikan sumber daya alam yang ada agar terjaga pemanfaatannya untuk dapat digunakan jangka panjang melalui kegiatan inventarisasi pendataan dan pengamanan terpadu. Membantu pemerintah melaksanakan diversifikasi dan pengembangan sumber daya alam agar tidak tergantung pada salah satu komoditi tertentu. Membantu pemerintah dalam mentransformasikan sarana dan prasarana menjadi komponen cadangan dan komponen pendukung, dalam bentuk sarana dan prasarana transformasi, telekomunikasi, depot logistik, migas dan distribusinya, kesehatan, listrik dan perbengkelan dan lain sebagainya. Melaksanakan kegiatan bhakti TNI antara lain berupa penghijauan, pemanfaatan lahan tidur dan lain-lain. Dalam proses untuk mewujudkan ruang juang yang tangguh bagi kepentingan pertahanan negara yang dilakukan satuan TNI AD sifatnya membantu pemerintah dengan

cara berkoordinasi dan bekerja sama dengan instansi terkait antara lain pemerintah daerah, Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Lingkungan Hidup dan lain-lain.

Sedangkan alat juang merupakan perwujudan dari hasil pembinaan aspek demografi yang dibina menjadi kekuatan demografi dalam wujud alat juang yang tangguh dan memiliki daya tangkal kewilayahan untuk kepentingan pertahanan negara. Pembinaan terhadap potensi ini adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia menjadi kekuatan rakyat yang tergabung sebagai komponen utama, komponen cadangan dan komponen pendukung yang pengabdianya dilaksanakan sesuai dengan profesinya. Bentuk kegiatan yang dilakukan adalah berupa kegiatan fisik dan non fisik. Kegiatan fisik yang dilakukan yaitu menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah dan pihak swasta (perusahaan-perusahaan) untuk melatih materi baris berbaris dan jasmani. Memberikan/mengisi pelajaran praktek baris-berbaris dan tata upacara di sekolah-sekolah, praktek tali temali pada pramuka dan lain-lain. Sedangkan kegiatan non fisik dilakukan melalui penyuluhan-penyuluhan dengan materi yang berkaitan dengan bela negara, seperti kesadaran bela negara, wawasan kebangsaan, cinta tanah air dan lain-lain. Instansi terkait yang terlibat dalam mewujudkan alat juang tersebut antara lain adalah Kementerian Pemuda dan Olah Raga, Departemen Dalam Negeri,

Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan, Kantor Cabang Pramuka, Kesbanglinmas, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Kondisi juang merupakan perwujudan dari pembinaan aspek kondisi sosial menjadi kekuatan pertahanan dalam wujud kondisi juang yang tangguh sehingga memiliki daya tangkal kewilayahan yang kuat dan mampu mendukung kepentingan pertahanan negara. Aspek kondisi juang tersebut merupakan aspek ketahanan nasional yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Bentuk kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan kondisi juang yang tangguh bagi kepentingan pertahanan negara yaitu memberikan penyuluhan secara terpadu untuk menanamkan keyakinan pada masyarakat tentang Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara, mewaspadaikan gerakan ekstrim dan radikal yang bertentangan dengan Pancasila dan melakukan pemantauan terhadap perkembangan kegiatan eks G.30 S/PKI dan golongan radikal lainnya. Melakukan penyuluhan secara terpadu tentang bahaya laten komunis, fundamentalis, teroris dan paham lainnya.

Menggugah masyarakat tentang pentingnya pemahaman hak dan kewajiban sebagai warga negara, mendorong masyarakat agar selalu mematuhi ketentuan hukum dalam kehidupan sehari-hari, mendorong masyarakat untuk selalu mengutamakan kepentingan umum, bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Menghimbau pada masyarakat untuk tidak bersifat konsumtif, membantu pemerintah dalam meningkatkan intensifikasi pertanian

dan perkebunan, peternakan dan perikanan yang dilaksanakan secara terpadu. Memberikan penyuluhan secara terpadu tentang perkoperasian dan usaha kecil menengah kepada masyarakat, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya toleransi dalam hidup beragama, melakukan penyuluhan-penyuluhan, penerangan kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan kecerdasan dan kesadaran hukum. Memberikan penyuluhan kebersihan dan kesehatan lingkungan. Menggalakkan kegiatan olah raga dan berolah raga bersama masyarakat, menumbuhkembangkan berbagai bentuk kesenian, budaya dan adat istiadat di lingkungan masyarakat. Membudayakan wajib lapor setiap ada perkembangan situasi yang terjadi di lingkungan masyarakat, mendorong masyarakat untuk mengikuti penataran bela negara yang telah diprogramkan oleh pemerintah, menggalakkan kegiatan Poskamling di lingkungan masyarakat. Dalam proses perwujudan kondisi juang yang tangguh bagi kepentingan pertahanan negara perlu berkoordinasi dan melibatkan instansi terkait seperti pemerintah daerah, Kesbanglinmas, Departemen Agama, Departemen Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pemuda dan Olah Raga, Dinas Pariwisata dan Kesenian dan lain-lain.

Bagi Indonesia peran aktif rakyat dalam bentuk kemanunggalan TNI-Rakyat sangat dibutuhkan dalam sistem pertahanan negara. Sejarah telah membuktikan kesuksesannya pada saat perjuangan fisik melawan penjajah

dan memadamkan berbagai pemberontakan yang terjadi di dalam negeri.⁶

⁶ Pengalaman Mayor (Purn) Alwin Nurdin (wawancara Tgl 26 Februari 2008) dalam memimpin penumpasan Pemberontak DI/TII, telah mempergunakan prinsip-prinsip pembinaan teritorial, dengan memberikan rasa aman dan terlindungi kepada rakyat sehingga kedatangannya mendapat sambutan dan simpati dari rakyat. Pertama-tama di dalam menghadapi pemberontakan gerilya atau pemberontakan dalam negeri yang bebrbentuk gerilya maka sebenarnya secara teoritis harus dihadapi dengan anti gerilya juga. Asumsi kita bahwa seluruh daerah telah dikuasai oleh musuh. Jadi dalam kondisi ini takaran operasi militer lebih besar, sedangkan operasi teritorial boleh dikata belum ada. Rencananya adalah bahwa sistem atau cara ini akan meningkatkan takaran operasi teritorial, dengan asumsi bahwa operasi militer lambat laun akan membuat kekuatan kita unggul. Jadi antara operasi militer dan operasi teritorial sifatnya saling isi mengisi, dimana pada tahap tertentu akan terjadi pertimbangan, bahkan pada tahap akhir operasi militer akan menurun dan semata-mata hanya memelihara situasi dimana rakyat secara keseluruhan sudah berpihak pada kita, hampir sudah tidak ada gerakan militer, sementara operasi teritorial yang dominan. Jadi kalau kita bertanya apa yang dilakukan pada saat itu, sebenarnya secara faktual belum ada organisasi teritorial sebagaimana mestinya yang dibentuk dan beraktifitas, tetapi semata-mata suatu sikap dari seluruh pasukan yang tujuannya yaitu mengamankan rakyat atau memberikan rasa aman pada seluruh rakyat. Hal inilah yang sebenarnya yang menjadi landasan untuk kemudian melakukan operasi teritorial. Dengan rakyat merasa aman maka akan menimbulkan rasa percaya kepada pasukan kita, kepercayaan inilah yang kemudian menjadi modal kita selanjutnya, karena dari sinilah kemudian akan timbul perasaan dilindungi, inilah yang kemudian terkenal dengan istilah merebut hati rakyat. Perlu diketahui bahwa merebut hati rakyat tidak datang dengan sendirinya akan tetapi dengan proses yang panjang. Kebijakan umumnya adalah rakyat harus menerima kita sebagai pelindungnya, contoh pada suatu waktu saya mendapat laporan oleh seksi-1 bahwa baru saja menangkap seseorang, yaitu isteri salah satu tokoh dari DI yang sedang hamil, karena dia belum tentu juga naggota DI maka saat itu juga saya perintahkan untuk melepaskan wanita tersebut, saya katakan kita tidak berperang dengan rakyat. Kejadian ini membuat nama TNI naik dimata masyarakat.

Pengalaman menarik lainnya juga diperoleh Jenderal TNI (purn) Ryamizard Ryacudu (wawancara Tgl. 20 Maret 2008) sewaktu bertugas di Kamboja. Pada saat pertama kontingen Indonesia datang, juga tidak berbeda jauh nasibnya dengan kontingen lain, yaitu mendapat serangan roket. Namun selang tiga minggu kemudian, tentara Indonesia sudah bisa bergabung dengan faksi-faksi tersebut untuk berolah raga bersama, dan aneka macam kegiatan lainnya. Tiap-tiap kompi berusaha mengunjungi faksi yang ada sesuai dengan wilayah mereka. Dan ternyata mereka bisa mengunjungi kelompok tersebut dengan aman, tidak ada perselisihan. Caranya adalah dengan metode Binter seperti yang ada di Indonesia, yaitu dengan prinsip baik-baik dengan rakyat. Yang pertama kali dilakukan adalah bagaimana menumbuhkan kepercayaan pada faksi-faksi yang bertikai tersebut bahwa kita bermaksud baik, kita tidak akan memusuhi akan tetapi justru akan membantu. Kunjungan dimulai dari komandan peleton, komandan kompi sampai berlanjut ke komandan di atasnya. Kegiatan tersebut dilakukan secara terus menerus dengan keikhlasan hati dan disertai sarana penggalangan sekedarnya seperti rokok. Karena pada saat itu tidak ada dana khusus dari PBB, maka tentara Indonesia atas inisiatif sendiri mengumpulkan sejumlah uang untuk membeli sarana kontak sebagai sarana penggalangan seperti rokok, sehingga akhirnya bisa kumpul dan terlibat pembicaraan secara santai di tempat mereka (di Indonesia terkenal dengan sebutan adu bako). Kegiatan ini dilakukan secara terus menerus sampai akhirnya mereka bisa masuk ke semua faksi yang ada yang nota bene adalah saling bertentangan. Faksi ini terkenal kejam dan bengis, bahkan ada yang tega membunuh ibunya sendiri untuk membuktikan kesetiaannya kepada faksi dan pimpinan faksi. Namun mereka dengan anggota tentara Indonesia bisa berhubungan dengan akrab. Pada hari-hari nasional, seperti tanggal 17-an tentara Indonesia mengadakan berbagai macam lomba yang melibatkan rakyat Kamboja, seperti misalnya lomba panjat pinang dll. Dari sinilah kemudian muncul kepercayaan masyarakat Kamboja

Bentuk kegiatan untuk mewujudkan kemanunggalan TNI-Rakyat yang tangguh bagi kepentingan pertahanan negara antara lain melakukan kegiatan bhakti TNI berupa karya bhakti dan pekan bhakti dengan sasaran yang menyentuh kebutuhan masyarakat, dan juga bhakti sosial seperti pemberian bantuan kemanusiaan, pengobatan massal dan melakukan silaturahmi melalui kunjungan-kunjungan.

2. Kepentingan Binter TNI AD.

Pasca penetapan Undang-Undang RI Nomor 34/2004 tentang TNI telah terjadi perubahan terhadap tugas-tugas TNI yaitu tugas operasi militer untuk perang (OMP), dan tugas operasi militer selain perang (OMSP). Untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut tidak harus dihadapi dengan tugas pertempuran namun dapat dilakukan dengan non tempur. Tugas non tempur secara umum dibebankan kepada satuan Komando Kewilayahan (Kodam sampai Koramil) melalui fungsi pembinaan teritorial, sedangkan tugas tempur dilaksanakan oleh satuan-satuan badan pelaksana pertahanan pusat.⁷

Kalau melihat dari pengalaman sejarah bahwa sistem pertahanan negara yang paling kuat dan ampuh serta sudah teruji baik dalam perang mempertahankan kemerdekaan maupun memadamkan pemberontakan dalam

terhadap tentara Indonesia. Fakta lain bagaimana sangat pentingnya Binter adalah terjadi di Aceh, bagaimana Jenderal TNI (Purn) Ryamizard telah menyatakan dalam sebuah media Kompas, bahwa kegagalan Binter di Aceh, yang menyebabkan berlarutnya penyelesaian persoalan di Aceh.

⁷ Hotmangaraja Panjaitan, *Binter dengan Prinsip Sustainability dalam Memulihkan dan Meningkatkan Ketahanan Nasional*, Buletin Interaksi Teritorial, Pusterad, Jakarta, hal. 5

negeri adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta (Sishanta). Sistem tersebut melibatkan semua potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan yang bersifat semesta.

Dihadapkan pada kondisi keuangan negara yang baru saja mau beranjak dari keterpurukan akibat krisis moneter belum sepenuhnya berhasil, akibatnya anggaran untuk berbagai bidang termasuk anggaran pertahanan juga tidak begitu besar. Keterbatasan anggaran ini kemudian berimbas pada kemampuan pemerintah khususnya dalam bidang pertahanan untuk mengembangkan kemampuan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) dan jumlah personel yang tidak mungkin terwujud dalam waktu dekat, maka sistem pertahanan yang melibatkan rakyat dinilai masih sangat valid.

Keberhasilan suatu sistem pertahanan yang bertumpu pada kesemestaan sangat tergantung pada seberapa jauh kemampuan negara dalam menyiapkan segenap potensi bangsa untuk dapat ditransformasikan menjadi suatu kekuatan pertahanan, baik itu untuk tujuan sebagai daya tangkal maupun untuk dikerahkan menghadapi ancaman. TNI sebagai komponen utama kekuatan pertahanan tidak akan mampu secara mandiri menangkal setiap ancaman yang timbul. Oleh karena itu kemanunggalan TNI – Rakyat menjadi suatu hal yang sangat penting dan yang pada implementasinya dilakukan dengan melaksanakan pembinaan teritorial sebagai sarana dan metode yang paling tepat sehingga terwujud suatu kekuatan yang handal dan mampu menghadapi setiap ancaman yang mungkin timbul.

Dalam perkembangan selanjutnya seiring dengan bergulirnya reformasi, berbagai tuntutan dan perubahan yang bersifat fundamental telah dilakukan di lingkungan TNI. Hal ini diawali dengan Tap MPR RI No. VI/2002 tentang Pemisahan TNI dan POLRI. Kemudian Tap No. VII/2002 tentang Peran dan Tugas TNI di bidang pertahanan, sedangkan POLRI di bidang keamanan. Akhirnya TNI melakukan reformasi internal diantaranya penghapusan dwi fungsi, peran sospol dan sebagainya. Namun pada perkembangannya, reformasi internal TNI dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu guna menuntut dilakukannya pembubaran Komando Teritorial dan jajarannya (Kodam dan jajarannya), dengan alasan bahwa fungsi teritorial merupakan fungsi pemerintah. Berkaitan dengan situasi ini terdapat dua kelompok yang berseberangan, yaitu kelompok pertama Koter harus dihapuskan dengan argumen yang beragam, yang pada intinya dikatakan sebagai penghambat demokratisasi. Sedangkan kelompok kedua menghendaki keberadaan Koter tetap ada akan tetapi dengan melakukan beberapa penataan/penyempurnaan fungsi guna memberikan rasa aman dan kondisi aman. Bagi TNI kedua pilihan tersebut tidak terlalu menjadi masalah, sejauh mempunyai legitimasi hukum yang merupakan kesepakatan bangsa. Namun masalah yang sebenarnya bukan pada keberadaan Koter itu dihapuskan atau dipertahankan, tetapi pada Koter tersebut akan diberikan peran, fungsi, tugas dan kewenangan apa, yang relevan dengan peran TNI sebagai alat negara

dalam fungsi pertahanan sesuai dengan kesepakatan bangsa yang dituangkan melalui ketentuan konstitusional.⁸

Pada tahun 2000 dalam workshop pembahasan "tentang fungsi teritorial" yang diselenggarakan oleh Staf Teritorial TNI muncul sikap pro dan kontra baik di kalangan TNI maupun non-TNI.⁹ Pada intinya TNI tetap bertahan agar Binter tidak dihapuskan dengan berbagai pertimbangan, akan tetapi justru saat itu TNI memperjuangkan fungsi Binter terwadahi dalam RUU pertahanan negara. Namun dengan berat hati dan berbagai pertimbangan Binter tetap tidak bisa diperjuangkan untuk dimasukkan dalam peraturan perundang-undangan. Untuk mewadahi fungsi Binter dalam peraturan perundang-undangan maka dirumuskan sebagai tugas TNI dalam operasi selain perang yaitu memberdayakan wilayah pertahanan.

Pada perkembangannya melalui pengkajian dalam penjelasan UU RI Nomor 3/2002 tentang Pertahanan, Pemberdayaan Wilayah Pertahanan kurang selaras dengan pengertian pembinaan teritorial yang sebenarnya. Oleh pimpinan TNI AD, istilah pembinaan teritorial tetap menjadi fungsi TNI dan pembinaan teritorial ditetapkan sebagai fungsi utama disamping fungsi pertempuran dan pengembangan kekuatan. Hal ini dilakukan oleh Pimpinan TNI AD karena pembinaan teritorial merupakan nilai, perangkat pranata, prinsip dan doktrin yang diyakini kebenarannya untuk digunakan sebagai

⁸ Purbo S. Suwondo, *Sekuriti Nasional dengan Pemerintah Daerah dan Pembinaan Wilayah sebagai Satu Aspek dalam Ketahanan Nasional*, Jakarta, 2002, hal. 15

⁹ Hotmangaradja Pandjaitan, *Op. Cit*, hal. 3

instrumen pengatur kehidupan atau sistem kinerja TNI AD, sekaligus menunjukkan identitas atau jati diri TNI AD yang tidak dapat dihapuskan.

Implementasi pembinaan teritorial sebagai sistem pembinaan Angkatan Darat sebenarnya telah tertuang secara jelas dalam Doktrin Kartika Eka Paksi dimana dijelaskan bahwa pembinaan teritorial merupakan fungsi utama Angkatan Darat yang sama kedudukannya dengan fungsi pertempuran.

¹⁰ Sementara itu, implementasi tugas satuan komando kewilayahan yang berpengaruh langsung terhadap penyiapan sistem pertahanan negara adalah menciptakan dan memelihara ketahanan kondisi sosial kemasyarakatan di daerah sebagai prasyarat terlaksananya sistem pembinaan pertahanan negara yang bersifat semesta. Untuk itu pementapan pembinaan teritorial kedepan diarahkan dalam rangka mewujudkan daya tangkal pertahanan negara bagi seluruh komponen pertahanan negara ditinjau dari aspek potensi dan aspek kondisinya. Mengingat ketahanan nasional merupakan prasyarat terwujudnya sistem pertahanan negara maka tugas komando kewilayahan adalah menjaga dan mempertahankan kondisi di wilayahnya, sebagai upaya strategi penangkalan terhadap ancaman militer dan non-militer melalui pembangunan sebagai sistem pembinaan ketahanan nasional yang meliputi ketahanan ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya serta pertahanan dan keamanan.

¹⁰ Amanat KSAD pada Upacara Peralihan Pusdikter dari Kodiklat TNI AD kepada Pusterad, tanggal 7 Maret 2007

3. Persoalan di Sekitar Ketahanan Nasional

Dalam buku “Menata Sistem Pertahanan”¹¹ dijelaskan bahwa ancaman nasional terdiri dari ancaman tradisional dan ancaman non-tradisional. Ancaman tradisional berupa invasi atau agresi dari luar, sedangkan ancaman non tradisional terdiri dari ancaman non tradisional bersenjata dan ancaman non tradisional tidak bersenjata.

Ancaman non-tradisional bersenjata berupa separatisme, pemberontakan bersenjata, terorisme bersenjata, pelanggaran wilayah, pembajakan, perompakan dan ancaman bersenjata lainnya. Sedangkan ancaman non tradisional tidak bersenjata berupa illegal logging, illegal fishing, illegal trading, terorisme tak bersenjata dan lain-lain. Sedangkan ancaman non militer adalah semua bentuk ancaman yang berada dalam dimensi ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya (Ipoleksosbud).

Dalam kacamata yang lain Hotmangaradja Pandjaitan¹² mengidentifikasi adanya beberapa masalah sosial yang dihadapi bangsa Indonesia, diantaranya:

a. Masalah Kebangsaan.

Kebhinnekaan yang ada dalam tubuh bangsa Indonesia yang membedakan suku, agama, adat istiadat, golongan, sehingga bila tingkat kesadaran, persatuan dan kesatuan bangsa menurun dapat menjadi gangguan dan ancaman terhadap stabilitas negara.

¹¹ Departemen Pertahanan RI, *Menata Sistem Pertahanan*, Jakarta, 2005, hal. 12-19

¹² Hotmangaradja Pandjaitan, *Opcit*, hal. 3

b. Letak Geografi.

Letak geografi Indonesia yang rawan terhadap berbagai ancaman bencana alam yang memerlukan pemantauan, penanganan yang mampu dilakukan oleh TNI secara cepat dalam tugas keselamatan jiwa penduduk, sarana dan prasarana wilayah.

c. Kondisi Demografi.

Tidak meratanya penyebaran penduduk sehingga menimbulkan adanya kelebihan tenaga kerja disuatu wilayah dan kekurangan di wilayah yang lain serta kerawanan lain yang memerlukan penanganan khusus oleh TNI.

d. Kondisi sosial.

Adanya upaya untuk mengubah ideologi Pancasila dengan ideologi lain, terutama oleh golongan kiri maupun kanan secara ideologis maupun politis mengancam kesatuan dan persatuan. Adanya perubahan tata nilai menjurus pada menurunnya ketahanan nasional. Perbedaan tingkat penyesuaian diri atau adaptasi penduduk terhadap kemajuan teknologi dan informasi membuat tingkat perbedaan yang tinggi antara golongan maju dan golongan tradisional, golongan kaya dan golongan miskin serta tingginya tingkat pengangguran yang pada akhirnya dapat memicu timbulnya masalah-masalah sosial lainnya.

Sementara itu menurut Syamsul Ma'arif¹³ kondisi ketahanan nasional Indonesia, masih diwarnai dengan beberapa kondisi yang belum sepenuhnya menguntungkan diantaranya:

a. Masalah Ideologi.

Kesadaran akan pentingnya Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan semakin meningkat, tetapi masih belum sepenuhnya menjamin terciptanya persatuan dan kesatuan di dalam kehidupan masyarakat luas. Perkembangan era globalisasi dapat menjadi penyebab masuknya pengaruh liberalisme maupun paham baru. Demikian pula pengaruh ideologi lain yang diidentifikasi sebagai golongan anti kemapanan.

b. Masalah Politik.

1) Masih ada kelompok tertentu yang memiliki perbedaan paham atas pelaksanaan demokrasi Pancasila, terlebih karena derasnya isu globalisasi, hak asasi manusia, lingkungan hidup dan demokratisasi. Hal ini potensial untuk menimbulkan keresahan dan pertentangan sosial politik dalam lingkup nasional maupun internasional.

2) Politik luar negeri yang bebas dan aktif yang dilaksanakan secara konsisten telah memberikan sumbangan yang besar bagi terwujudnya keamanan dan ketertiban

¹³ Syamsul Ma'arif, *Media Pers sebagai Sarana Binter*, Majalah Yudhagama, No. 52 Tahun XVIII April 1997, hal 66-67.

regional. Namun kepentingan nasional khususnya bidang sosial politik dapat saja berbenturan dengan kepentingan negara lain.

c. Masalah ekonomi

Indonesia memiliki potensi ekonomi yang besar dengan adanya sumber daya manusia dan sumber daya alam yang melimpah. Tetapi hasil-hasil pembangunan masih belum merata dinikmati sebagian masyarakat. Walaupun jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan semakin menyusut, namun masih perlu ditangani lebih lanjut.

Demikian pula dengan masalah pemerataan kegiatan pembangunan antara pusat dan daerah ataupun antara kawasan barat dan timur wilayah Indonesia masih potensial menimbulkan kesenjangan ekonomi.

d. Sosial Budaya.

Hal-hal yang berkenaan dengan isu suku, agama dan ras, kepadatan penduduk, kenakalan remaja, kesempatan kerja dan berusaha, kesenjangan ekonomi, kesempatan pendidikan, pencemaran lingkungan hidup, pertanahan dan pergeseran nilai agraris tradisional ke nilai industri modern masih dapat menimbulkan kerawanan bidang sosial budaya dan permasalahan bidang hukum.

e. Bidang Pertahanan Keamanan.

Dari semua aspek tersebut bila tidak tertangani dengan baik akan melimpah ke bidang pertahanan keamanan sebagai muaranya. Kegiatan subversif akan memanfaatkan setiap kerawanan sosial yang ada.

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas dapat dikemukakan bahwa permasalahan penelitian berkaitan dengan :

”Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dalam mendukung Ketahanan Nasional”

C. Ruang Lingkup dan Pembatasan Masalah

Studi ini dibatasi hanya pada masalah pembinaan teritorial oleh jajaran Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, dengan fokus pada pelaksanaan pembinaan teritorial pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

D. Pertanyaan Penelitian.

Dari permasalahan tersebut di atas dapat diajukan beberapa pertanyaan penelitian sbb :

- a. Apa bentuk peran Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dalam pembinaan teritorial oleh satuan komando teritorial untuk mendukung ketahanan nasional?

- b. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan pembinaan teritorial ?
- c. Bagaimana sebaiknya pembinaan teritorial oleh komando teritorial ke depan ?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mendiskripsikan dan menganalisis bentuk pembinaan teritorial oleh satuan komando kewilayahan dilihat dari aspek ketahanan nasional.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pembinaan teritorial.
- c. Untuk mengetahui bagaimana sebaiknya pelaksanaan pembinaan teritorial oleh komando teritorial diwaktu yang akan datang.

2. Manfaat Penelitian

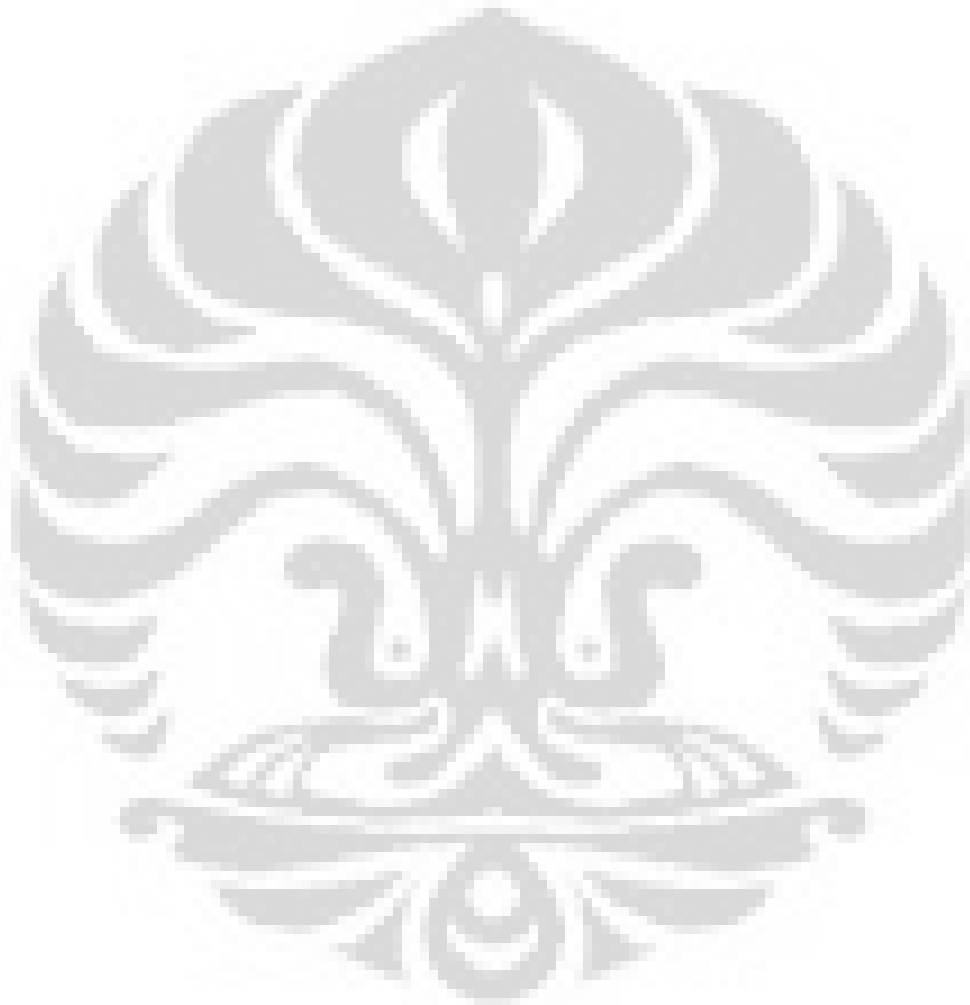
- a. Menjadi bahan perbandingan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian sejenis atau lanjutan, serta melengkapi kepustakaan ilmu yang berkaitan dengan ketahanan nasional.
- b. Sebagai bahan masukan kepada segenap komponen bangsa, khususnya pihak-pihak yang berseberangan pendapat dengan TNI agar

memahami bahwa TNI selain tugas tempur juga mempunyai tugas non tempur.

F. Sistematika Penulisan

- BAB I** Pendahuluan. Pada bab ini dikemukakan tentang latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II** Landasan Teori. Bab ini berisi tentang definisi dan konsep mengenai teori-teori yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti yaitu Teori Peran, Pembinaan Teritorial, Konsep Pertahanan Teritorial, Konsep Pemberdayaan Masyarakat, Sistem Pertahanan Semesta dan Konsep Ketahanan Nasional.
- BAB III** Metodologi Penelitian. Pada bab ini dikemukakan tentang uraian mengenai proses penelitian yang dilaksanakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang dimulai dari jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, unit analisis, teknik pengumpulan data dan prosedur pengolahan dan analisis data.
- BAB IV** Pembinaan Teritorial TNI Angkatan Darat dan Ketahanan Nasional. Berisi pelaksanaan Binter oleh satuan komando teritorial dan pembahasannya serta kaitannya dengan ketahanan nasional, yang meliputi lahirnya konsep teritorial, pentingnya komando teritorial, dan pelaksanaan Binter.

BAB V Penutup. Memuat kesimpulan hasil penelitian dan saran yang dipandang perlu.



BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Peran.

Kamus Bahasa Indonesia kontemporer yang disusun oleh Peter Salim dan Yeni Salim Edisi Pertama 1991 mengartikan peran sebagai suatu yang diharapkan dan dimiliki seseorang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat, jadi peran bisa diartikan sebagai tugas utama yang harus dilakukan.

Dalam pengertian yang lain dapatlah disampaikan beberapa pengertian peran sbb¹:

“A role is expected behavior associated with given position or atatus in society” (Atwater, 1998)

“A Role can be difined as the functioner aspects associated with a specific position in a social context” (Shaw & Constanzo, 1982)

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peran adalah sebuah tingkah laku yang diharapkan atau aspek fungsional dari seseorang yang terkait dengan poisisi ataupun statusnya dalam masyarakat.

Sazbin menyimpulkan dari pendapat-pendapat para ahli yang berbeda dalam menggunakan istilah peran, yaitu sebagai suatu susunan perilaku seseorang yang diselaraskan dengan posisi yang diberikan kepadanya. Posisi dalam “Struktur Sosial” dipandang sebagai suatu kumpulan harapan atau dugaan reaksi yang akan dapat

¹ Fitria Mega, *Peran Keluarga dan Lingkungan Kerja Terhadap Perkembangan Karier Polwan*, Jakarta, Tesis Program Magister Pasca Sarjana UI, 2006, hal 27

diperoleh dari orang lain.² Dengan kata lain seseorang yang menduduki posisi mengharapkan reaksi dari orang lain dan orang lain mempunyai harapan-harapan terhadap pejabat yang menduduki posisi tersebut.

Posisi merupakan suatu susunan harapan yang mencakup konsep perilaku yang diharapkan ada pada si pemegang peran, sehingga dapat dikatakan bahwa posisi merupakan suatu susunan harapan peran. Barnerst mengatakan bahwa fungsi peran itu sendiri adalah sekedar kumpulan tugas/tanggungjawab yang dilimpahkan pada seseorang atau apa yang diharapkan organisasi agar dikerjakan oleh pemegang jabatan tersebut.³ Oleh karena itu suatu organisasi sebagai suatu sistem terbuka menyandarkan diri pada lingkungannya untuk mewujudkan suatu aktivitas, maka setiap unit dalam organisasinya pun merupakan subsistem terbuka yang menyandarkan diri pada “interaksi” dengan unit-unit lain demi kelangsungan hidupnya.

Homans G menyebutkan bahwa interaksi tersebut akan menimbulkan “sentimen” diantara individu-individu atau kelompok-kelompok didalam lingkungan tersebut. Semakin tinggi interaksi yang ada maka sentimen akan menjadi semakin positif, misalnya : seseorang yang bermusuhan dengan temannya, lama kelamaan interaksi mereka makin renggang dan berkurang.⁴ Antara aktivitas, interaksi dan sentimen saling mempengaruhi satu sama lain, sehingga bila terjadi perubahan pada suatu variabel akan menyebabkan perubahan pada kedua variabel lainnya.

² Sabin, TR, dalam *Role Theory* dalam Lindzey, *Handbook of Social Psychology*, Vol I, third printing, Massachusetts USA, Addison Wesley Publishing Co, 1954

³ Barnest MC, *Company Organization : Theory and Practice*, Londong, George Allen & Unwin Ltd, 1969, p. 118

⁴ Homans G, dalam Truliyanti Sri hastuti Sutrasno, *Hubungan Antara Perbedaan Persepsi Peran-Harapan Peran Dengan Prestasi*, Jakarta, Tesis S-2 Universitas Indonesia, 1987, hal 16

Dengan berpegangan pada prinsip tersebut, selanjutnya dapat dikatakan bahwa setiap peran hanya dapat dilaksanakan dalam interaksi dengan peran lainnya. Setiap peran memiliki hubungan dengan peran lainnya yang menentukan kelanjutan fungsinya yang tepat.

Katz dan Kahn menunjukkan bahwa dalam hubungan suatu peran dengan peran lainnya dimana “harapan-harapan peran” ditampilkan oleh di pemegang peran ; maka anggota dalam lingkungan kelompok peran yang mempunyai harapan-harapan terhadap suatu peran tersebut disebut sebagai “peran pengirim”. Mereka berusaha untuk mempengaruhi dan menyampaikan harapan-harapan peran tersebut kepada si pemegang peran.⁵ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa “perilaku peran” merupakan reaksi si pemegang peran terhadap peran si pemegang peran.

B. Pembinaan Teritorial

Doktrin Teritorial Nusantara⁶ menyebutkan bahwa pembinaan diartikan sebagai tindakan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pengembangan, pengerahan, pengendalian segala sesuatu secara berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan wilayah atau teritorial dimaksudkan sebagai seluruh atau sebagian dari permukaan bumi baik darat, laut dan udara dengan segala apa yang terdapat di atas dan di dalamnya. Dengan demikian sudah tersimpul unsur ruang semesta negara dengan segenap isinya (sosiogeografis) baik yang merupakan daya kekuatan maupun daya

⁵ *Ibid*, hal 16-17

⁶ Departemen Pertahanan Keamanan, *Doktrin Teritorial Nusantara*, Jakarta, 1972, hal.24

kemampuan, baik kekurangannya maupun kelemahannya, baik kualitas maupun kuantitasnya baik yang bersifat materiil maupun spirituil.

Gabungan dari pada keduanya kemudian disempurnakan dalam Buku Petunjuk Induk tentang Teritorial bahwa yang dimaksud dengan pembinaan Teritorial TNI AD adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan serta pengendalian potensi wilayah yang diselenggarakan bersama-sama dengan seluruh komponen bangsa dalam rangka menjadikan wilayah darat sebagai ruang, alat dan kondisi juang guna kepentingan pertahanan negara aspek darat.⁷

Pembinaan teritorial secara fisik terwujud dalam kemanunggalan TNI (AD) dengan rakyat yang hakiki, secara non fisik adalah munculnya kesadaran secara tulus masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pertahanan negara, karena pertahanan Indonesia bersifat semesta, artinya melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya yang dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu dan berlanjut.⁸

Konsepsi pembinaan teritorial yang dikembangkan TNI saat ini adalah bagaimana mengelola kekuatan pertahanan di daerah bukan dalam konsep lama sebagaimana dalam pertahanan keamanan rakyat semesta (Hankamrata), melainkan sesuai konsep pertahanan menyeluruh (total defence). Dalam konsepsi Hankamrata, rakyat menjadi 'pagar manusia' di bidang pertahanan keamanan (Hankam). Sementara

⁷ Markas Besar TNI AD, *Buku Petunjuk Induk tentang Teritorial*, Jakarta, 2002, hal. 28

⁸ Mardikawoto, *Binter Diperlukan untuk Mewujudkan Sishanta*, Buletin Teritorial, Edisi Nomor 03 Tahun 2005, Staf Teritorial TNI AD, Jakarta, 2005, hal. 43.

dalam total defence, rakyat sesuai bidang keahlian, menjadi kekuatan pendukung pertahanan negara.⁹

Pembinaan teritorial dalam pelaksanaannya menggunakan metode pertama, Bhakti TNI AD yaitu pelibatan dan pendayagunaan kemampuan TNI sebagai kekuatan pertahanan dalam menjalankan fungsi teritorial untuk menunjang pertahanan negara tanpa mengabaikan program pembangunan nasional dengan pendekatan kesejahteraan atau lebih mengutamakan meningkatkan pembangunan masyarakat yang mengandung aspek keamanan dengan kegiatan antara lain: membantu menyelenggarakan kegiatan kemanusiaan, menanggapi masalah-masalah sosial dan kemanusiaan atas permintaan instansi terkait dan atau atas inisiatif sendiri yang dilaksanakan secara bersama-sama dengan instansi terkait tanpa mengabaikan kesiapan satuan. Kedua, Pembinaan Ketahanan Wilayah, yaitu pembinaan terhadap masyarakat yang mengutamakan pendekatan untuk mewujudkan stabilitas keamanan serta meningkatkan kepekaan dan rasa tanggung jawab masyarakat untuk berperan serta dalam menanggulangi gangguan keamanan yang mungkin timbul. Dilakukan dengan memberikan saran dan dorongan terhadap instansi fungsional dalam rangka mewujudkan ketahanan yang dinamis di suatu wilayah guna menangkal setiap ancaman yang dapat membahayakan kedaulatan dan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Ketiga, Komunikasi Sosial, yaitu memelihara dan meningkatkan keeratan hubungan dengan seluruh komponen bangsa sehingga akan

⁹ Ikrar Nusa Bhakti, Quo Vadis pembinaan teritorial, <http://www.inilah.com/berita/celah/2008/09/19/50666/quo-vadis-pembinaan-teritorial/>

terwujud saling pengertian dan kebersamaan mendalam yang memungkinkan timbulnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pertahanan negara.¹⁰ Selanjutnya dalam implementasinya di lapangan, hal tersebut dilaksanakan dengan berpedoman pada aturan yang termuat dalam Pokok-Pokok Penyelenggaraan Pembinaan Teritorial TNI Angkatan Darat.¹¹

Dengan berpedoman pada Pokok-Pokok Penyelenggaraan Pembinaan Teritorial TNI AD tersebut maka penyelenggaraan pembinaan teritorial diharapkan akan dapat menciptakan adanya suatu keterpaduan dan kebersamaan serta kesinambungan. Keterpaduan dimaksudkan sebagai keterpaduan antar segenap komponen bangsa dalam pengelolaan komponen cadangan dan komponen pendukung atau segenap potensi sumber daya nasional menjadi kekuatan pertahanan aspek darat sebagai bagian dari sistem pertahanan negara. Sedangkan kebersamaan terwujud dalam kebersamaan (gotong royong) segenap komponen bangsa bagi kepentingan pertahanan aspek darat dalam sistem pertahanan negara. Sementara kesinambungan dimaksudkan sebagai kesinambungan pembangunan komponen cadangan dan komponen pendukung untuk kepentingan dan keserasian pertahanan aspek darat, laut dan udara maupun kepentingan kesejahteraan. Oleh sebab itu untuk menjamin keberhasilan pembinaan teritorial maka Binter diselenggarakan sepanjang masa, baik dalam keadaan damai, darurat sipil, darurat militer maupun perang dengan tujuan untuk menyiapkan komponen cadangan dan komponen pendukung yang tangguh.

¹⁰ Markas Besar TNI AD, *Buku Petunjuk Induk tentang Binter, PI: Ter-01.a*, 2003, hal. 10

¹¹ Lihat Pokok-Pokok Penyelenggaraan Pembinaan Teritorial TNI AD (dalam lampiran).

Seluruh jajaran dan prajurit TNI AD merupakan komponen subyek yang akan melaksanakan pembinaan teritorial yang sebagai obyeknya adalah potensi nasional di daratan untuk mewujudkan komponen cadangan dan komponen pendukung pertahanan darat negara yang terdiri dari unsur geografi, demografi dan kondisi sosial.

C. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Terminologi pemberdayaan masyarakat kadang-kadang sangat sulit dibedakan dengan penguatan masyarakat serta pembangunan masyarakat (community development). Dalam prakteknya seringkali terminologi-terminologi tersebut saling tumpang tindih, saling menggantikan dan mengacu pada suatu pengertian yang serupa. Meskipun belum ada kesepakatan dan pengertian yang baku tentang pemberdayaan masyarakat atau yang secara umum juga dikenal dengan community empowerment, nampaknya cukup penting dan berguna untuk mengadopsi pengertian pemberdayaan masyarakat yang dirilis oleh Tim Deliveri¹² sebagai salah satu acuan. Proses pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses yang bertitik tolak untuk memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidupnya sendiri dengan menggunakan dan mengakses sumberdaya setempat sebaik mungkin. Proses tersebut menempatkan masyarakat sebagai pihak utama atau pusat pengembangan (people or community centered development).

¹² Deliveri, 2004, *Pemberdayaan Masyarakat* http://www.deliveri.org/guidelines/policy/pg_3/pg_3summary.htm

Menurut Subejo dan Supriyanto¹³ esensinya “Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumberdaya lokal yang dimiliki melalui aksi-aksi kolektif (collective action) dan jaringan (networking) sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi, dan sosial”.

Sementara Ginandjar Kartasasmita¹⁴ mengatakan bahwa memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat kita yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Selanjutnya Ginandjar mengatakan bahwa Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial.

Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (basic needs) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (safety net), yang pemikirannya belakangan ini banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif terhadap konsep-konsep pertumbuhan di masa yang lalu. Konsep ini berkembang dari upaya banyak ahli dan praktisi untuk mencari apa yang antara lain oleh Friedman disebut alternative development, yang menghendaki “inclusive democracy, appropriate economic growth, gender equality and intergenerational equity”.¹⁵

¹³ Subejo dan Supriyanto, *Metodologi Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat*, Bahan Kuliah Intensif Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan, *Study On Rural Empowerment*, Dewan Mahasiswa Fakultas Pertanian UGM Tanggal 16 Mei 2004.

¹⁴ Ginandjar Kartasasmita, *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan Yang Berakar Pada Masyarakat*, makalah disampaikan pada Sarasehan DPD GOLKAR Tk. I Jawa Timur, Surabaya, 14 Maret 1997

¹⁵ John Friedman, *Empowerment: The Politics of Alternative Development*, Cambridge: Blackwell 1992.

Selanjutnya menjadi lebih penting untuk diperhatikan bahwa pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian. Karena, pada dasarnya setiap apa yang dinikmati, harus dihasilkan atas usaha sendiri (yang hasilnya dapat dipertukarkan dengan pihak lain). Dengan demikian, tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.

Jadi esensi dari pemberdayaan masyarakat adalah bagaimana memberikan stimulan atau rangsangan yang pada akhirnya dapat memotivasi masyarakat untuk dapatnya memanfaatkan potensinya dan potensi lingkungannya untuk mejadi lebih mandiri secara keseluruhan.

D. Konsep Pertahanan Teritorial

Teori yang berkaitan dengan pertahanan teritorial ini sangat banyak dan berbeda antara satu dengan yang lain. Ada yang benar-benar baru dan ada pula yang sudah ada sejak berabad-abad yang lalu. Ada yang mendasarkan teorinya dari sistem politik militer suku Indian Iroqui atau suku-suku Jerman jaman dahulu maupun berdasarkan Kesepakatan Paris tahun 1871.¹⁶ Ada yang melihatnya sebagai pasukan petani dan rakyat pedesaan dan ada juga yang akan menggunakan buruh kota sebagai sumber kekuatan. Ada yang berasal dari paham politik garis kanan dan ada juga yang dari garis kiri. Ada juga paham yang hendak memperbesar kekuatan militer yang ada dengan mobilisasi rakyat kota dan ada juga yang hendak benar-benar menghapuskan perang. Ada yang bersikap untuk mensipilkan militer dan ada juga yang hendak memiliterkan masyarakat.

¹⁶ Adam Robert, *Nations In Arms, The Theory and Practice of Territorial Defence*, Second Edition, St. Martin's Press, New York, 1986, hal. 15

Sejarah keterlibatan rakyat dalam sistem pertahanan, bermula ketika Napoleon Bonaparte menjadi kaisar Perancis pada akhir abad 18 hingga permulaan abad 19 berkeinginan untuk memperluas kekuasaannya ke seluruh daratan Eropa memerlukan kekuatan yang besar yang tidak cukup dibangun dari tentara sewaan saja. Napoleon kemudian merancang konsep yang mewajibkan setiap laki-laki warga negara Perancis yang berumur delapan belas tahun ke atas untuk melakukan wajib militer selama waktu tertentu. Inilah yang kemudian menjadi konsep milisi atau dinas wajib militer yang menjadi titik permulaan peran rakyat dalam pertahanan negara.¹⁷

Sebenarnya yang memulai dengan penggunaan peran rakyat dalam perlawanan adalah Spanyol ketika harus menghadapi serangan Napoleon. Spanyol tidak mampu lagi melawan Perancis secara teratur dan beralih kepada guerrilla atau perang kecil. Sejak itu istilah guerrilla menyebar dan diindonesiakan menjadi gerilya.

Akibat perlawanan gerilya Spanyol tersebut kemudian, Revolusi Perancis memperkenalkan konsep tentang pertahanan territorial. Inilah yang menjadi salah satu peringatan bagi Negara-negara Eropa bahwa terdapat sebuah bentuk perlawanan bersenjata terhadap kekuatan asing, sehingga kata “gerilya” masuk ke dalam istilah Inggris sebagai hasil dari perlawanan bangsa Spanyol. Perlawanan Spanyol yang berlangsung tahun 1808-1814 ini telah memberikan kesan yang mendalam terhadap para ahli teori militer, termasuk Baron A.H. Jomini dan Jendral Carl von Clausewitz.

¹⁷ Sayidiman Suryohadiprojo, *Si Vis Pacem Para Bellum, Membangun Pertahanan Negara Yang Efektif*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hal. 32

Pada bukunya yang berjudul *On War*, Clausewitz memberikan dua referensi singkat mengenai “perang rakyat” ini:¹⁸

“ Bangsa Spanyol dengan perlawanan tak kenal lelahnya telah memperlihatkan bahwa mobilisasi seluruh bangsa sebagai kekuatan bersenjata dan tindakan insurjensi dapat memberikan pengaruh dalam skala yang lebih besar dengan mengabaikan kelemahan dan keberpihakan perorangan.....”

“ Peperangan di Spanyol, yang telah dipicu oleh serangkaian kejadian sebelumnya pada dasarnya adalah peperangan yang dilaksanakan oleh seluruh rakyat....Kita telah dapat melihat bahwa hal ini telah tumbuh menjadi sebuah kekuatan yang baru dan bukan hanya sekedar perwujudan peningkatan kerja sama antar bagian masyarakat...”

Berkaitan dengan perang rakyat ini, selanjutnya Clausewitz mengidentifikasi adanya dua karakteristik besar yang berkaitan dengan perang rakyat yaitu militer dan politik, sebagaimana dikutip oleh Purbo S. Suwondo dalam makalahnya “*The Genesis of The Indonesian National Army and some political implications*”¹⁹

“Clausewitz had identified two mayor characteristics of a “people’s war” as being military and political. Clausewitz’s writing are primarily oriented toward the idea of people’s war being a forceful realization of plotical aim. As he stated “War can never be sparated from political intercourse”

Senada dengan Clausewitz, Mao juga menekankan tentang esensi hubungan antara politik dan perang, suatu hubungan yang mana suatu operasi militer harus dibawah kendali aturan politik. Tujuan perang revolusioner adalah politik.²⁰

“War cannot for a single moment be separated from politics, politik is war without bloodshed, while war is politics with bloodshed”

¹⁸ Adam Robert, *Op. Cit*, hal. 17

¹⁹ Purbo S. Suwondo, *The Genesis of The Indonesian National Army and some political implications*, Makalah Seminar di Belanda, 1996, hal. 39

²⁰ John Baylis Ken Booth dan John Garnet Phil Williams, *Contemporary Strategy: Theories and Policies*, Holmes & Meier Publishers Inc, New York, 1975, hal. 135

Sementara itu Robert Thomsons, seorang perwira tinggi Inggris yang menghabiskan waktunya selama dua belas tahun di Malaysia menghadapi kelompok insurjensi mendefinisikan dan menggambarkan perang revolusioner sebagai berikut:²¹

"It is a form of warfare difficult to understand for those whose attitudes have been conditioned by ideas of conciliation, compromise, and negotiation as the means of settling disputes. Revolutionary war is bitter and total and in which one side or the other must win before the struggle ends."

Masih dalam kerangka yang sama Vo Nguyen Giap memberikan batasan tentang tentang perang gerilya sebagai berikut:²²

"a form of fighting by the masses of weak and badly equipped country against an aggressive army with better equipped and techniques. This is the way of fighting a revolution. Guerrillas rely on heroic spirit to triumph over modern weapon, avoiding the enemy when he is stronger and attacking him when he is weaker, now scattering, now regrouping, now wearing out, now exterminating the enemy, they are determined to fight everywhere so that wherever the enemy goes he is submerged in a sea of armed people who hit back at him, thus undermining his spirit and exhausting his forces"

Indonesia mempunyai pengalaman yang hampir sama ketika melakukan perang kemerdekaan melawan Belanda. Ketika dalam perang kemerdekaan pertama TNI di segala front dipukul mundur oleh pasukan Belanda yang memiliki keunggulan teknologi, sehingga memaksa pimpinan tentara Indonesia untuk mengubah strategi. Strategi tersebut bermaksud menetralkan keunggulan teknologi Belanda dengan memanfaatkan wilayah dan rakyat yang bersama Tentara Indonesia melakukan perlawanan.²³ Strategi baru ini diterapkan dalam perang kemerdekaan kedua dan ternyata berhasil baik. Gerilya rakyat bersama tentara berhasil memutus garis

²¹ Robert Thompson, *Revolutionary War*, dalam Arthur F. Lykhe (ed), *Military Strategy: Theory and Application*, United State Army War College, Carlisle Barracks PA, 1989, hal. 199

²² Vo Nguyen Giap dalam John Baylis Ken Booth dan John Garnet Phil Williams, *Contemporary Strategy: Theories and Policies*, Holmes & Meier Publishers Inc, New York, 1975, hal. 139

²³ Adam Robert, *Op. Cit.*, hal. 39

komunikasi Belanda dimana-mana. Pos-pos Belanda yang tersebar diserang terus menerus sehingga memakan banyak korban dan harus ditarik. Itu semua memaksa Belanda berada dalam posisi defensif tanpa dapat mengambil inisiatif untuk kembali menekan tentara Indonesia. Setiap usaha Belanda untuk menyerang selalu dapat diketahui sebelumnya melalui intelijen yang didukung peran rakyat. Keberhasilan perang gerilya akan sangat tergantung dari keterkaitan antara rakyat dengan pelaku gerilya. Dalam doktrin pertahanan dan keamanan rakyat semesta dikenal dengan istilah perang rakyat semesta yang mencerminkan adanya dukungan rakyat sebagaimana yang dirumuskan oleh AH. Nasution, dalam rangka perang kemerdekaan menghadapi penjajah Belanda.²⁴ Dalam strategi ini tentara Indonesia hanya mau bertempur atas pilihan dan kehendak sendiri.

Pengalaman menunjukkan bahwa pertahanan di darat lebih membawa hasil positif bagi pertahanan suatu negara kalau pertahanan konvensional didukung pertahanan teritorial yang bersifat tidak konvensional. Pertahanan teritorial adalah pertahanan yang tidak terikat pada pertahanan posisi atau garis tertentu, melainkan wilayah sebagai obyek yang harus dipertahankan. Dalam pertahanan teritorial, pertempuran dilakukan apabila menguntungkan pihak pertahanan.²⁵

²⁴ Robert Cribb " From Total People's Defence to Massacre" dalam Freek Colombijn and J. Thomas Lindblad (eds), *Roots of Violence in Indonesia*, Netherland, KITLV Press, 2002, hal. 235.

²⁵ *Ibid*, hal. 48

D. Sistem Pertahanan Semesta

Sistem pertahanan Indonesia dinyatakan sebagai sistem pertahanan semesta, yaitu yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya, serta secara dini dipersiapkan oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari setiap ancaman. Intinya adalah kesemestaan pertahanan Indonesia yang melibatkan semua kekuatan nasional untuk kepentingan pertahanan Indonesia. Sistem pertahanan semesta ini bersumber dari pengalaman sejarah panjang perang kemerdekaan yang menempatkan TNI dalam posisi sentral baik dalam perlawanan melawan Belanda maupun penyelenggaraan fungsi pertahanan, terutama di daerah-daerah perjuangan bersenjata.²⁶

Jika melihat dari pengalaman sejarah, Indonesia saat ini terbentuk oleh sebuah pandangan yang berasal dari doktrin mendasar tentang keamanan dan lawan insurjensi yang berakar dari berbagai pengalaman gerakan pemberontakan di masa lampau. Tiga elemen yang mendasari cara pandang bangsa Indonesia yaitu (1) konsep tentang sebuah negara yang berintegrasi tunggal dengan pendekatan keamanan dan kesejahteraan; (2) konsep ketahanan nasional, persatuan unsur-unsurnya yang berbeda dan keinginan untuk mempertahankan diri sendiri; (3) Konsep Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta.

Doktrin Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta Indonesia dibuat untuk memberdayakan seluruh sumber daya nasional yang dimiliki agar dapat memberikan

²⁶ Edy Prasetono, *Reinterpretasi Sistem Pertahanan Nasional Indonesia*, dalam Bantarto Bandoro (ed), *Perspektif Baru Keamanan Nasional*, Jakarta, CSIS, 2005 hal 80

dukungan dalam menghadapi setiap ancaman insurjensi dari manapun. Doktrin ini berkembang dari pengalaman selama masa revolusi nasional (1945-1950) dan selanjutnya saat menghadapi pemberontakan PKI serta pemberontakan Dar'ul Islam maupun gerakan separatis lainnya. Doktrin ini melibatkan mobilisasi seluruh warga sipil dan sumber daya militer sekaligus sebagai bukti komitmen pemerintah terhadap usaha perlawanan terhadap kemungkinan insurjensi. Elemen utama yang diperlukan dalam menghadapi insurjensi diantaranya adalah: (1) Aparat intelijen yang efektif (2) Aparat teritorial yang mampu menyatukan TNI dengan rakyat (3) Aparat kepolisian yang berfungsi baik (4) Komponen Cadangan yang terlatih serta dapat digerakkan setiap saat (5) Sistem komunikasi masal yang teratur (6) Kepemimpinan dan Komunikasi Sosial dari angkatan bersenjata²⁷

Dalam memahami masalah gerakan insurjensi paling tidak ada lima faktor yang harus diperhatikan yaitu (1) tindakan pemerintah, (2) dukungan rakyat, (3) organisasi insurjensi, (4) dukungan dari luar dan (5) lingkungan.²⁸ Faktor pemerintah sangat penting dalam menangani masalah insurjensi. Insurjensi tidak akan berhasil dikalahkan jika pemerintah tidak sepenuhnya berupaya dan juga tidak siap menggunakan seluruh potensi yang dimiliki. Faktor dukungan rakyat, dukungan rakyat sipil merupakan faktor yang esensial bagi suksesnya operasi gerilya. Tanpa dukungan rakyat gerilya akan kehilangan informasi, tanpa dukungan rakyat tidak akan dapat menjaga rahasia tentang gerakan yang akan dilakukan, tanpa dukungan

²⁷ Purbo S. Suwondo, *Government and Rebellions in Southeast Asia*, dalam Chandran Jeshurun (ed) ISEAS, Singapura, 1985, hal 182

²⁸ Bard E O'Neill, *Political Violence and Insurgency: A Comparative Approach*, Phoenix Press, Colorado, 1974: hal. 11-44

rakyat tidak akan dapat menyerang musuh dan menyelesaikan misinya. Faktor Organisasi Insurjen, dukungan rakyat sangat berhubungan erat dengan faktor organisasi. Hal ini menyangkut sejauh mana cakupan organisasi, kompleksitas organisasi dan ikatan organisasi dan fungsi organisasi itu sendiri. Faktor dukungan dari luar, dalam hal ini menyangkut dukungan alat peralatan, tempat persembunyian, dan dukungan moral dan politik. Faktor Lingkungan, menyangkut keadaan daerah, iklim, jalur komunikasi dan transportasi, etnik, agama dan kebudayaan, luas negara, jumlah dan persebaran penduduk, kondisi perekonomian, sikap penduduk.

Sistem pertahanan semesta yang melibatkan segenap potensi nasional dalam pembelaan negara diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara. Hubungan unik itu adalah bahwa Pasal 27 ayat (3) yang sekarang berada di Bab X tentang Warga Negara dan Penduduk, berasal dari Pasal 30 ayat (1) Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara. Hubungan ini membawa konsekuensi dan implementasi yang sangat besar mengingat kesadaran bela negara sebagai representasi dasar kesadaran tentang pertahanan negara sudah tidak dalam kerangka pertahanan negara, tetapi dalam kerangka hak dan kewajiban negara. Masalah pertahanan negara adalah masalah seluruh warga negara, sebab masalah pertahanan negara berkait erat dengan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Seluruh warga negara bertanggungjawab terhadap kelangsungan hidup bangsa dan negaranya.

Dalam sistem pertahanan yang bersifat semesta yang merupakan tataran dasar strategi pertahanan negara, kesadaran bela negara setiap warga negara merupakan

unsur dasar terbentuknya upaya pertahanan negara. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan negara, keutuhan wilayah sebuah negara dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Hakekat pertahanan negara adalah upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Pertahanan negara dilakukan oleh Pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan negara.²⁹ Dalam sistem pertahanan negara, komponen yang dilibatkan adalah komponen utama (TNI), komponen cadangan (Ratih dan masyarakat yang telah dipersiapkan), serta komponen pendukung.

Menurut Burhan D Magenda, doktrin Hankamrata yang berasal dari pengalaman revolusi kemerdekaan masih dianggap cocok walaupun telah terjadi perkembangan teknologi yang pesat. Seperti ternyata dalam perang Vietnam, perang Irak maupun Afganistan sekarang, penguasaan wilayah merupakan kunci kemenangan akhir peperangan. Memang pertempuran bisa cepat dimenangkan dengan keunggulan teknologi, khususnya "air power" tetapi penguasaan teritorial harus cepat mengikuti keunggulan teknologi.³⁰ Strategi pertahanan harus disesuaikan dengan perkembangan jaman. Pada tingkat lokal penguasaan teritorial penting sekali terutama diserahkan

²⁹ <http://id.wikipedia.org/wiki/def:ancaman>

³⁰ Burhan D Magenda, *Strategi dan Potensi Pertahanan Indonesia*, Pokok-pokok pikiran di depan Forum Komando Resimen Mahasiswa Nasional, 2 September 2007

pada matra darat, disinilah peran dan fungsi teritorial menjadi penting dan tidak bisa dihapuskan.

Sejalan dengan Sistem Pertahanan Semesta yang melibatkan semua komponen bangsa, maka konsep pertahanan nirmiliter yang diwacanakan oleh Menteri Pertahanan, Yuwono Sudarsono melalui Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Departemen Pertahanan merancang satu bentuk program forum kesadaran kebangsaan dan bela negara yang akan ditujukan terutama bagi kalangan anak muda. Sebagai langkah awal, Departemen Pertahanan (Dephan) membangun kerja sama dengan sejumlah instansi terkait, seperti pemerintah daerah, mulai dari provinsi sampai kelurahan. Selain itu, juga melibatkan pihak TNI dengan komando teritorialnya, kalangan akademisi, departemen terkait lain, seperti Departemen Pendidikan Nasional, dan masyarakat adat setempat. Pertahanan nirmiliter mencerminkan adanya "kesisteman" antara pertahanan negara dan keamanan negara, mengandung adanya semangat kerja sama TNI dan POLRI dalam departemen dengan otoritas sipil yang berbeda. Membina kerja sama, baik antara fungsi TNI dan fungsi POLRI di lapangan; diharapkan "merapikan" dan "menyelaraskan" pasal-pasal yang ada dalam UU tentang POLRI, UU tentang Hanneg serta UU tentang TNI.³¹

Pengalaman kerjasama antara militer dan sipil pernah dilaksanakan HJM Noordhuizen ketika melaksanakan tugas sebagai Ketua G-5/Urusan sipil pada Ace Rapid Reaction Corp Implementasion Force (ARRC-IFOR) di Sarajevo, Boznia dan

³¹ *Pertahanan dan Keamanan Negara*, Kompas, 23 Oktober 2004

Herzegovina tahun 1996.³² Ada dua pertimbangan penting tentang perlunya kerjasama sipil-militer untuk keberhasilan suatu misi. Pertama, misi tersebut bisa terancam atau berhenti oleh aktivitas mereka yang terlibat permusuhan atau karena ketidakmauan mereka untuk bekerja sama. Kedua, misi tersebut akan mendapat pengaruh positif dengan memberikan dukungan moral dan politis kepada penguasa lokal melalui pemberian bantuan sumber daya yang sesuai dengan kondisi wilayah. Kedua pertimbangan ini yang akan menentukan perannya sebagai penasehat dan sekaligus penghubung antara berbagai bentuk organisasi masyarakat internasional dan perwakilan organisasi. Peran inilah yang akan memungkinkan, memudahkan dan meningkatkan perwujudan misi organisasi.

E. Konsep Ketahanan Nasional

Ketahanan wilayah tidak dapat dilepaskan dari konsep Ketahanan Nasional, karena bagaimanapun juga Ketahanan Wilayah yang ditumbuhkembangkan dengan baik akan memberi sumbangan bagi terbentuknya Ketahanan Nasional yang tangguh dalam menghadapi setiap ancaman, baik yang datang dari dalam maupun luar negeri.

Menurut Armawi³³ bahwa untuk mewujudkan ketahanan nasional diperlukan sistem penangkalan berlapis. Sistem ini berupa lingkaran-lingkaran yang berpusat pada ketahanan pribadi tiap individu warga masyarakat, berlanjut dengan ketahanan wilayah dan ketahanan nasional.

³² HJM Noordhuizen, *Civil-Military Cooperation* dalam Purbo. S Suwondo, *Sejarah Perang Dunia*, Bandung Seskoad, hal. 154-171

³³ Armaid Armawi, *Ketahanan Nasional dan Pengembangannya*, dalam jurnal Panca Arga Edisi 2 Tahun I Nopember 2000, hal. 22.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa ketahanan nasional sesungguhnya dibentuk atau disusun dari ketahanan daerah, atau dengan lain perkataan bahwa ketahanan daerah atau wilayah merupakan bagian integral dari ketahanan nasional secara keseluruhan. Artinya ketahanan wilayah menjadi prasyarat ketahanan nasional. Pemahaman ini mencerminkan bahwa ketahanan wilayah yang mantap akan menjadi syarat terwujudnya ketahanan nasional yang tangguh. Sebaliknya terganggunya salah satu ketahanan wilayah akan mengganggu ketahanan nasional secara keseluruhan.

Secara ontologi ketahanan nasional merupakan kondisi dinamik suatu tata kehidupan nasional yang amat menentukan kemampuan masyarakat di dalam menangkal atau menghadapi berbagai ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan. Selanjutnya untuk mengetahui peran dan kedudukan serta aksiologi maka perlu ditelusuri dalam tatanan konsepsi nasional.³⁴

Ideologi Pancasila, merupakan landasan bagi pencapaian cita-cita nasional "never ending goal" yang dalam upaya mewujudkannya ditempuh secara holistik, artinya tiap-tiap sila tidak diwujudkan secara terpisah melainkan di dalam keutuhan menyeluruh. Cita-cita nasional ini diwujudkan dalam realitas tata kehidupan nasional maupun realitas konfigurasi geografis. Untuk itu diperlukan prasarat yang dapat melapangkan jalan bagi upaya pencapaian cita-cita nasional dalam bentuk konsepsi tentang kesatuan yang diberi nama Wawasan Nusantara.

Wawasan Nusantara mengamanatkan atau mempersyaratkan perwujudan dari kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial budaya dan kesatuan Hankam.

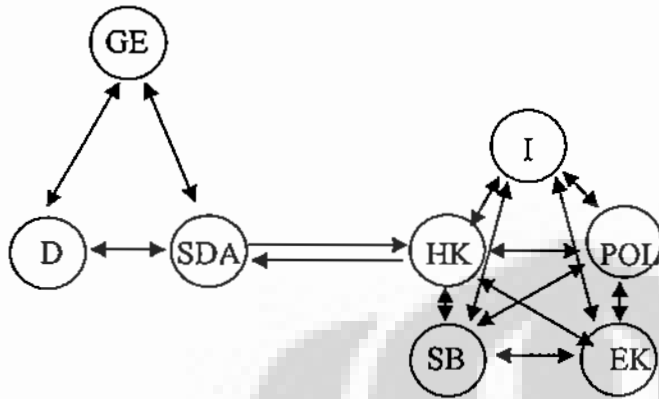
³⁴ Sunardi RM, *Opcit*, hal 17-19.

Secara implisit amanat kesatuan politik telah mengandung kesadaran akan ruang karena setiap ancaman terhadap salah satu pulau atau setiap jengkal daratan akan ditafsirkan sebagai ancaman terhadap seluruh kesatuan negara. Justru karena adanya kesadaran ruang tersebut maka Wawasan Nusantara dapat diartikan sebagai geopolitik Indonesia, yang pencapaiannya dituangkan dalam bentuk geostrategi Indonesia yaitu ketahanan nasional.

Ketahanan nasional adalah suatu model dari kondisi tata kehidupan suatu negara pada saat tertentu dan bersifat dinamik. Semua aspek dalam tata kehidupan dipetakan dengan cara many to one menjadi beberapa gatra agar memudahkan pengamatan maupun pemahaman interaksinya. Seperti pada model Brezinski terdapat empat gatra, pada Cline terdapat 5 gatra, pada model Lemhanas RI terdapat delapan gatra dan pada model Morgenthau terdapat delapan gatra yang berlainan dengan model Lemhannas RI. Keseluruhan gatra harus dilihat sebagai satu keutuhan yang bulat atau gestalt yang mencerminkan kondisi dinamika tata kehidupan nasional. Mereka dapat dipisahkan secara teori analitik, namun tidak dapat dipisahkan satu dari yang lainnya, apalagi kaitan satu dengan lainnya.

Konsepsi ketahanan nasional menurut Lemhannas RI, merupakan segala aspek kehidupan nasional yang meliputi delapan aspek (asta gatra) yang terdiri dari tiga gatra alamiah (trigatra) yakni geografi, sumber daya alam dan sumber daya manusia. Lima aspek yang lain (panca gatra) adalah ideologi, politik, ekonomi, sosial

budaya dan pertahanan keamanan. Hubungan antar gatra itu dapat digambarkan sebagai berikut:³⁵



Keterangan :

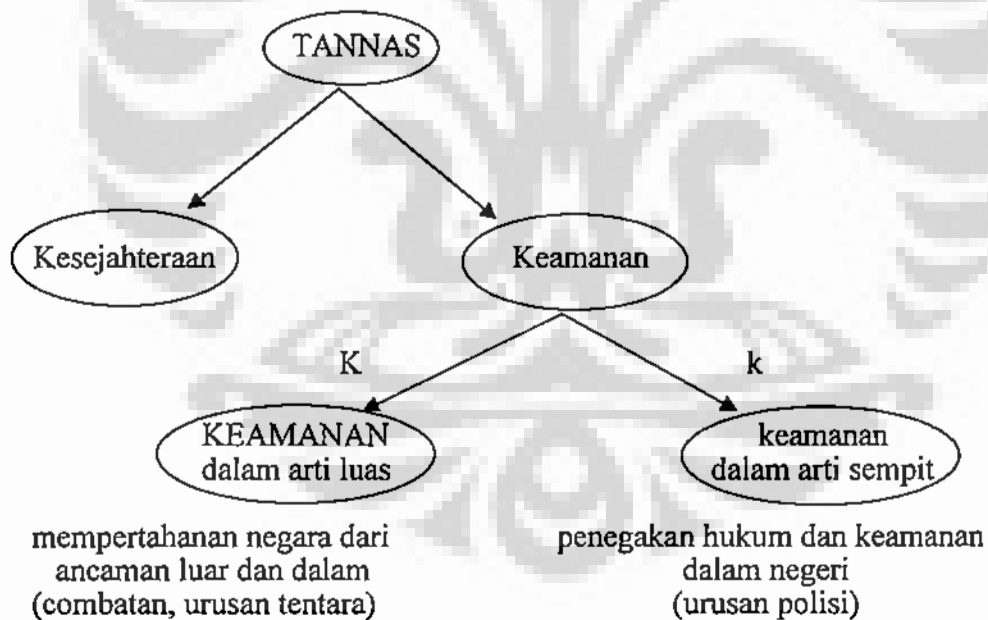
- GE : Geografi
- D : Demografi
- SDA : Sumber Daya Alam
- I : Ideologi
- HK : Pertahanan Keamanan
- POL : Politik
- SB : Sosial Budaya
- EK : Ekonomi

Pada hakekatnya ketahanan nasional tergantung pada kemampuan bangsa dan negara dalam memanfaatkan trigatra sebagai modal dasar untuk meningkatkan kondisi panca gatra. Trigatra merupakan sumber daya yang relatif statis sedangkan pancagatra bersifat dinamik. Trigatra dan pancagatra merupakan satu kesatuan yang bulat (holistik) yang kemudian dinamakan astagatra. Kelemahan salah satu gatra akan dapat mengakibatkan kelemahan pada gatra yang lainnya sehingga mempengaruhi

³⁵ Wan Usman, *Daya Tahan Bangsa*, Program Studi Pengkajian Ketahanan Nasional Program Pasca Sarjana UI, Jakarta, 2003, hal. 175

kondisi keseluruhan. Ketahanan nasional ini merupakan resultante (hasil) dari ketahanan masing-masing aspek kehidupan yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Dari konsepsi dasar ini jelaslah bahwa ketahanan nasional itu meliputi masa damai dan darurat (perang).

Menurut Wan Usman³⁶ bahwa ketahanan nasional dapat dipandang sebagai satu mata uang dengan dua sisi yakni keamanan (security) dan kesejahteraan (prosperity). Keduanya harus berjalan seimbang, dimana kesejahteraan dan keamanan mengandung muatan utama yaitu partisipasi masyarakat yang harmonis. Hal ini dapat diilustrasikan sebagai berikut:



³⁶ *Ibid*, hal. 93

Yang dimaksud dengan keamanan (security) disini adalah asset negara (to protect the asset). Negara, komunitas, individu adalah aset bangsa, yang harus dilindungi. Keamanan dalam arti luas (disimbolkan "K") bertugas untuk mempertahankan negara dari ancaman dari luar dan dalam negeri, wilayah ini menjadi tanggung jawab tentara. Sedangkan keamanan dalam arti sempit (disimbolkan "k") adalah penegakan hukum dan keamanan dalam negeri yang menjadi wilayah tanggung jawab kepolisian.³⁷ Keamanan dan kesejahteraan merupakan dua hal yang saling mendukung, dimana keamanan merupakan prasarat demi terwujudnya kesejahteraan yang dicapai melalui aktivitas pembangunan nasional suatu negara.

³⁷ Wan Usman, *Makalah Seminar Kajian Intelijen Strategis*, Universitas Indonesia 9 Maret 2006.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Disebut penelitian kualitatif karena tidak bekerja dengan data dalam bentuk atau yang ditransformasikan menjadi bilangan atau angka, tidak diolah dengan rumus dan tidak ditafsirkan/diinterpretasikan sesuai ketentuan statistik/matematik.¹ Seluruh rangkaian cara kerja atau proses penelitian kualitatif berlangsung serempak dilakukan dalam bentuk pengumpulan, pengolahan dan menginterpretasikan sejumlah data yang bersifat kualitatif. Data atau informasi tersebut dapat berbentuk gejala yang sedang berlangsung, reproduksi ingatan, pendapat yang bersifat teoritis atau praktis dan lain-lain.² Yang mana pada akhirnya bertujuan untuk menemukan kebenaran berupa generalisasi yang dapat diterima akal sehat (common sense) manusia terutama peneliti sendiri. Generalisasi tersebut terbatas dalam konteksnya dengan masalah dan lingkungan sumber datanya, karena penelitian ini tidak mempermasalahkan sampel dan populasi.

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif analitik. Metode deskriptif akan digunakan dalam menggambarkan berbagai bentuk kegiatan pembinaan teritorial yang dilaksanakan di jajaran TNI AD. Sedangkan

¹ H. Hadari Nawawi dan H. Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta, Gajahmada University Press, 1993, hal 175

² *Ibid*, hal. 176.

Metode Analitik akan digunakan untuk membahas tentang berbagai kegiatan pembinaan teritorial tersebut dilihat dari aspek ketahanan nasional.

Selanjutnya hasil penelitian akan ditindaklanjuti dengan indepth interview yang dilakukan langsung oleh peneliti terhadap pihak-pihak yang mengetahui tentang apa dan bagaimana pembinaan teritorial.

B. Tempat dan Waktu Penelitian.

- a. Tempat Penelitian. Penelitian mengambil tempat di Jakarta.
- b. Waktu Penelitian. Waktu penelitian berlangsung selama 4 bulan yaitu terhitung mulai bulan Oktober 2007 - Januari 2008.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut.

1. Teknik Studi Dokumenter

Teknik ini adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan katagorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tulisan yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen maupun buku-buku, koran, majalah, internet dan sebagainya. Berkaitan dengan penelitian maka dokumen yang digunakan adalah berbagai tulisan kegiatan pembinaan teritorial yang dimuat dalam Buletin Interaksi Teritorial, Majalah Yudhagama dan Majalah Palagan.

2. Teknik Komunikasi Langsung. Teknik ini adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara kontak langsung secara lisan atau tatap muka dengan sumber data, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi yang sengaja dibuat untuk itu. Teknik ini biasa disebut sebagai interview. Pelaksanaannya berupa wawancara mendalam (Indept Interview). Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan berbagai sumber yang mengetahui tentang pembinaan teritorial diantaranya Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu, Mayor (Purn) Alwin Nurdin, Kolonel Inf Sumardi serta dari kalangan sipil yang selama ini mencermati kehidupan militer dan pernah melakukan penelitian serupa diantaranya Sri Nuryanti (LIPI) M. Nurhasim (Peneliti Ridep Institut), dan juga Amirudin Rajab dari LSM Elsam.

D. Metode Analisis.

Analisa yang dilakukan adalah dengan menganalisa dokumen atau catatan yang menyangkut kegiatan pembinaan teritorial yang dilaksanakan di jajaran TNI AD. Proses ini dilakukan dengan jalan melalui pemilahan terhadap data yang terkumpul dan setelah langkah ini selesai baru dilaksanakan analisa, yang dalam hal ini adalah dihadapkan dengan ketahanan nasional.

BAB IV
PEMBINAAN TERITORIAL TNI ANGKATAN DARAT
DAN KETAHANAN NASIONAL

A. Lahirnya Konsep Teritorial¹

Keberadaan konsep teritorial TNI tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor seperti sejarah kelahiran TNI itu sendiri, nilai-nilai yang membentuk tentara tersebut serta berbagai doktrin yang pernah dianutnya, khususnya Sistem Pertahanan Rakyat Semesta atau Sishanrata yang baru muncul menjadi doktrin sesudah organisasi TNI yang lebih baik terbentuk.

Pembinaan teritorial TNI secara mudah dapat disebut sebagai upaya terbentuk dan berkembangnya berbagai komponen di dalam masyarakat yang terwujud dalam suatu persatuan yang solid dalam rangka mempertahankan kedaulatan negara dan bangsa (Saurip Kadi, 2000). Ketika bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, negara Indonesia belum mempunyai sebuah organisasi ketentaraan yang paling sederhana sekalipun. Jadi sewaktu tanggal 20 Agustus 1945 pemerintah membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR), itu bukanlah sebuah organisasi angkatan perang melainkan hanya sebuah badan yang tujuan utamanya memberikan perlindungan atau rasa aman kepada masyarakat. Pemerintah cepat menyadari adanya keganjilan bahwa sebuah negara ternyata tidak mempunyai angkatan perang, dan pada tanggal 5 Oktober 1945, dengan Dekrit Presiden RI didirikanlah Tentara Keamanan Rakyat (TKR) sebagai pengganti BKR. TKR

¹ M. Riefqi Muna (ed), *Likuidasi Komando Teritorial dan Pertahanan Nasional*, Ridep Institut, Jakarta, 2002, hal 17-29

kemudian menjadi Tentara Rakyat Indonesia (TRI) sebelum akhirnya berubah menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) hingga sekarang.

Walaupun organisasi TKR kemudian diikuti dengan kelengkapan organisasinya, antara lain membagi pasukan bersenjata dalam bentuk satuan-satuan setingkat divisi dan ke bawah, tetapi pengertian “divisi” dan bahkan “batalyon” tidak bisa dibayangkan mempunyai kelengkapan personel dan persenjataan seperti tentara modern. Jadi doktrin ketentaraan, apalagi pengertian mengenai teritorial, belum sempat dipikirkan oleh TKR. Yang terpenting motivasi diantara para anggota TKR terbentuk dari bawah, dari level prajurit yang paling rendah menyambung pula sampai di atasnya, yaitu dari para perwira yang banyak diantaranya adalah hasil didikan Jepang serta bersambung dengan keinginan rakyat untuk mempertahankan Republik Indonesia secara bersama-sama (Salim Said, 1972).

Dalam perkembangannya secara tidak sadar TNI langsung mempraktekkan fungsi teritorial sewaktu ditugaskan untuk menumpas PKI Madiun tahun 1948. Pasukan dari Divisi Siliwangi yang ditugaskan untuk melakukan ekspedisi militer tersebut tidak saja menumpas kekuatan militer dari sayap bersenjata PKI di sekitar kota Madiun, tetapi juga melakukan hal-hal yang biasanya dilakukan oleh aparat pemerintahan sipil. Pasukan Siliwangi juga sekaligus memutar kembali roda perekonomian, menghidupkan kembali pemerintahan desa yang lumpuh sembari memupuk simpati sebagian rakyat yang sempat terpengaruhi oleh ideologi yang dihembuskan oleh PKI. Operasi pasukan Siliwangi di Madiun yang dari segi militer

murni merupakan sukses besar, tetapi juga merupakan pengalaman pertama bagi sebuah organisasi militer profesional untuk mempraktekkan fungsi teritorial.

Dalam pendapat yang lain dinyatakan bahwa kemampuan teritorial yang terstruktur baru ada setelah Markas Besar Komando Djawa (MBKD) terbentuk pada bulan Oktober 1948 yang dipimpin oleh Kolonel AH Nasution, seorang perwira lulusan Akademi Militer jaman Belanda di Bandung yang dibantu beberapa perwira muda lainnya, seperti TB Simatupang, langsung menyusun rencana pembentukan komando-komando yang langsung bertanggung jawab atas wilayah tertentu di Pulau Jawa. Jadi sewaktu Belanda pada tanggal 19 Desember 1948 melancarkan aksi militernya langsung ke Yogyakarta dan berhasil menawan Presiden Soekarno, wakil presiden Mochamad Hatta dan hampir seluruh anggota kabinetnya, tentara tidak terlalu terkejut. Hanya beberapa hari kemudian AH Nasution mengeluarkan perintah untuk pendirian pemerintahan militer di Jawa. Organisasi tersebut di bawah MBKD mempunyai empat divisi yang membagi habis Jawa. Para Panglima Divisi juga sekaligus Gubernur Militer. Di bawah setiap divisi terdapat komandan-komandan yang setara dengan kepala pemerintahan sipil yang ada, mulai dari residen, bupati, camat dan lurah. Gubernur militer juga membawahi seorang perwira senior yang menguasai wilayah operasi tertentu yaitu yang disebut sebagai komandan wehrkreise.

Dalam kenyataan di lapangan, TNI jarang sekali dapat dibedakan dengan rakyat kebanyakan yang tinggal di desa-desa. Mereka sedikit sekali yang berseragam, dengan demikian mereka melebur dan menyatu dengan masyarakat, dan yang membedakan mereka hanya karena mereka bersenjata (senjata api atau senjata tajam)

dan digerakkan oleh sebuah garis komando yang jelas. Menurut TB Simatupang, administrasi militer seperti itulah yang pertama-tama dimaksudkan sebagai alat perlawanan untuk mengerahkan serta mengorganisir semua angkatan perang, dan alat untuk menggunakan segala sumber daya setempat (rakyat) dalam perlawanan terhadap rakyat.

Sejarah menunjukkan bahwa Belanda pada akhirnya kewalahan menghadapi perlawanan dalam bentuk demikian. Tentaranya yang modern dan bersenjata lengkap serta digerakkan menurut teori-teori militer konvensional ternyata tidak mampu menghancurkan sebuah organisasi tentara yang jauh lebih sederhana persenjataannya, lebih tidak terlatih sebagai tentara profesional tetapi lebih termotivasi dibandingkan tentara lawan. Belanda hanya mampu menguasai kota-kota besar dan jalan-jalan yang menghubungkan kota-kota penting, tetapi mereka tidak mampu mematahkan perlawanan dari TNI yang didukung oleh rakyat.

1. Teritorial Versi AH Nasution.

Ketika Belanda harus menyerahkan kedaulatan kepada RI pada akhir Desember 1949, “resep” berupa perlawanan total bersama rakyat serta penguasaan teritori yang prima masih menjadi andalan AH. Nasution ketika menjabat sebagai Kepala Staf TNI AD. Nasution sadar sebagai pimpinan dari sebuah negara yang masih sangat muda serta miskin uang, adalah merupakan hal yang utopis jika merencanakan membangun angkatan perang yang menandalkan diri pada kekuatan laut dan udara. Secara geografis, negara kepulauan sebesar dan seluas Indonesia idealnya memang harus mempunyai

angkatan laut serta angkatan udara yang kuat. Tetapi membangun angkatan perang yang mempunyai angkatan laut dan angkatan udara yang kuat hampir-hampir mustahil bagi Indonesia, dan satu-satunya alternatif adalah mengandalkan pertahanan kepulauan Indonesia pada pasukan darat yang relatif lebih murah pembiayaannya dan didukung oleh masyarakat.

Langkah pertama yang dilakukan AH Nasution adalah dengan membentuk komando-komando teritorial yang mirip dengan Perintah Siasat No.1 yang dikeluarkan menjelang penyerangan Belanda tahun 1948.² Bedanya komando teritorial ini sudah melingkupi seluruh wilayah Indonesia. Komando-komando tersebut disebut sebagai Tentara dan Teitorium (TT). Wilayah Nusantara dibagi habis menjadi 7 TT dan di bawah setiap TT terdapat komando-komando resor militer (Korem) dan komando distrik militer (Kodim). Di Sumatera terdapat dua TT (Sumatera bagian utara dan bagian selatan), Pulau Jawa terbagi habis menjadi tiga TT (Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur), Kalimantan seluruhnya di bawah satu TT dan Sulawesi, Sunda Kecil (sekarang Nusat Tenggara Barat dan Timur) serta Maluku dibawah satu TT yang komandonya berpusat di kota Makasar.

² Perintah Siasat No.1/STOP/48/5/48 adalah perintah dari Panglima Besar Jenderal Soedirman kepada para Panglima Komando daerah dalam menghadapi kemungkinan kembalinya penjajah Belanda yang isinya adalah (1) Tidak akan melakukan pertahanan yang linier, (2) Tugas memperlambat kemajuan serbuan musuh serta pengungsian total (semua pegawai dan sebagainya) serta bumi hangus total, (3) Tugas membentuk kantong-kantong di tiap onderdistrik militer yang mempunyai pemerintahan gerilya (disebut *wehrkreise*) yang totaliter yang mempunyai pusat di beberapa kompleks pegunungan, (4) Tugas pasukan-pasukan yang dari "daerah federal" untuk "berwingate" (menyusup kembali ke daerah asalnya) dan membentuk kantong-kantong, sehingga seluruh pulau Jawa akan menjadi suatu medan perang gerilya yang besar. (Tjokropranolo, *Panglima Besar Jenderal Soedirman, Pemimpin Pendobrak Terakhir Penjajahan di Indonesia*, PT Surya Persindo, Jakarta, 1992, hal. 127)

Setiap TT mempersiapkan diri untuk melakukan perlawanan berbentuk perang gerilya bila ada ancaman datang dari luar. Setiap Panglima TT akan memimpin sejumlah pasukan dalam bentuk resimen, brigade dan batalyon teritorial yang disebar pada tempat-tempat yang strategis. Pasukan inilah yang akan menjadi ujung tombak perlawanan terhadap musuh di wilayah tanggung jawabnya masing-masing, karena sulit diharapkan adanya satuan tingkat pusat yang dapat membantu, mengingat keterbatasan jumlah pasukan yang tersedia. Dengan strategi itu Nasution berharap bahwa jumlah anggota tentara dapat dipertahankan pada angka antara 150.000 – 200.000 orang personel saja yang kira-kira masih dapat dibiayai dengan anggaran mereka.

Meskipun antara 1957-1958 T&T diubah namanya menjadi Komando Daerah Militer (Kodam, dan dipertahankan hingga sekarang), tetapi fungsinya tetap komando-komando dengan kewenangan pembinaan teritorial yang luas. Pergantian nama dan penambahan jumlah kodam, sebagian disebabkan karena Nasution ingin meniadakan unsur-unsur perlawanan dari sejumlah perwira di daerah dengan memperkecil wilayah mereka juga untuk memberi tempat pada sejumlah perwira pada posisi teritorial. Di Sumatera dari jumlah dua TT kemudian menjadi empat kodam dengan tambahan sebuah di Aceh dan Sumatera Barat. Sementara Jakarta dilepas dari wilayah TT III dan menjadi Kodam dan eks-Sunda Kecil diberikan kodam tersendiri. Demikian pula di Maluku dan Irian Barat masing-masing dikendalikan oleh satu kodam.

Yang paling penting dicatat, Nasution pada pertengahan tahun 1958 membentuk Komite Doktrin Militer yang dipimpin oleh kolonel CAJ Mokoginta dan wakilnya Letkolnya Suwanto. Dalam kajiannya, komite tersebut berkesimpulan bahwa tentara tidak mungkin memenangkan suatu peperangan modern tanpa dukungan dari rakyat. Hal ini yang menjadi dasar dari dipakainya Doktrin Perang Teritorial pada tahun 1960 yang kemudian tidak saja menjadi doktrin TNI AD tetapi juga menjadi doktrin peperangan yang diakuinya menjadi doktrin peperangan semesta berkat usaha meyakinkan semua pihak bahwa ini adalah satu-satunya cara Indonesia untuk mempertahankan diri dari ancaman luar negeri.

Sebagai pengembangan dari doktrin Perang Teritorial pada tahun 1962, Kolonel Suwanto di Sekolah Staf Komando Angkatan Darat (Seskoad) menghasilkan Doktrin Perang Wilayah, yang sebetulnya masih satu pola dengan pemikiran Nasution pada tahun 1948 terdahulu. Tetapi harus diakui bahwa TNI tidak semata-mata memikirkan bagaimana menghadapi musuh dari luar, melainkan juga mempertimbangkan situasi politik di dalam negeri. Pemilu 1955, berbagai pemberontakan di dalam negeri dan sikap Presiden Soekarno yang semakin mengambil jarak dengan TNI, menyebabkan pihak TNI bertindak lebih cepat.³ Sejalan dengan pengembangan doktrin-doktrin tersebut, aparat teritorial disempurnakan lagi dan disesuaikan dengan organisasi pemerintahan sipil terbaru. Jadi dibawah Korem dan Kodim

³ Admadji Sumarkidjo, *Komando Teritorial TNI : Latar Belakang Sejarah*, dalam *Likuidasi Komando Teritorial*, M. Rifqi Muna (Ed), The Ridep Institute, Jakarta, 2002, hal. 24.

dibentuk Koramil yang berada di tingkat kecamatan. Sementara aparat militer terbawah adalah Bintara Pembina Desa (Babinsa). Bintara ini yang berada pada tingkat kelurahan memang tidak mempunyai aparat, dia bekerja sendiri ditengah rakyat dengan tugas utamanya justru melakukan pembinaan masyarakat secara terus menerus dan melaporkan setiap perkembangan ke Koramil sebagai organisasi teritorial yang paling bawah.

Organisasi teritorial yang diciptakan Nasution dan disempurnakan oleh Kasad berikutnya terbukti sangat efektif dalam menghadapi kondisi ancaman fisik, maupun menghadapi PKI tahun 1965, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur dimungkinkan karena adanya aparat teritorial yang kokoh sampai tingkat desa, meskipun di Jawa Tengah, TNI AD juga sedikit mengalami kelumpuhan karena sejumlah aparat teritorialnya mampu dipengaruhi atau setidaknya tidaknya bersimpati pada gerakan PKI.

2. Teritorial Era Orde baru.

Organisasi teritorial di era orde baru justru makin kuat peran dan pengaruhnya sejalan dengan berperannya militer dihampir semua bidang kehidupan. Seminar Angkatan darat tahun 1966 di Seskoad dan kemudian juga Seminar Pertahanan dan Keamanan pada Nopember 1966 jelas-jelas mendorong diperkuatnya peran dari tentara di semua sektor.⁴ Dari seminar pertahanan dilahirkanlah doktrin perjuangan ABRI yang disebut Catur

⁴ *Ibid.* hal. 25.

Dharma Eka Karma (CADEK). Seperti juga ketika MPRS tahun 1960 mengadopsi Perang Semesta sebagai hal yang diterima oleh seluruh bangsa, maka pada tahun 1966, Sidang Istimewa MPRS juga menerima Dwifungsi ABRI, yaitu fungsi pertahanan dan fungsi sosial politik.

Dalam CADEK dikatakan hakekat sosial politik (Sospol) ABRI adalah jiwa, tekad dan semangat pengabdian ABRI sebagai kekuatan Sospol untuk secara aktif berperan serta bersama-sama dengan segenap kekuatan sosial lainnya, memikul tugas dan tanggung jawab perjuangan bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan dan kedaulatannya. Hal ini kemudian membawa pada kenyataan bahwa ABRI kemudian terjun ke bidang politik baik secara vertikal maupun horizontal. Semua rumusan mengenai “ABRI berdiri di atas semua golongan” atau “ABRI pembela rakyat” dalam prakteknya menjadi “ABRI berdiri bersama Golongan Karya” atau lebih diperparah lagi di level pelaksana, apa yang disebut sebagai rakyat adalah mereka yang memilih Golkar dalam pemilihan umum.⁵

Pada masa itu jelaslah pengertian teritorial menjadi menyeleweng jauh dari pengertian yang asli. Organisasi ABRI juga disesuaikan dengan peran baru mereka. Di bawah Menhankam umpamanya selain ada Kepala Staf Umum, juga ada Kepala Staf yang mengurus masalah-masalah Sospol, namanya sering berganti namun tugasnya tetap tidak berubah. Kemudian juga ada Badan Pembinaan Kekaryaan (Babinkar) yang pada hakekatnya

⁵ *Ibid*, hal 25.

mengontrol seluruh anggota tentara yang bertugas diluar bidang kemiliteran, baik yang masih aktif maupun yang non aktif.

Struktur serta unsur-unsur teritorial di tingkat Kodam serta aparat di bawahnya yang tertata rapi hingga level pedesaan tentu saja merupakan sarana yang paling tepat untuk melaksanakan semua beban tugas sospol tersebut, mulai dari seleksi calon bupati sampai lurah sampai penempatan anggota ABRI di posisi-posisi pemerintahan daerah. Sementara itu Babinsa dan Koramil secara menyolok mendorong masyarakat agar dalam setiap pemilihan umum memilih Golkar. Bila rayuan halus tidak berhasil sering digunakan ancaman dan kekuatan.⁶

Sebetulnya pada tahun 1974-1975 diterbitkan sebuah pegangan menyangkut teritorial yang dinamakan Buku Petunjuk Lapangan Kodim. Pada era kepemimpinan Jenderal M. Yusuf yang seringkali dikatakan sebagai masa dimana ABRI dicintai rakyat pada masa orde baru, ada petunjuk baru yang menyebutkan kemanunggalan ABRI-Rakyat adalah yang menjiwai pelaksanaan pembinaan teritorial. Implementasi kemanunggalan ABRI-Rakyat adalah dengan dilancarkannya program ABRI Masuk Desa (AMD), sebetulnya adalah pengembangan dari program serupa yang dilancarkan oleh AH. Nasution pada awal tahun 1960-an yang dikenal dengan civic mission. Bagi pihak militer AMD merupakan kesempatan untuk kembali merangkul

⁶ *Ibid*, hal. 26

rakyat dalam posisi kemitraan yang sejajar.⁷ Bila dikatakan bahwa dampak positif dari AMD kehilangan gaungnya, maka tidaklah salah karena kemudian peran sospol dari ABRI lebih keras gemanya. Masyarakat melihat dengan jelas bahwa jatah untuk posisi bupati atau walikota dan lebih-lebih gubernur adalah “jatah” untuk perwira TNI. Aparat teritorial juga mengurus hal-hal yang jauh dari pengertian teritorial, mulai dari perselisihan antar warga sampai dengan pemberian izin keramaian di suatu tempat.

3. Teritorial di Era Reformasi⁸

Jatuhnya Orde Baru pada 21 Mei 1998 juga membuat berbagai kritik terhadap TNI muncul ke permukaan. “Dosa” terbesar tentara secara terbuka diungkapkan melalui media massa atau ditunjukkan dengan berbagai unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa, terutama masalah ketidakmampuan TNI berdiri di atas semua golongan karena doktrin dwi fungsinya.

Sejak saat itulah kemudian muncul semangat baru untuk meninjau kembali masalah komando teritorial. Dibawah tajuk Redefinisi, Reposisi dan Reaktualisasi TNI dengan dimotori oleh perwira angkatan 1970-an, dibuatlah konsep yang mencoba menempatkan kembali kedudukan tentara pada posisi dan tempat yang lebih tepat. Hasil dari berbagai pertemuan dan diskusi besar yang diselenggarakan di Sesko TNI di Bandung menghasilkan 14 butir reformasi internal TNI, yang mana diantaranya dalam butir keempat

⁷ *Ibid*, hal. 26

⁸ *Ibid*, hal. 27

dinyatakan bahwa Dewan Sosial Politik Pusat dan Daerah dihapuskan, butir kelima Staf Sosial Politik menjadi staf teritorial dan pada butir ketujuh disebutkan bahwa Staf Sospol sampai tingkat Kodim dihapuskan.

Dengan dihapuskannya semua jaringan serta aparat yang mengurus masalah-masalah sospol seperti kekaryaan serta keterlibatan tentara dalam politik maka diharapkan bahwa fungsi sosial politik “dimurnikan kembali” atau paling tidak mendekati konsep yang diinginkan pada awal tahun 1950-an, sehingga kemudian lahir konsep bahwa aparat teritorial harus mampu melakukan pendekatan secara tidak langsung kepada masyarakat secara terus menerus sehingga masyarakat tergugah, terpengaruh dan terdorong untuk mempunyai jiwa mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara bila berada dalam situasi terancam.

B. Pentingnya Keberadaan Komando Teritorial

Seiring dengan bergulirnya reformasi, keberadaan komando teritorial sempat dipermasalahkan oleh sebagian kalangan. Gugatan yang ditujukan kepada TNI dan lembaga teritorialnya tersebut cenderung bernada menghujat dan lebih ekstrim lagi adalah tuntutan penghapusan komando teritorial dari struktur pertahanan aspek darat. Padahal pembinaan teritorial oleh TNI AD bisa berjalan kalau ada lembaga yang menjalankan, dalam hal ini adalah komando teritorial. Jadi kalau komando teritorial tidak ada maka pembinaan teritorial juga tidak bisa dilaksanakan. Oleh sebab itu kondisi ini kemudian menggugah serta mendorong TNI khususnya TNI AD untuk melakukan suatu kajian yang berisi gambaran tentang pentingnya komando teritorial

dalam rangka mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar timbul pemahaman secara cermat mengenai pentingnya komando teritorial dalam struktur pertahanan matra darat dalam rangka menjaga dan mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara. Berikut adalah uraian tentang pentingnya keberadaan komando teritorial yang dilihat dari beberapa aspek diantaranya:⁹

1. Pendekatan dari Aspek Akademis.

Pembinaan teritorial pada dasarnya adalah merupakan upaya pembinaan yang bercirikan kewilayahan, kerakyatan dan kesemestaan, sehingga konotasi penjabaran semesta tersebut adalah seluruh potensi nasional yang dapat didayagunakan dalam sistem pertahanan negara, oleh karena itu aspek potensi nasional yang perlu dibangun dan dikelola adalah aspek geografi, demografi dan kekayaan alam (Trigatra).

Hal ini cukup beralasan mengapa ketiga aspek itu perlu dikelola dan dibangun untuk kepentingan pertahanan negara, karena melihat konfigurasi geografi Indonesia yang terdiri dari lautan yang luas, ditebari ribuan pulau besar dan kecil, dengan persebaran penduduk yang tidak merata maka logika awal para pakar militer akan menyusun geostrategi pertahanan negara dengan membangun kekuatan laut dan udara. Namun demikian disadari bahwa

⁹ *Ibid*, hal 15-34

membangun kekuatan pertahanan negara tidak semata-mata hanya dilandasi oleh pemikiran geografi saja.

Dari teori membangun kekuatan pertahanan, terdapat empat unsur utama pertahanan yaitu doktrin, rekrutmen, persenjataan dan anggaran. Bagi yang memahami hakikat keamanan nasional dan khususnya hakikat pertahanan negara akan menyadari bahwa dengan keterbatasan sumber daya manusia, alat utama sistem kesenjataan (Alutsista), dan anggaran yang tersedia untuk dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia yang demikian beragam geografi, demografi dan kondisi sosial, maka doktrin yang mengandalkan perlawanan rakyat semesta yang dilandasi jiwa dan semangat bela negara masih menjadi pilihan.

Dalam membangun kekuatan pertahanan negara ada tiga pilihan yaitu: (1) Eskalatif, adalah kekuatan yang dibangun harus lebih besar daripada kekuatan lawan, (2) Normatif, adalah kekuatan yang dibangun berdasarkan norma-norma yang berlaku, dan (3) Realistik, adalah kekuatan yang dibangun berdasarkan sumber daya nasional yang dapat disediakan.

Selama ini Indonesia menganut alternatif yang ketiga, yaitu realistik, berdasarkan sumber daya nasional yang dapat disediakan oleh Pemerintah/Negara. Oleh sebab itu pembinaan sumber daya nasional harus dilakukan secara terpadu, profesional, efektif, efisien dan modern dalam rangka mendukung sistem pertahanan negara yaitu sistem pertahanan semesta. Mengacu pada uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa komando

kewilayahan masih diperlukan dan harus ada, karena doktrin atau sistem Pertahanan Rakyat Semesta yang bercirikan kewilayahan, kerakyatan dan kesemestaan memerlukan komando kewilayahan untuk membina jumlah rakyat yang besar.

Doktrin pertahanan yang mengandalkan kekuatan rakyat ini dirasa masih relevan digunakan dalam dunia yang modern seperti sekarang ini. Masih banyak negara yang tetap menganut doktrin ini, karena doktrin ini memenuhi syarat dipandang dari beberapa aspek kehidupan bangsa dan juga dari teori tentang pertahanan negara. (1) Dari aspek politik, mencerminkan demokrasi dalam penyelenggaraan pertahanan negara, yaitu mengalir dari tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara; dari aspek ekonomi, efektif dan efisien, dalam keadaan damai dibangun kekuatan yang relatif kecil, dengan kekuatan cadangan besar, bila ancaman meningkat maka cadangan diaktifkan; dari aspek budaya, perang merupakan sesuatu yang tidak berbudaya dan tidak bermoral, karena itu harus dicegah. Konflik yang muncul sejauh mungkin diselesaikan dengan jalan diplomasi, perang menjadi pilihan terakhir dan dalam keadaan terpaksa, karena jalan lain tidak mengatasi konflik; dari aspek militer, kekuatan yang dibangun bukan untuk menjadi agresor, tetapi merupakan penyanggah awal terhadap kemungkinan paksaan dari bangsa dan negara lain.

Dengan demikian maka struktur komando kewilayahan yang dibangun merupakan kompartemen strategis dalam pertahanan rakyat semesta,

penyanggah awal yang dilandasi oleh jiwa dan semangat bela negara, dan untuk menghadapi musuh dari luar dan ancaman dari dalam negeri.

2. Pendekatan dari Aspek Geografis.

a. Indonesia terletak diantara 6°LU - 11°LS dan 95°BT - 141°LS , merupakan lokasi yang strategis yang menghubungkan dua benua yaitu Australia dan Asia serta menghubungkan dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Posisi strategis Indonesia mengandung dampak negatif maupun positif dari segi keamanan wilayah, tergantung pada nilai-nilai keuntungan yang diharapkan oleh semua pihak yang memanfaatkan posisi strategis tersebut. Pihak-pihak yang menginginkan keuntungan dari posisi strategis tersebut akan berupaya mencari kelemahan-kelemahan untuk mendapatkan keuntungan di pihaknya.

Sisi positifnya adalah Indonesia mendapatkan keuntungan finansial dari bea keluar masuk lalu lintas antara kepentingan-kepentingan yang menggunakan wilayah Indonesia, yang menyangkut lalu lintas kapal laut, udara maupun dampak positif dari keduanya sebagai persinggahan, turis dan lain-lain. Sisi negatifnya adalah adanya kemungkinan pelanggaran wilayah udara dan lautan.

b. Posisi Indonesia sebagai negara kepulauan. Geografi Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau besar dan kecil, yang

masing-masing dihubungkan oleh laut dan selat, rawan terhadap infiltrasi musuh secara fisik maupun psikis. Pihak-pihak tertentu dengan dalih apapun sangat mudah memasuki salah satu dari kepulauan Indonesia dan sangat sulit dikontrol. Hal ini disebabkan karena terbatasnya sarana transportasi maupun komunikasi antara pulau satu dengan yang lainnya. Dengan kondisi geografi yang demikian maka perlu adanya aparat teritorial yang dapat mengkoordinir keamanan maupun pertahanan di wilayah tersebut.

c. Kondisi geografi negara Republik Indonesia yang bergunung-gunung dan terdapat banyak sungai dengan sarana transportasi dan komunikasi yang sangat terbatas menyebabkan keterisolasian antara daerah satu dengan daerah lain dan berdampak pada solidaritas serta sifat dan karakter masyarakat yang mendudukinya. Hal demikian perlu ada penyambung lidah sebagai komunikator masyarakat tersebut sehingga kebijaksanaan-kebijaksanaan dari pusat dapat tersalurkan.

d. Sumber daya alam yang terkandung dalam bumi Republik Indonesia masih banyak yang belum terdeteksi oleh pemerintah Indonesia, namun negara-negara maju jauh-jauh hari sudah mengetahui secara pasti kandungan sumber daya alam tersebut. Implikasinya antara lain adalah timbulnya pertentangan antar masyarakat yang terkait untuk menciptakan ketidakberdayaan dan pada akhirnya tercipta ketergantungan pemerintah terhadap negara

tertentu. Oleh karena itu perlu adanya institusi yang berkemampuan untuk mempersatukan masyarakat di wilayah tersebut.

3. Pendekatan dari Aspek Demografi.

a. Jumlah penduduk dan persebarannya. Dihadapkan pada jumlah penduduk Indonesia \pm 220 juta orang merupakan aset pembangunan dan sumber kekuatan bangsa yang dapat diandalkan, namun hal tersebut tidak ditunjang oleh persebaran yang merata, sehingga dapat menimbulkan kerawanan karena sebagian besar bermukim di pulau Jawa, Sumatera dan Bali. Hal ini semakin menjadi titik kerawanan apabila dihadapkan pada angkatan kerja yang setiap tahun meningkat yang tidak sebanding dan tidak sesuai dengan penyediaan lapangan kerja; selain dari itu tingkat kualitas sumber daya manusia yang belum merata dan menonjol di pulau Jawa sehingga sulit merealisasikan pemerataan pembangunan sebagai tuntutan dikurangnya kesenjangan sosial dan kesenjangan wilayah.

b. Kemajemukan masyarakat Indonesia. Kemajemukan masyarakat ditandai dengan keanekaragaman dalam berbagai hal seperti ras, suku, agama, adat istiadat dan perbedaan kedaerahan. Kondisi masyarakat yang majemuk tersebut akan kokoh sebagai suatu kesatuan yang tidak hanya berupa ide atau cita-cita yang terdapat dalam lambang negara yaitu semboyan Bhinneka Tunggal Ika tetapi

sungguh-sungguh merupakan kenyataan yang hidup, namun pada kenyataannya kondisi saat ini telah mengemuka berbagai konflik yang diakibatkan oleh permasalahan yang menyangkut kondisi kemajemukan tersebut. Kondisi ini sangat ironik bila dihadapkan pada pra-anggapan bahwa dengan tercapainya kematangan politik dan demokrasi, masalah kemajemukan/multi-etnik akan hilang dengan sendirinya. Oleh karena itu, perlu adanya pengembalian cara pandang bangsa yang merupakan suatu jiwa yang melekat pada sekelompok manusia yang merasa dirinya bersatu karena mempunyai latar belakang sejarah, nasib atau penderitaan yang sama dimasa lalu dan cita-cita yang sama untuk masa depannya. Sehingga perlu disadari bahwa unsur dasar yang sama dalam suatu bangsa bukanlah ras, warna kulit, bahasa, agama, akan tetapi hasrat untuk menjadi suatu kesatuan. Dengan menyadari kekurangan dan kelebihan dari dua tinjauan dasar kondisi demografi tersebut, maka dalam rangka membentuk dan mewujudkan peluang aspek demografi dalam pertahanan wilayah, perlu adanya pembinaan yang terus menerus dan proses waktu yang panjang melalui pembinaan teritorial.

4. Pendekatan dari Aspek Sosial, Budaya dan Agama.

- a. Karakter masyarakat Indonesia. Konsekuensi dari pengaruh perkembangan global adalah membawa perubahan tata nilai, tata laku

dan gaya hidup masyarakat Indonesia yang mengarah pada sikap individualistik dan hedonistik dengan tampilan perilaku yang keras, maunya sendiri dan nyaris tidak mau diatur.¹⁰ Perbandingan perbedaan karakter masyarakat semakin menonjol dengan ditandai bahwa karakter masyarakat yang tinggal di Pulau Jawa sebagai sentral cenderung masih mengedepankan etika toleran, namun apabila semakin bergeser ke arah timur dan barat terjadi perubahan dan perbedaan karakter yang kurang mengedepankan toleransi. Hal ini berakibat semakin sulitnya meredam konflik yang mengarah pada kepentingan kelompok/kekhasan daerah tersebut. Oleh karena itu kehadiran TNI dengan institusi komando kewilayahannya sangat dibutuhkan sebagai perekat persatuan bangsa.

b. Budaya dan Adat-Istiadat. Budaya dan adat istiadat masyarakat Indonesia mempunyai perbedaan antara lain kelompok suku yang satu dengan yang lainnya, sehingga hal ini akan saling mempengaruhi dalam proses/kontak kebudayaan. Kontak kebudayaan atau adat istiadat akan terjadi cultural animosity yaitu suatu keadaan dimana dua masyarakat yang saling memiliki kebudayaan berbeda akan saling menolak pengaruh kebudayaan/adat-istiadat antara satu sama lain. Hal ini akan menjadi rentan terhadap persatuan dan kesatuan manakala menonjolkan kepentingan budaya atau adat-

¹⁰ *Ibid*, hal. 24

istiadat. Oleh karena itu perlu adanya penyadaran untuk saling menghormati melalui pembinaan secara utuh untuk mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan budaya atau adat istiadat sebagai khasanah budaya bangsa Indonesia yang saling menghormati.

c. **Keanekaragaman agama.** Keanekaragaman agama merupakan “sistem religi” yang dianut oleh masyarakat Indonesia sebagai wujud kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dalam perspektif kehidupan keagamaan yang perlu mendapat perhatian adalah masih adanya segelintir pemeluk agama yang berusaha mengedepankan akidah/kepercayaan yang dianutnya. Oleh karena pemantapan kerukunan hidup umat beragama yang dikenal dengan istilah Trilogi Kerukunan umat beragama yakni kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama dan kerukunan umat beragama dengan pemerintah, perlu secara terus menerus diadakan pembinaan dalam rangka peningkatan kualitas umat beragama sebagai upaya pemaknaan secara hakiki nilai-nilai agama ke dalam kehidupan. Dengan mempelajari tinjauan dari segi sosial budaya terdapat pengaruh yang mungkin timbul adalah cara pandang sektarian dan primordialisme, satu sisi cara pandang sektarian terbentuk akibat mengedepankan perbedaan visi dan orientasi dengan sikap kurang dialogis komunikatif, bersifat reaktif dan tidak kritis yang bertitik tolak dari keanekaragaman kondisi sosial budaya masyarakat,

sehingga hal ini akan mengarah pada pembentukan sifat “destruktif” terhadap persatuan dan kesatuan. Disisi lain terbentuk pula cara pandang primordialisme yang merupakan faham loyalis yang berorientasi pada sikap yang hanya tertuju untuk kepentingan suku, agama, budaya adat dan lain-lain.

Cara pandang demikian sangat potensial menimbulkan kerawanan terhadap persatuan dan integrasi nasional, itulah sebabnya dalam masyarakat perlu dikembangkan loyalitas nasional yang berlandaskan Bhinneka Tunggal Ika; untuk mencapai loyalitas nasional ini diperlukan pembinaan yang terus menerus dalam proses waktu yang panjang melalui bentuk internalisasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh seluruh komponen bangsa termasuk di dalamnya aparat teritorial.

5. Pendekatan dari Aspek Kemungkinan Ancaman.

Perang yang akan datang berbeda dengan perang pada masa yang lalu, yang membedakan adalah keunggulan teknologi perang, sehingga pihak yang menang adalah yang mempunyai keunggulan teknologi perang. Pendapat demikian tidak sepenuhnya salah dan benar adanya, namun sebenarnya kemenangan perang tidak hanya ditentukan oleh keunggulan teknologi semata. “The man behind the gun” perlu diperhitungkan. Bagaimana canggihnya teknologi perang yang dimiliki Amerika, tetapi ternyata tidak mampu mengalahkan Vietnam, tidak mampu menghancurkan Irak dan juga

tidak mampu memaksa Osama Bin Laden untuk menyerah. Hal ini membuktikan bahwa faktor manusia juga ikut menentukan kemenangan perang. Semua perang, apapun jenis atau macamnya, pada akhirnya sangat ditentukan oleh manusianya. Oleh sebab itu dalam kaitannya dengan penyusunan/penyiapan wilayah menghadapi perang, maka sangat penting diketahui kemungkinan ancaman terhadap wilayah negara Republik Indonesia.

Berdasarkan perkembangan lingkungan strategis, ancaman yang akan dihadapi selalu berada di antara ancaman perang terbuka antar negara sampai dengan ancaman terhadap keamanan dalam negeri. Kecenderungan yang terjadi menunjukkan bahwa perang terbuka antar dua negara kecil kemungkinannya terjadi. Disamping itu akibat konflik kepentingan negara-negara maju dapat mengakibatkan timbulnya instabilitas di dunia internasional terutama pada negara-negara yang sedang berkembang atau dunia ketiga yang disebabkan oleh subversi, insurjensi atau pemberontakan bersenjata dan kudeta dengan isu demokratisasi, pelanggaran HAM dan lingkungan hidup.

- a. Ancaman dari luar. Meskipun invasi dari luar sangat kecil kemungkinannya, namun tidak dapat diabaikan. Indonesia masih mempunyai konflik dengan negara tetangga baik konflik perbatasan maupun konflik yurisdiksi beberapa pulau yang sampai saat ini belum terselesaikan. Konflik perairan yurisdiksi nasional Laut China Selatan

akibat manuver RRC dalam penguasaan kepulauan Spratly dan Paracel dapat melibatkan Indonesia, walaupun kemungkinannya kecil namun perlu mendapat perhatian dalam rangka mempertahankan dan menjaga harga diri.

Kelanjutan konflik antara kelompok pro kemerdekaan dan pro integrasi di Timtim dapat melibatkan Australia dan Indonesia bila konflik bersenjata terjadi di perbatasan antara Timor Leste dengan Nusa Tenggara Timur. Hal tersebut dapat memicu persengketaan antara Indonesia dengan Timor Leste.

Tuduhan dunia internasional (PBB) terhadap Indonesia tentang pelanggaran HAM di Timtim dan beberapa daerah lainnya di Indonesia, telah mempersulit posisi Indonesia di dunia internasional baik di bidang politik maupun ekonomi, dan pada akhirnya berdampak negatif pada keamanan dalam negeri.

Infiltrasi dan subversi dari negara-negara tertentu dalam usaha memelihara kepentingannya selalu akan terjadi, walaupun dalam kekuatan yang kecil. Pencurian kekayaan alam dan perampokan maupun penyelundupan dapat mengganggu perekonomian Indonesia yang dapat mengancam kerawanan perairan Indonesia dan konflik dengan negara tetangga, bila tidak segera diatasi.

Menyimak kemungkin-kemungkinan ancaman dari luar tersebut di atas, dapat diyakini bahwa ancaman-ancaman tersebut akan selalu

didahului dengan pembentukan kondisi (pengkondisian) di dalam negeri. Oleh karena itu peran pembinaan teritorial sangat dibutuhkan, guna menciptakan kondisi yang lebih kondusif untuk mencegah timbulnya ancaman dari dalam negeri.

b. Ancaman dari dalam. Aksi-aksi dari kelompok tertentu termasuk yang berhaluan komunis dalam mencapai tujuannya dapat melakukan sabotase berupa tindakan pengacauan dengan kekerasan, teror dan lain-lain sampai dengan gerakan bersenjata untuk menggulingkan pemerintah yang syah ataupun memisahkan diri dari NKRI.¹¹ Hal ini ditandai dengan adanya kegiatan kelompok-kelompok yang memanfaatkan mahasiswa dan masyarakat yang merasa tidak puas, serta lembaga swadaya masyarakat luar negeri untuk mendiskreditkan pemerintah dengan memanfaatkan setiap peluang yang ada.

Demokratisasi yang telah berkembang kearah kebebasan yang tanpa batas, ketidakadilan dalam distribusi pendapatan antara pusat dan daerah, pelaksanaan otonomi daerah yang seluas-luasnya dapat mendorong timbulnya ide federalisme yang menjurus pada upaya pemisahan diri dari beberapa wilayah di Indonesia. Bangkitnya aspirasi etnik dan agama serta masalah antar golongan telah

¹¹ *Ibid*, hal. 30

meningkatkan gerakan separatis seperti di Maluku dan Papua telah menimbulkan gangguan keamanan yang berkepanjangan yang dapat memicu timbulnya kerusakan dan anarki. Dampak negatif dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama bidang informasi telah mengakibatkan terjadinya polarisasi opini di lingkungan masyarakat, meningkatnya konflik antar elit politik dan terjadinya kebingungan dalam masyarakat yang kesemuanya dapat menambah potensi disintegrasi di lingkungan masyarakat. Peredaran illegal narkotika dan obat psiktropika telah merusak sebagian generasi muda dan telah meresahkan masyarakat sehingga mudah terpancing untuk melakukan pengrusakan serta main hakim sendiri. Perkembangannya telah menimbulkan gangguan Kamtibmas. Wacana yang berkembang tentang putra daerah, bahwa daerah harus dipimpin oleh putra daerah sendiri berdampak negatif terhadap kehidupan pemerintah daerah setempat. Padahal pengertian tentang putra daerah tidak dapat didefinisikan/ dipastikan.

Oleh sebab itu untuk menghindari kemungkinan ancaman dari dalam yang sebenarnya masih banyak yang potensial menjadi ancaman, maka perlu adanya institusi yang netral, yang berorientasi pada kepentingan negara dan bangsa, dalam hal ini TNI yang netral, yang dapat membina teritorial dengan profesional dan proporsional.

6. Pendekatan dari Aspek Dukungan Binter Pada Fungsi Pertahanan Negara.

Sebagai ilustrasi dalam mengukur keberhasilan peran Binter dalam mendukung fungsi pertahanan negara adalah tidak terlepas dari pelaksana-pelaksana di lapangan yang merencanakan, menyiapkan wilayah sebagai ruang, alat dan kondisi juang untuk mempertahankan wilayah dari ancaman musuh. Berbicara tentang ancaman, sudah barang tentu bukan ancaman dari luar saja (negara lain), namun juga ancaman dari dalam negeri sendiri. Ancaman dari luar tidak mungkin datang secara tiba-tiba tanpa didahului pembentukan situasi terlebih dahulu. Wujud ancaman dapat saja berupa ancaman terhadap aspek ekonomi, politik, sosial budaya dan lainnya yang berpengaruh baik langsung maupun tidak langsung terhadap kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Peran Komando Teritorial menjadi sangat penting dengan dua peran yang strategis. Gelar Komando Teritorial mempunyai dua peran, yakni berperan sebagai pembina dan pengendali serta penegak kedaulatan dalam mempertahankan keutuhan wilayahnya. Pertama, Komando teritorial adalah pembina teritorial yang hakekatnya membina wilayah menjadi suatu pertahanan yang baik secara fisik maupun psikis. Secara fisik dalam arti bahwa wilayah Koter menjadi suatu daerah pertahanan dengan unsur-unsur di dalamnya, serta secara psikis adalah terbentuknya kesadaran dan semangat masyarakat untuk mempertahankan wilayahnya. Kedua, Komando

Teritorial sebagai pengendali serta penegak dalam mempertahankan kedaulatan negara dan bangsa dalam arti Koter melaksanakan pertahanan bersama-sama masyarakat di wilayahnya.

Dari pendekatan peran, dapat diproyeksikan bahwa pembinaan yang dilaksanakan oleh Koter adalah selaras dengan Sistem Pembinaan TNI, Sistem Pembinaan Ketahanan Nasional dan Sistem Pembinaan Pertahanan Negara. Keselarasan dengan Sistem Pembinaan TNI, bahwa pembinaan yang dilaksanakan oleh Koter tercermin secara garis besar menghasilkan sikap untuk menjamin kemandirian TNI-Rakyat, dan kemahiran menerapkan metode Binter. Keselarasan dengan Sistem Pembinaan Ketahanan Nasional, bahwa pembinaan teritorial menghasilkan cara pandang masyarakat di wilayahnya, kesadaran bela negara serta terwujudnya keterpaduan dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Keselarasan dengan Sistem Pembinaan Pertahanan Negara, secara garis besar dapat mewujudkan wilayah dengan tata ruang dan berfungsinya sistem bela negara serta terwujudnya wilayah sebagai ruang, alat dan kondisi juang yang tangguh.

C. Pelaksanaan kegiatan Pembinaan Teritorial.

Pembinaan teritorial merupakan sarana yang digunakan oleh TNI AD untuk memantapkan kemandirian TNI-Rakyat dan untuk menyiapkan kesiapan komponen cadangan dan komponen pendukung di masing-masing daerah, termasuk upaya untuk mencegah terjadinya konflik horizontal di tengah masyarakat. Semua

dilakukan dalam mendukung tugas pokok TNI Angkatan Darat dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melindungi keselamatan seluruh bangsa Indonesia.

Dalam menjalankan tugas pokoknya TNI Angkatan Darat senantiasa mengedepankan tindakan preventif, dimana kegiatan pembinaan teritorial merupakan wujud dari tindakan preventif yang dilakukan oleh TNI Angkatan Darat. Oleh karena itu agar pembinaan teritorial dapat berjalan dengan konsisten dan terpantau, maka perlu adanya kesinambungan yang tidak dilakukan secara mendadak. Disinilah arti penting dibentuknya komando teritorial sebagai gelar kekuatan darat untuk mencegah terjadinya ancaman baik yang datang dari dalam negeri maupun luar negeri.

Perlu diketahui bahwa konsep teritorial yang dilakukan saat ini berbeda secara signifikan dengan konsep teritorial di masa lalu. Dimasa lalu komando teritorial dapat dikatakan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak proporsional karena selain melaksanakan pembinaan teritorial, juga melaksanakan pembinaan wilayah yang menjadi domain pemerintah daerah dan pembinaan Kamtibmas yang merupakan domain Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sekarang keadaannya berbeda, komando teritorial hanya melaksanakan pembinaan teritorial dalam rangka menyiapkan kekuatan kewilayahan bagi kepentingan pertahanan negara. Hal ini erat kaitannya dengan gerakan reformasi yang bergulir pada pertengahan tahun 1998. Ketika gerakan reformasi nasional digulirkan, maka TNI pun menyambut dengan melaksanakan reformasi internal TNI, maka esensi pembinaan teritorial yang

dilaksanakan TNI Angkatan Darat saat ini jauh berbeda dengan yang dilakukan dimasa lalu.¹²

Konsepsi pembinaan teritorial yang dikembangkan TNI saat ini adalah bagaimana mengelola kekuatan pertahanan di daerah bukan dalam konsep lama sebagaimana dalam pertahanan keamanan rakyat semesta (Hankamrata), melainkan sesuai konsep pertahanan menyeluruh (total defence). Dalam konsepsi Hankamrata, rakyat menjadi 'pagar manusia' di bidang pertahanan keamanan (Hankam). Sementara dalam total defence, rakyat sesuai bidang keahlian, menjadi kekuatan pendukung pertahanan negara.¹³ Berikut adalah beberapa kegiatan pembinaan teritorial yang dilaksanakan oleh jajaran komando teritorial TNI Angkatan Darat yang terangkum dalam Tabel-1.

Tabel.1 : Kegiatan Pembinaan Teritorial di Jajaran TNI AD

| NO | JENIS KEGIATAN | LOKASI |
|----|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) ke-74, terkait dengan adanya bencana Tsunami Tgl. 26 Desember 2004 : <ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan jalan baru sepanjang 55,2Km • Rehabilitasi jalan lama sepanjang 231,9Km • Pemasangan 22 buah jembatan bailey | Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) |

¹² Sambutan KSAD pada pembukaan Sarasehan Binter 2007, Pelita tanggal 27 Nopember 2007

¹³ Ikrar Nusa Bhakti, Quo Vadis pembinaan teritorial, <http://www.inilah.com/berita/celah/2008/09/19/50666/quo-vadis-pembinaan-teritorial/>

| 1 | 2 | 3 |
|---|--|--------------------------------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Pemasangan 1 unit jembatan ponton • Pemasangan armco 38 titik • Pembuatan 32 jembatan improvisasi • Pembuatan saluran air sepanjang 66,2Km. | |
| 2 | <p>TMMD ke-75 di daerah perbatasan Indonesia - Malaysia, dengan kegiatan pembangunan fisik dan non fisik :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan jalan desa sepanjang 13,7Km. • Rehabilitasi fasilitas peribadatan Gereja GPSK Desa Empura. • Rehabilitasi Masjid Al Fallah Desa Empura. • Rehabilitasi Kapel Desa Suak Medang. • Penyuluhan wawasan kebangsaan • Penyuluhan bela negara. • Pembinaan sadar hukum. • Penyuluhan kesehatan dan KB. • Penyuluhan tentang lingkungan hidup. | Kab. Sintang Prov. Kalimantan Barat. |
| 3 | <p>TMMD ke-78, di Kota Palu :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan Pos Siskamling. • Pembuatan jalan sepanjang 1.500M. • Pembuatan sarana MCK. • Rehabilitasi SD Inpres. | Kodya Palu Prov. Sulawesi Tengah |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan jalan kantong produksi sepanjang 1000M • Rehabilitasi Balai Kelurahan Lambara. • Rehabilitasi 38 rumah penduduk. • Rehabilitasi sarana ibadah berupa gereja. • Pembuatan Pos Babinsa. | |

| 1 | 2 | 3 |
|----|--|---|
| 4 | <p>Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan, oleh Kodim 0815/Mojokerto Kodam V Brawijaya, dilaksanakan melalui kerja sama dengan Kelompok Tani Rukun Makmur Ds. Tanjung, Kec. Kemlangi, Kab. Mojokerto.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penanaman kembali hutan gundul. • Penanaman kembali 850Ha lahan kritis di 69 desa dengan berbagai jenis tanaman seperti produktif. | Kab. Mojokerto Provinsi Jawa Timur |
| 5 | <p>Pengerukan lumpur Sungai Bandengan oleh Jajaran Kodim 0715/Kendal Kodam IV Diponegoro melalui kerjasama dengan POLRI, Dinas Pengairan Dinas Pekerjaan Umum dan masyarakat</p> | Kab. Kendal Provinsi Jawa Tengah |
| 6 | <p>Pelestarian kesenian tradisional kuda kepang dengan membentuk "Paguyuban Rukun Santoso" oleh Babinsa Desa Ketumbangan Lemo, Kecamatan Campagian Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat.</p> | Kab. Polewali Mandar Prov. Sulawesi Barat |
| 7 | <p>Pelestarian "Tari Waloka" dan "Tari Pataga" oleh Kodim 1613/Sumba Barat, dengan pembentukan "Sanggar Tari Udayana"</p> | Kab.Sumba Barat Prov. NTT |
| 8 | <p>Pendekatan persuasif dengan pemberian bantuan berupa sembako kepada kelompok Madi oleh Kopka Imran Lai, salah seorang Babinsa Desa Lumbodolo, Koramil 06/Banawa, Kodim 1306/Donggala Sulawesi Tengah dibantu seorang anggota Hansip.</p> | Kab.Donggala Prov. Sula-wesi Tengah. |
| 9 | <p>Pembudidayaan peternakan sistem tumpangsari (penggabungan peternakan dengan kolam ikan) oleh Kodim 1617/Jembrana. Dilaksanakan dengan melalui kerjasama dengan Dinas Peternakan Kab, Jembrana.</p> | Kab. Jembrana Prov.Bali |
| 10 | <p>Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) di bidang kerajinan tenun Cag-Cag oleh Kodim 1617/Jembrana melalui kerjasama dengan Dinas Perindustrian Kab. Jembrana kemudian terbentuk kelompok usaha "Campaka" an "Anggrek".</p> | Kab. Jembrana Prov. Bali |

| 1 | 2 | 3 |
|----|--|--|
| 11 | Pembudidayaan tanaman Semangka oleh Kodim 1617/Jembrana bekerja sama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Jembrana | Kab. Jembrana Prov. Bali |
| 12 | Pembudidayaan tanaman Rumput Laut oleh Kodim 1302/Minahasa Kodam VII Wirabuana dengan bekerja sama dengan Dinas Perikanan Kabupaten Minahasa. | Kab. Minahasa Prov. Sula-wesi Utara. |
| 13 | Program Motor Pintar oleh Kodim 1202/Singkawang Kodam VI Tanjungpura, dalam rangka membantu masyarakat memperoleh pendidikan dan arus informasi, dengan pemberian perpustakaan keliling. | Kab. Singkawang Prov, Kalimantan Barat. |
| 14 | Pembentukan organisasi "Mitra Jaya" oleh Kodim 0504/Jakarta Selatan Kodam Jaya, dengan tujuan : <ul style="list-style-type: none"> • Membantu upaya deteksi dini, • Sistem lapor cepat • Sistem cegah dini • Antisipasi gangguan keamanan. | Kodya Jakarta Selatan Prov Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. |
| 15 | Kegiatan Binter oleh Kodim 0504/Jakarta Selatan kepada sejumlah karyawan/pekerja pabrik berupa <ul style="list-style-type: none"> • Penyuluhan wawasan kebangsaan. • Pelatihan bela negara serta bela diri. • Pelatihan baris berbaris. | Kodya Jakarta Selatan Prov Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. |
| 16 | Kegiatan Binter oleh Kodim 0705/Magelang berupa : <ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan wawasan kebangsaan. • Pembinaan bela negara. • Pembinaan kedisiplinan. | Kab. Magelang Prov. Jawa Tengah. |
| 17 | Pelatihan bela negara kepada para anggota organisasi masyarakat seperti Pemuda Panca Marga (PPM) dan Forum Komunikasi Pemuda-Pemudi Indonesia (FKPPI) oleh Kodim 0832/Surabaya Selatan. | Kodya Surabaya Prov, Jawa Timur. |

| 1 | 2 | 3 |
|----|--|---|
| 18 | Bhakti Sosial Medis oleh Kodim 0413/Bangka Kodam II Sriwijaya berupa : <ul style="list-style-type: none"> • Pengobatan gratis kepada 1884 warga masyarakat. | Kab. Bangka Prov, Bangka Belitung. |
| 19 | Kegiatan bedah rumah melalui program atap, lantai dan dinding (Aladin) yang dilakukan oleh Kodim1420/Sidrap Kodam VII Wirabuana. | Kab. Sidrap Prov. Sulawesi Selatan. |
| 20 | Pembangunan Jembatan Balley oleh Batalyon Zipur-1 Kodam I Bukit Barisan yang menghubungkan Sicanang Kec. Belawan Medan dan Pulau Ratu yang roboh pada saat dilalui oleh kendaraan pengangkut mesin rotor milik PLN. | Kodya Medan Prov. Sumatera Utara. |
| 21 | Karya Mandiri-I 2007 oleh Kodim 0716/Demak Kodam IV Diponegoro : <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan jalan beton bertulang sepanjang 1030M dan lebar 2,5M. • Pembuatan jembatan bersayap dengan panjang 6,5M dan lebar 3M. • Penyuluhan wawasan kebangsaan. • Penyuluhan pendidikan pendahuluan bela negara | Kab. Demak Prov. Jawa Tengah |
| 22 | Karya Bhakti oleh Kodim 1301/Sangir Talaud pada Januari 2007 terkait dengan bencana tanah longsor : <ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan 2 buah jembatan bailey. • Pembersihan wilayah pemukiman. • Pembersihan saluran air | Kab. Sangir Talaud Prov. Sulawesi Utara |
| 23 | Pembudidayaan peternakan sapi oleh Kodim 1615/Lombok Timur melalui pembentukan kelompok ternak "Mi'rajussaadah" | Kab. Lombok Timur Prov. Nusa Tenggara Barat |

| 1 | 2 | 3 |
|----|---|---|
| 24 | TMMD TA.2007 oleh Kodim 0507/Bekasi Kodam Jaya Jakarta : <ul style="list-style-type: none"> • Pengerasan badan jalan sepanjang 2Km. • Pembuatan 5 buah gorong-gorong. • Pembuatan 1 unit Poskamling. • Penyuluhan bela negara. • Penyuluhan bahaya narkoba. • Penyuluhan kerukunan umat beragama. | Kab. Bekasi Prov. Jawa Barat. |
| 25 | Bhakti Sosial oleh Kodim 0507/Bekasi bekerja sama dengan Pemda Bekasi : <ul style="list-style-type: none"> • Pengobatan masal (678 orang) • Pengobatan gigi (179 orang) • Khitanan massal. • Operasi bibir sumbing (9 orang). • Operasi katarak (14 orang) | Kab. Bekasi Prov. Jawa Barata |
| 26 | Karya Bhakti Kali Bersih oleh Kodim 0418/ Palembang dengan bekerja sama bersama Satpol PP, Dinas Kebersihan Kodya Palembang, Dinas Pekerjaan Umum Palembang berupa pengangkatan tanaman liar enceng gondok | Kodya Palembang Prov. Sumatera Selatan |
| 27 | Karya Bhakti oleh Kodim 1013/Muara Teweh dengan sasaran fisik renovasi jembatan Desa Maruwei Kec. Gunung Timang Kab. Barito Utara. | Kab. Barito Utara Prov. Kalimantan Tengah |
| 28 | Bhakti TNI oleh Kodim 1302/Minahasa dengan sasaran pembersihan tanaman liar enceng gondok di Danau Tondano. | Kab. Minahasa Prov. Sulawesi Utara. |

Sumber : Buletin Interaksi Teritorial Edisi 1 bulan Maret 2007 s/d Edisi 10 Bulan Desember 2007 (Foto terlampir)

D. Kegiatan Pembinaan Teritorial Ditinjau dari Ketahanan Nasional

1. Ditinjau dari Aspek Ketahanan di Bidang Ideologi.

Kegiatan pembinaan teritorial dalam bentuk penyuluhan bahaya laten komunis dan kerukunan hidup antar umat beragama merupakan bentuk upaya yang dilakukan oleh TNI AD melalui komando teritorial yang dimaksudkan untuk ikut menciptakan daya tahan di bidang ideologi. Upaya yang dilakukan dengan bekerja sama dengan berbagai instansi terkait ini dilakukan secara berkesinambungan bersamaan dengan kegiatan fisik lainnya dalam satu paket misalnya pada program TNI Manunggal Masuk Desa atau lebih dikenal dengan TMMD. Anggota masyarakat yang mendapat penyuluhan akan bahaya laten komunis menjadi tahu akan bahaya dari komunisme sehingga akan berhati-hati dan tidak mudah termakan oleh isu yang berkembang. Demikian juga dengan masalah SARA, masalah ini merupakan persoalan yang sangat rentan mendera masyarakat Indonesia. Bagaimana di Ambon, Poso dan Kalimantan. Pengalaman mengajarkan bagaimana pemahaman yang kurang kemudian mudah disulut oleh berbagai pihak yang tidak menginginkan kedamaian. Tidak terhitung kerugian harta benda dan jiwa yang harus dihadapi ketika terjadi peristiwa di tiga daerah tersebut. Diharapkan dengan dengan pemberian pemahaman tentang masalah Suku, Agama dan Ras maka masing-masing anggota masyarakat tidak mudah terpancing dan akan berpikir panjang menanggapi isu yang sengaja dihembuskan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Pada akhirnya ketika masyarakat mengetahui atau

menemukan hal-hal semacam ini dengan kesadaran yang tinggi akan memberikan informasinya kepada aparat yang terkait, sehingga bisa diambil langkah-langkah pencegahan. Upaya ini bagaimanapun juga paling tidak dapat memberikan sumbangan bagi terciptanya ketahanan nasional di bidang ideologi.

2. Dilihat dari Aspek Ketahanan di Bidang Politik.

Kegiatan penyuluhan sadar hukum dan penyuluhan wawasan kebangsaan merupakan sumbangan yang tidak kecil bagi terciptanya ketahanan di bidang politik. Kesadaran masyarakat akan kepatuhan terhadap hukum positif yang berlaku baik dalam kehidupan bernegara maupun sebagai warga masyarakat paling tidak bisa terbangun dengan adanya kegiatan seperti ini. Masyarakat sadar apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, pengembangan wawasan kebangsaan akan akan membangun kesadaran akan kewajiban berpolitik sebagai warga negara, bagaimana dia harus menyalurkan hak politiknya yang pada gilirannya akan meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Dengan tingginya partisipasi politik warga masyarakat sedikit banyak akan memberikan sumbangan bagi terciptanya ketahanan di bidang politik. Rendahnya partisipasi politik sedikit banyak akan mengganggu legitimasi terhadap apa yang dihasilkan dari kegiatan politik. Sekedar gambaran, bagaimanapun jika partisipasi politik warga masyarakat dalam pilkada rendah maka legitimasi terhadap hasil yang dicapai sedikit banyak

juga akan terganggu, karena masyarakat tidak merasa ikut menciptakan berpartisipasi.

3. Dilihat dari Aspek Ketahanan di Bidang Ekonomi.

Berbagai kegiatan yang dilakukan misalnya dengan membuka akses jalan bagi kelancaran pengangkutan komoditas ekonomi, pemanfaatan lahan kosong untuk ditanami berbagai produk pertanian dan juga budidaya peternakan, budi daya rumput laut, merupakan kegiatan nyata yang dapat memberikan sumbangan bagi peningkatan penghasilan ekonomi warga masyarakat. Masyarakat yang semula belum atau tidak mempunyai kegiatan dapat terangkul dan mengikuti kegiatan yang dapat memberikan penghasilan tambahan. Demikian juga daerah yang semula terisolir dan terganggu akses perekonomiannya sehingga distribusi komoditas tidak berjalan maka dengan dibangun sarana jalan distribusi dan penjualan berbagai produk daerah dapat berjalan dengan lancar. Semuanya ini sedikit banyak akan memberikan sumbangan pada meningkatnya penghasilan warga masyarakat. Dengan meningkatnya penghasilan masyarakat maka akan meningkatkan daya beli yang pada akhirnya akan memutar roda perekonomian setempat yang kemudian pada gilirannya akan menyumbang perekonomian secara nasional. Walaupun harus diakui peranan ini mungkin masih kecil namun bagaimanapun paling tidak ikut memberikan dukungan bagi terciptanya ketahanan ekonomi masyarakat setempat.

4. Dilihat dari Aspek Ketahanan di Bidang Sosial Budaya.

Adanya program motor pintar, program penyuluhan keluarga berencana, penyuluhan kesehatan dan juga penyuluhan akan bahaya Narkoba yang dilakukan secara rutin, telah memberikan sumbangan bagi terciptanya ketahanan di bidang sosial budaya. Masyarakat yang tidak mempunyai akses akan pendidikan dan kesehatan bagaimanapun akan sangat terbantu dengan adanya kegiatan yang dilaksanakan oleh komando teritorial tersebut. Dengan adanya kegiatan ini masyarakat bisa memanfaatkan apa yang dilaksanakan oleh komando teritorial TNI AD. Masyarakat yang tadinya sulit mendapatkan bahan bacaan akan dengan mudah mendapatkannya secara berkala. Masyarakat yang tadinya sulit mendapatkan akses tentang keluarga berencana, bisa mendapatkan manfaat secara langsung. Masyarakat yang melek huruf, masyarakat yang sehat merupakan modal dasar bagi terbentuknya masyarakat yang ulet dan tangguh.

5. Dilihat dari Aspek Ketahanan di Bidang Hankam.

Kegiatan- kegiatan yang dilaksanakan yang dikemas dalam pembinaan teritorial telah memberikan dukungan bagi terciptanya ketahanan dibidang pertahanan dan keamanan. Kegiatan penyuluhan bela negara, pengenalan wawasan kebangsaan, kegiatan perekonomian di wilayah perbatasan (budi daya tanaman rumput laut), serta berbagai pembangunan di daerah perbatasan misalnya di Kalimantan Barat, merupakan upaya nyata yang dapat

memberikan terciptanya kondisi tersebut. Bagaimanapun kecilnya sumbangan yang dapat diberikan namun telah upaya tersebut telah mendukung terciptanya ketahanan di bidang pertahanan keamanan. Bagaimana misalnya usaha budidaya rumput laut di daerah Sulawesi Utara, disamping bisa meningkatkan penghasilan tambahan, juga merupakan upaya deteksi dini terhadap upaya masuknya pihak asing melalui daerah tersebut. Sebab kegiatan yang dilaksanakan di daerah tersebut bisa disebut pos depan ataupun pos pengawas bagi aktifitas asing ataupun penyelundupan yang akan masuk melalui wilayah tersebut. Selanjutnya upaya sentuhan pembangunan di wilayah perbatasan Malaysia, juga merupakan upaya untuk lebih memperhatikan kebutuhan penduduk di kawasan perbatasan yang selama ini seperti terpinggirkan, maraknya masyarakat pelintas batas karena mereka didorong oleh mudahnya mendapatkan apa yang mereka butuhkan dinegeri seberang. Diharapkan dengan memberikan perhatian kepada mereka maka akan membangkitkan rasa nasionalisme.

Selanjutnya kegiatan lain misalnya dengan terbentuknya mitra Babinsa, ini merupakan upaya deteksi dini terhadap kerawanan yang tidak dapat terjangkau oleh aparat yang ada. Mitra Babinsa yang dibekali dengan beberapa ketrampilan merupakan sumber yang terdepan yang akan melaporkan kepada aparat keamanan manakala menjumpai sesuatu hal yang mencurigakan ataupun yang dinilainya akan menciptakan instabilitas. Maka

dengan adanya laporan awal ini maka akan dapat dilakukan upaya-upaya pencegahan sebelum segala sesuatunya terjadi.

Tidak kalah pentingnya tentang pengenalan wawasan kebangsaan yang dilakukan secara reguler, paling tidak sedikit banyak akan memberikan sumbangan terhadap tumbuhnya rasa nasionalisme di kalangan masyarakat. Rasa nasionalisme yang tinggi pada gilirannya akan menumbuhkan ikatan kedalem yang kuat, yang merupakan modal berharga dalam menghadapi setiap ganggaun yang akan muncul. Dengan rasa nasionalisme yang tinggi akan dapat tercegah adanya keinginan untuk memisahkan diri atau sikap-sikap ingin memecah belah yang jika dibiarkan akan memnjadi bibit kehancuran bangsa.

F. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Binter.¹⁴

1. Masalah payung hukum. Istilah Binter tidak dimasukkan dalam undang-undang, sedangkan yang tercantum dalam undang-undang tersebut adalah istilah pemberdayaan wilayah pertahanan. Yang menjadi masalah sampai dengan saat ini penjabaran dari undang-undang tersebut belum ada, masih tertahan sampai dengan Undang-Undang TNI. Bagaimana implementasi pemberdayaan wilayah pertahanan belum ada petunjuk aturan yang dikeluarkan Menteri Pertahanan. Panglima TNI juga belum bisa

¹⁴ Wawancara dengan Paban-V/Bhakti TNI Staf Teritorial Angkatan Darat, Kolonel Inf Sumardi, tanggal 19 Februari 2008

mengeluarkan Peraturan Panglima TNI, demikian juga dengan pemerintah juga belum ada peraturan pemerintah. Padahal Binter bukanlah nomenklatur dari pemberdayaan wilayah pertahanan. Mereka menganggap pemberdayaan wilayah pertahanan sama dengan Binter, ternyata setelah dikaji lebih jauh oleh TNI AD, pemberdayaan wilayah pertahanan hanya mendukung persiapan operasi militer untuk perang, sedangkan TNI AD menginginkan Binter bisa masuk dalam operasi militer selain perang, seperti membantu bencana alam, mengatasi separatistis dan lain-lain. Pemberdayaan wilayah pertahanan hanya untuk operasi perang, yaitu mempersiapkan ruang, alat dan kondisi juang. Binter lebih luas dari pemberdayaan wilayah pertahanan, jadi pemberdayaan wilayah pertahanan merupakan bagian dari Binter, karena pemberdayaan wilayah pertahanan hanya satu sisi untuk perang, sedangkan Binter bisa masuk juga pada masa damai, dengan operasi militer selain perang. Kondisi belum adanya payung hukum ini, menurut Sumardi, menjadi hambatan bagi satuan komando kewilayahan (Satkowil/Koter) ketika harus melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait.

2. Binter TNI AD belum tersosialisasi secara merata di segenap lapisan masyarakat, sehingga masih banyak kalangan masyarakat yang belum memahami tentang Binter.
3. Penerapan Binter di lapangan pada masa lalu keluar dari hakikat Binter yang sesungguhnya sehingga menimbulkan trauma bagi kalangan sipil yang dirugikan pada saat itu. Kondisi ini yang kemudian pada saat ini

menyebabkan sikap apriori terhadap Binter walaupun sebenarnya Binter TNI AD yang sekarang telah mengalami berbagai perubahan, utamanya tidak lagi menyentuh wilayah politik praktis, dan bukan lagi sebagai perpanjangan kekuasaan.

G. Beberapa Pendapat Tentang Binter dan Kemungkinan Binter Di Masa yang Akan Datang.

1. Menurut M. Nurhasim,¹⁵ peneliti Politik LIPI/Peneliti RIDEP Institut dan juga pemerhati masalah militer, berbicara masalah Binter, terdapat kaitan dengan konsep teritorial yang dibangun oleh Tentara Nasional Indonesia dalam struktur sejarahnya yang memang harus dilihat ke belakang terlebih dahulu. Ketika kita ingin melihat mengapa Binter muncul di Indonesia, yang kemudian mempunyai peran yang signifikan selama masa Orde Baru yang kemudian pada era reformasi ditinjau ulang, ternyata ada kaitan dengan persoalan-persoalan historis. Mengapa demikian, karena hal ini tidak bisa dilepaskan dari fungsi-fungsi militer dalam konteks politik pada saat itu dilaksanakan dengan konsep “jalan tengahnya” AH. Nasution, yang bagaimanapun hal itu mencakup Binter, dimana tentara kemudian mempunyai fungsi untuk menjalankan bimbingan kepada masyarakat, misalnya agar kehidupan masyarakat lebih tertib dan juga lebih melek huruf. Hal ini sangat mendasar dan mempunyai justifikasi yang sangat kuat, sehingga pada awal

¹⁵ Wawancara dilaksanakan tanggal 25 Februari 2008 di Pusat Penelitian Politik Gedung LIPI, Jl. Gatot Subroto

revolusi Binter menjadi sangat berguna, karena dari segi organisasi harus diakui atau tidak kelompok/kalangan sipil belum kuat, masyarakat belum melek huruf dan sebagainya, birokrasi belum stabil dan belum tertata dengan rapi. Kalau dilihat dari sisi sejarahnya Binter adalah seperti itu, karena terkait dengan penguatannya pada masa-masa darurat militer tahun 1953-1958 ketika di beberapa daerah terjadi beberapa pemberontakan, dan untuk mengantisipasi kemudian dilaksanakan Binter. Hal ini kemudian disistematisasi oleh Orde Baru, ketika ada yang disebut istilah struktur bayangan antara militer dan pemerintahan sipil. Karena pada situasi tersebut diperlukan adanya stabilisasi politik yang kuat, sehingga struktur militer perlu membayangi struktur pemerintahan sipil.

Binter mempunyai fungsi yang cukup signifikan khususnya di wilayah-wilayah kabupaten ke bawah, atau mulai Kodim sampai dengan Koramil, karena Binter ini relatif mengarah kepada masyarakat. Tentara melaksanakan fungsi sosial politik dalam rangka mengendalikan ketertiban masyarakat, untuk mengendalikan politik di tingkat bawah. Pada saat itu mempunyai justifikasi yang kuat ketika diberlakukan.

Persoalannya, ketika reformasi ini berjalan, lalu muncul beberapa pandangan, apakah militer akan tetap diberikan fungsi seperti itu, ketika masyarakat sipil sudah terbentuk, ketika kekuatan sipil yang relatif kuat sudah mulai ada, kekuatan kelas menengah mulai ada dan masyarakat kelas bawah tidak lagi buta politik. Ini kemudian menjadi suatu persoalan, apakah wilayah

ini akan ditangani oleh militer (TNI) ataukah akan ditangani oleh lembaga lain. Dimasa ini kemudian fungsi ini dikembalikan kepada polisi dan fungsi teritorial yang dijalankan militer diubah dalam konteks sebagai upaya penyiapan pertahanan khususnya untuk “total defence”. Hal ini jelas berbeda, ada pergeseran yang cukup signifikan, ketika fungsi sosial politik dicabut, maka fungsi ini juga harus dikembalikan ke lembaga sipil, dan konsep Binter kemudian harus dijalankan dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dan tidak bisa dijalankan oleh militer sendiri.

Ada dua hal yang harus dibedakan antara Binter dengan fungsi militer selain perang. Seperti yang dimaksud AMD pada jaman dulu dan juga TMMD saat ini, hal ini sebenarnya adalah bagian dari Operasi Militer Selain Perang (OMSP), sedangkan Binter sendiri berbeda konsepnya. Argumentasi mengapa Binter kemudian diarahkan menjadi fungsi penyiapan supra struktur di dalam konteks pertahanan keamanan itu terkait dengan perubahan konseptual dari apa yang pada waktu terdahulu dimaksud sebagai perang rakyat semesta, dimana rakyat menjadi bagian yang penting di dalam konteks pertahanan. Tetapi dalam konteks “total defence” semua infra struktur dapat digunakan dalam perang. Persoalannya siapa yang akan menyiapkan semuanya ini, ketika rakyat tidak memiliki dasar-dasar pertahanan, maka salah satu fungsi Binter sebaiknya di masukkan dalam peraturan Pemerintah Daerah, tetapi dalam implementasinya perlu koordinasi dengan pihak TNI, karena

bagaimanapun yang mengetahui apakah siap digunakan untuk perang atau tidak adalah pihak TNI.

Menjadi persoalan ketika ternyata hal ini di Indonesia belum ada aturan yang berlaku untuk itu. Sebagai contoh ketika terjadi perang apakah Bandara Adisucipto di Yogyakarta, bisa digunakan untuk bandara perang? Siapa yang harus menyiapkan?, Undang-undangnya seperti apa dan sebagainya sampai saat ini belum ada. Sementara pada sisi yang lain ada OMSP, yang memberikan peluang pada militer (TNI) untuk berperan diluar fungsi/peran pertahanan, yang mana OMSP dalam konteks militer memang ada dasar teorinya atau dasar hukumnya (UU No. 34/2004).

Terkait dengan adanya perubahan konsep Binter saat ini, yang kemudian dipersoalkan adalah, apakah Binter saat ini masih dijalankan dengan pola lama atau sudah berubah sesuai dengan pada konsep UU Pertahanan. Pemberdayaan wilayah pertahanan ini siapa yang harus melakukan dan bagaimana TNI menterjemahkan pemberdayaan. Apakah sama dengan Binter yang dulu atukah ada perubahan-perubahan fungsi disini. Jenderal TNI Djoko Santoso, sewaktu masih menjabat Kasad mengatakan bahwa Binter yang ada saat ini sudah lepas dari politik praktis, tetapi apakah implementasinya di lapangan sudah seperti itu.

Sementara itu berkaitan dengan pelaksanaan Binter dengan tiga metodenya yaitu Bhakti TNI, Pembinaan Ketahanan Wilayah dan Komunikasi Sosial, Nurhasim menyatakan bahwa itu sebetulnya bukan tugas TNI, tugas

utama TNI bukanlah seperti itu, kalau dalam konteks “idle capacity” karena negara tidak ada perang, maka tentara seharusnya difungsikan untuk meningkatkan “core competennya” (profesionalitasnya), bagaimana tentara harus dibina, dilatih dan sebagainya. Berbagai bentuk pelaksanaan Binter seperti yang selama ini dilaksanakan seperti penyuluhan, membantu pemerintah daerah dalam membuka akses jalan baru dan lain-lain merupakan bagian dari OMSP bukan Binter. Kalau OMSP sudah dijalankan maka Binter tidak perlu lagi, karena semuanya sudah tercakup di dalam OMSP dan tentunya tidak akan menimbulkan perdebatan lagi karena memang jelas ada “cantolannya”. Oleh sebab itu sebaiknya dimasukkan dalam OMSP.

Dihadapkan dengan situasi dan kondisi “core competen” yang dikatakan menurun, alutsista kurang, anggaran lemah, sementara disatu sisi diperlukan peningkatan profesionalisme, maka fungsi-fungsi teritorial semacam itu akan membebani TNI untuk menuju ke profesionalisme. Yang menjadi pertanyaan apakah fungsi-fungsi ini dalam penilaian TNI dianggap beban atau justru menjadi bagian untuk meningkatkan profesionalisme, itu yang perlu dilihat di lapangan. Menurut pemikiran Nurhasim, dihadapkan dengan “idle capacity” maka yang sebaiknya dilakukan oleh TNI adalah merancang suatu fungsi kemanusiaan internasional untuk mengangkat citra dan juga untuk menyerap anggaran PBB.

Berbicara masalah keunggulan dan kelemahan Binter, Nurhasim mengatakan bahwa, Binter akan menjadi beban bagi TNI AD, oleh karena itu

harus ada pembahasan yang teliti tentang pemberdayaan wilayah pertahanan dan itu bukan semata-mata menjadi tugas TNI akan tetapi juga menjadi tugas pemerintah daerah, karena pembinaan pertahanan di daerah menjadi fungsi pemerintah daerah. Sedangkan keuntungannya, dalam pandangan Nurhasim, Binter dapat mendekatkan TNI dengan rakyat, namun demikian sekali lagi, kerugiannya lebih besar. Lebih bagus sebaiknya untuk lebih menyiapkan dirinya, berkonsentrasi menerjemahkan ancaman dari luar, lalu melatih diri untuk menghadapi ancaman tersebut. Jangan sampai TNI AD terjebak dalam tugas-tugas yang diluar tugas pokoknya. Jadi kalau Binter sekarang masih berjalan, maka itu sifatnya adalah transisional karena belum ada dasar hukumnya. Untuk itu agar lebih kuat sebaiknya dimasukkan dalam OMSP dan dijalankan tidak secara periodik, akan tetapi secara sporadis atau insidental.

2. Kolonel Inf Sumardi (Paban-V/Bhakti TNI, Staf Teritorial Angkatan Darat),¹⁶ mengatakan bahwa masalah pertahanan merupakan masalah yang hakiki, maksudnya menyangkut kepentingan bangsa. Masalahnya di dalam undang-undang pertahanan Indonesia, dibagi menjadi dua yaitu pertahanan militer dan pertahanan non-militer. Non-militer oleh kalangan sipil, ancamannya berupa ancaman non militer. TNI bisa terlibat didalamnya dengan menganut pola operasi militer selain perang (OMSP), itupun harus dengan permintaan dan keputusan politik, tidak bisa semena-mena. Yang

¹⁶ Wawancara tanggal 19 Februari 2008

menjadi masalah sampai dengan saat ini penjabaran dari undang-undang tersebut belum ada, masih tertahan sampai dengan Undang-Undang TNI. Bagaimana implementasi pemberdayaan wilayah pertahanan belum ada petunjuk aturan yang dikeluarkan Menteri Pertahanan, sehingga Panglima TNI juga belum bisa mengeluarkan Peraturan Panglima TNI, demikian juga dengan pemerintah juga belum ada peraturan pemerintah. Untuk itu TNI AD sambil menunggu keluarnya penjabaran undang-undangnya, tidak tinggal diam, kalau menunggu keluarnya penjabaran undang-undang tersebut, maka satuan komando kewilayahan (Koter), kapan akan bekerjanya. (istilah Paban-V/Bhakti TNI akan tidur terus). Oleh sebab itu maka dibuatlah Doktrin Sementara Kartika Eka Paksi, yang didalamnya menyebutkan Binter sebagai fungsi utama, yang artinya TNI tidak dapat melaksanakan pertahanan semesta tanpa adanya Binter. Sebagai fungsi utama maka Binter merupakan tugas terkandung yaitu merupakan sasaran antara, sehingga merupakan suatu hal yang harus dikerjakan dan dicapai untuk mencapai sasaran pokoknya. Hanya saja yang kemudian menjadi masalah, adanya pandangan dari kalangan sipil yang meng-klaim bahwa Binter adalah milik pemerintah. TNI memang memahami hal ini, Binter yang dilaksanakan oleh pemerintah dilaksanakan bidang per-bidang. Bidang kehutanan melaksanakan binter bidang kehutanan, bidang industri melaksanakan masalah industri, semuanya ini di kalangan sipil disebut dengan “community development” atau pemberdayaan masyarakat. Inilah yang oleh TNI AD diistilahkan menjadi Binter. TNI melaksanakan

Binter dalam rangka pertahanan. TNI juga mengakui bahwa Binter memang milik pemerintah, akan tetapi TNI hanya mengambil sebagian dalam rangka pertahanan, itupun terbatas dalam lingkup matra darat. Adalah sangat kecil kemungkinannya dapat melaksanakan pertahanan semesta tanpa melaksanakan Binter. Menurut Sumardi, perang tidak lebih dari pada wilayah, oleh karena itu wilayah yang menjadi tanggung jawab TNI AD, maka harus dibina, bagaimana persoalan logistiknya, telekomunikasinya, semuanya harus disiapkan sebelumnya. Binter merupakan tugas terkandung yang tercantum di dalam Doktrin Sementara Kartika Eka Paksi, sehingga walaupun pihak diluar TNI AD tidak mengenal Binter, TNI AD tetap mengenal apa Binter, walaupun pihak diluar TNI AD tidak menerima Binter, TNI AD akan tetap melaksanakan Binter. Untuk mencapai Sishanta maka teritorial harus dibina dengan baik dan benar.

3. Srinuryanti¹⁷ (Peneliti Politik LIPI), “core function-nya” TNI adalah untuk pertahanan bukan untuk yang lain-lain. Kalau kemudian di Indonesia dimengerti ada konsep “jalan tengah” semuanya ini karena faktor kontekstual saat itu. Akan tetapi kalau sekarang disepakati militer kembali ke barak, militer tugas utamanya adalah menjaga keamanan negara. Akan tetapi kalau sekarang dikatakan bahwa Binter merupakan fungsi utama, maka harus dilihat adanya prioritas-prioritas tertentu. Kalau Binter merupakan fungsi utama,

¹⁷ Wawancara tanggal 25 Februari 2008.

maka harus ada revitalisasi Binter dengan menetapkan prioritas yang diterapkan, misalnya untuk daerah-daerah konflik, daerah rawan konflik, daerah perbatasan dan daerah terbelakang/tertinggal serta juga dengan prioritas persoalan yang dihadapi, serta dengan menentukan jangka waktu dan target yang akan dicapai. Yang perlu juga dipikirkan bahwa adanya perubahan paradigma Binter ini belum tentu juga diterima oleh masyarakat, sehingga perlu sosialisasi perubahan paradigma tersebut. Hal inipun memerlukan waktu dan tidak sekedar kebijakan saja. Oleh sebab itu Binter seharusnya diarahkan untuk bisa mencegah terpisahnya, tercerai-berainya wilayah Indonesia. Sebab dalam pandangan Srinuryanti, daerah tertinggal ataupun daerah terbelakang merupakan daerah yang rawan konflik kalau tidak diatasi dan menjadi prioritas penanganan. Karena bisa saja berkembang anggapan dalam masyarakat di wilayah tersebut, sebagai masyarakat yang tidak diperhatikan atau terpinggirkan. Hal seperti ini yang perlu menjadi prioritas penanganan Binter.

4. Amirudin Rajab¹⁸ dari Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) mengatakan bahwa salah satu ukuran apakah di Indonesia telah terjadi perubahan dari fungsi kekuatan militer (TNI AD) adalah terlihat dari bagaimana fungsi Binter ini diaplikasikan di lapangan. Sampai saat ini Binter masih menjadi masalah karena belum tampak adanya suatu perubahan, hal ini

¹⁸ Wawancara tanggal 26 Februari 2008

terlihat misalnya pada saat terjadi pembentukan wilayah pemekaran, pada saat yang sama juga dibentuk komando teritorial. Hal ini untuk daerah di luar Pulau Jawa menjadi persoalan yang serius karena kekuatan Binter menjadi suasana politik daerah. Amirudin menilai bahwa saat ini ada semacam keraguan dari TNI AD untuk memformulasi ulang peranan Binter saat ini. Menurutnya sebaiknya Binter harus diubah dari terlibat menjadi tidak terlibat. Binter sudah tidak “kompatibel” dengan keadaan Indonesia saat ini. Adanya semacam penilaian dari kalangan TNI AD bahwa pemerintah daerah terutama birokrasi sipil dan polisi tidak siap untuk menghadapi masalah pendudukan, merupakan suatu penilaian yang salah terhadap dua institusi tersebut. Hal ini yang membuat TNI AD ingin selalu mempertahankan masalah Binter.

Menurutnya, pernyataan Kasad, bahwa Binter sudah tidak terlibat dalam urusan politik, masih dalam tataran di atas kertas. Kekuatan Binter masih ada di lingkungan politik, hal ini bisa kita lihat misalnya pada saat rapat Muspida di daerah, Pangdam, Danrem masih merupakan kekuatan yang menentukan.

Dihadapkan dengan masalah pertahanan dalam konteks pertahanan tempur, Binter sudah tidak ada gunanya. Seharusnya Kodam, Korem, dan Kodim tidak ada lagi. Untuk gelar pasukan seharusnya dibuat Divisi, Brigade atau komando-komando yang sifatnya tempur, yang memang disiapkan untuk bertempur.

5. Sementara itu Burhan D. Magenda, mengatakan bahwa dengan adanya perkembangan global, maka strategi ketahanan nasional haruslah dengan memperkuat lembaga-lembaga yang ada serta mengatasi persoalan pangan dan energi. Dalam konteks ini pulalah pertahanan negara umumnya dan kegiatan Binter harus diarahkan untuk mendukung menguatnya ketahanan nasional.¹⁹ Dihadapkan dengan kondisi wilayah, maka bentuk-bentuk apa dari Binter untuk tiap wilayah dapat disesuaikan menurut keperluan geografinya, kepadatan penduduk serta pertimbangan lainnya. Ditambahkan oleh Magenda bahwa jika dalam masa awal reformasi, fungsi Binter telah disalahartikan dan didiskreditkan sehingga dikesankan sama dengan dwi fungsi ABRI, maka hal ini adalah suatu kekeliruan karena fungsi Binter adalah bagian dari Sistem Pertahanan Semesta, yang merupakan keunggulan dari negara-negara yang pernah bergerilya seperti China, Indonesia, Vietnam dan Aljazair. Bahkan dalam situasi sekarang, Binter banyak membantu masyarakat dalam situasi non-perang seperti bencana alam, kurang gizi dan kelaparan, pendidikan anti buta huruf serta pemberantasan penyakit menular seperti HIV/AIDS, flu burung, demam berdarah dan lain-lain.

Berkaitan dengan itu saat ini diperlukan suatu "trust building" terutama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan generasi muda, yang

¹⁹ Burhan D. Magenda, *Penyiapan Pertahanan Negara Ditinjau dari Strategi Ketahanan Nasional*, Makalah Seminar Nasional "Menyiapkan Pertahanan Negara Melalui Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Dalam Rangka Mengamankan Kepentingan Nasional Bersama Komponen Bangsa Lainnya" pada Tanggal 23 April 2008, di Auditorium FKUI Salemba Jakarta.

banyak salah mengerti baik karena kurangnya penjelasan dan komunikasi sosial maupun karena "generation gap". Kemudian juga diperlukan komunikasi dan koordinasi dengan instansi lain seperti pemerintah daerah dan Polri, sehingga bisa dicegah adanya kompetisi yang tidak sehat. Untuk itu perlu diaktifkan kembali peran koordinasi Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIDA) di semua tingkat, dari Bupati sampai kepala desa. Dengan demikian Binter bisa ditingkatkan koordinasi-nya dari "trust building" menjadi "capacity building". Koordinasi ini juga diperlukan untuk untuk mengontrol satuan tugas dan milisi yang dimiliki partai dan organisasi massa, sehingga TNI menjadi koordinator semua milisi, paramiliter dan Satgas.

6. Sedangkan Bantarto Bandoro, melihat bahwa setiap usaha membentuk wilayah pertahanan mengandung kesediaan dan keharusan masyarakat untuk mempertahankan negara. Jadi, kalau pembangunan kekuatan pertahanan adalah untuk mempertahankan negara, maka adalah logis jika kekuatan tersebut juga dibangun melalui pemberdayaan masyarakat. Mereka ini disiapkan untuk menghadapi setiap ancaman di wilayah pertahanan tertentu.²⁰

Dalam konteks Indonesia, masyarakat yang diberdayakan memainkan peranan yang strategis untuk menopang kohesivitas antar masyarakat dalam

²⁰ Bantarto Bandoro, *Kepentingan Nasional Indonesia dan Pemberdayaan Masyarakat : Beberapa Pemikiran Awal*, Makalah Seminar Nasional "Menyiapkan Pertahanan Negara Melalui Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Dalam Rangka Mengamankan Kepentingan Nasional Bersama Komponen Bangsa Lainnya" pada Tanggal 23 April 2008, di Auditorium FKUI Salemba Jakarta.

menghadapi setiap ancaman dan menopang keamanan nasional. Keamanan dan pertahanan seringkali menjadi semacam kerangka yang digunakan untuk memotret dan mengukur derajat stabilitas negara, baik pada level lokal, propinsi maupun nasional. Konsekuensinya setiap aktor pada ketiga level tersebut dituntut untuk bersinergi dan memainkan peran penting dalam membangun keamanan nasional.

Masih menurut Banatarto, bahwa ada beberapa mekanisme pemberdayaan masyarakat. *Pertama*, memobilisasi potensi masyarakat, peran semacam ini bisa dimainkan oleh aparaturnya TNI di daerah. *Kedua*, melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses penguatan wilayah-wilayah pertahanan, mekanisme ini juga dapat melibatkan unsur TNI. *Ketiga*, sinergi antara masyarakat dan unsur TNI dalam mempromosikan kepentingan nasional, masyarakat harus diberi porsi yang lebih besar dalam proses ini.

Kepentingan nasional memiliki beberapa komponen, salah satunya adalah ekonomi. Dalam konteks demikian, jika Binter ingin dilihat sebagai sebuah mekanisme untuk membina, mengerahkan dan mengendalikan wilayah pertahanan untuk kepentingan pertahanan negara di darat, maka mekanisme semacam itu juga harus memperhatikan aspek non-militer dari daerah. Peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah-wilayah pertahanan harus diberi prioritas. Daya tahan masyarakat dari segi ekonomi sampai batas tertentu juga akan menentukan keberhasilan pelaksanaan Binter.

Masyarakat yang "penuh daya" akan memberikan kontribusi bukan hanya kepada keberhasilan dan kelanggengan pelaksanaan Binter, tetapi juga pencapaian kepentingan nasional. Ini membuktikan bahwa kepentingan nasional sebagai inti dari hubungan yang erat antara pertahanan daerah, masyarakat dan TNI. Korelasi ini bisa divisualisasikan dalam segi tiga hubungan, dimana ketiga unsur itu saling terkait satu dengan yang lainnya. Untuk jelasnya selanjutnya lihat Tabel.2 dibawah ini.

Tabel.2 Intisari Pendapat Tentang Pembinaan Teritorial

| | | |
|----|-----------------------|---|
| 1 | M. Nurhasim | Pembinaan teritorial dimasukan dalam Operasi Militer SelainPerang (OMSP) dan dijalankan secara tidak secara periodik, akan tetapi secara sporadis atau insidental. |
| 2 | Sumardi | Pembinaan teritorial harus dijalankan karena tanpa Binter adalah sangat kecil kemungkinannya dapat melaksanakan pertahanan semesta. |
| 3 | Sri Nuryanti | Pembinaan Teritorial harus memperhatikan skala prioritas tentang wilayah, persoalan yang dihadapi dan perlu adanya sosialisasi tentang Binter itu sendiri |
| 4 | Amirudin Rajab | Pembinaan teritorial harus diubah dari terlibat menjadi tidak terlibat. |
| 5. | Burhan Djabir Magenda | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bentuk-bentuk dari Binter untuk tiap wilayah dapat disesuaikan menurut keperluan geografinya, kepadatan penduduk serta pertimbangan lainnya. ▪ Diperlukan suatu "trust building" terutama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan generasi muda, yang banyak salah mengerti baik karena kurangnya penjelasan dan komunikasi sosial maupun karena "generation gap". |
| 6 | Bantarto Bando | Pembinaan teritorial harus memperhatikan aspek non-militer dari daerah, misalnya dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. |

Mengacu pada berbagai pendapat tersebut maka penulis berpendapat bahwa pembinaan teritorial ke depan hendaknya segera diwadahi dalam payung hukum yang pasti, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dalam pelaksanaannya juga harus memperhatikan skala prioritas dihadapkan dengan kondisi, situasi dan permasalahan yang dihapai. Lebih penting lagi adalah jangan sampai terulang seperti yang terjadi pada beberapa waktu yang lalu dimana kegiatan pembinaan teritorial dijadikan alat politik dari penguasa. Aturan yang telah ditetapkan dalam pokok-pokok penyelenggaraan pembinaan teritorial harus menjadi pedoman yang harus dipegang dengan disiplin, sehingga pembinaan teritorial tidak terpeleset seperti pada masa yang lalu, (32 tahun jaman ORBA) yang akan meninggalkan bekas yang tidak mudah menghapusnya. Kepercayaan yang mulai terbangun, hendaknya dapat dimanfaatkan untuk modal bagi implementasi pelaksanaan pembinaan teritorial di lapangan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk peran TNI AD yang diimplentasikan dalam kegiatan pembinaan teritorial dalam mendukung terciptanya ketahanan nasional dapat berupa kegiatan fisik dan non fisik. Kegiatan fisik antara lain dalam bentuk pembangunan sarana jalan, pembagunan pos keamanan lingkungan, pemanfaatan lahan kosong, budidaya tanaman pertanian, budidaya peternakan, pembersihan lingkungan, gerakan penghijauan dan lain-lain. Sedangkan kegiatan non fisik diantaranya berupa penyuluhan tentang bela negara, penyuluhan wawasan kebangsaan, penyuluhan bahaya laten komunis, bahaya penyalahgunaan Narkoba, pembentukan mitra Babinsa dan juga penyuluhan sadar hukum.
2. Dalam pelaksanaan Binter terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu (1) masalah payung hukum yang sampai saat ini belum ada. (2) Binter belum tersosialisasi secara luas sehingga belum dapat dipahami secara jelas oleh masyarakat dan (3) adanya rasa traumatik oleh sekelompok masyarakat akibat pelaksanaan Binter pada masa lalu yang tidak sesuai dengan tata cara yang ditetapkan.

3. Binter direvitalisasi sehingga cocok dan sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini. Binter agar dimasukkan menjadi bagian dari OMSP, dan dijalankan dengan menetapkan skala prioritas, misalnya untuk daerah konflik, daerah rawan konflik, daerah perbatasan dan daerah tertinggal/terbelakang, serta dengan menetapkan prioritas permasalahan dengan disertai jangka waktu pelaksanaan dan target yang akan dicapai sebagai ukuran keberhasilan serta Binter harus memperhatikan aspek non militer di daerah.

B. Saran

1. TNI khususnya TNI AD perlu kiranya segera memikirkan terbentuknya landasan hukum atau aturan yang baku bagi pembinaan teritorial sehingga mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. TNI khususnya TNI AD harus segera melakukan revitalisasi pembinaan teritorial, dengan menetapkan skala prioritas permasalahan dan prioritas lokasi disertai adanya pedoman jangka waktu pelaksanaan dan target yang harus dicapai dalam setiap program. Bentuk-bentuk Binter untuk tiap wilayah dapat disesuaikan menurut kepentingan geografinya, kepadatan penduduknya dan pertimbangan lainnya.
3. TNI khususnya TNI AD perlu melakukan upaya pengenalan atau sosialisasi tentang pembinaan teritorial misalnya dengan melakukan seminar atau diskusi panel yang melibatkan peran serta para akademisi dan juga pemerhati masalah militer dari kalangan sipil dan perguruan tinggi.

4. TNI khususnya TNI AD harus menjaga kuat komitmennya untuk tidak lagi memanfaatkan pembinaan teritorial sebagai media untuk kembali ke panggung politik seperti pada masa sebelumnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Adam Robert, Nations In Arms, The Theory and Practice of Territorial Defence, Second Edition, St. Martin's Press, New York, 1986.
- Armaidy Armawi, Ketahanan Nasional dan Pengembangannya, dalam jurnal Panca Arga Edisi 2 Tahun I Nopember 2000.
- Barnest MC, Company Organization : Theory and Practice, London, George Allen & Unwin Ltd, 1969.
- Budi S Satari, Pendidikan Bela Negara dan Relevansinya di Era Reformasi, Warta Departemen Pertahanan, Vol 15 no 4, Nopember-Desember 2003
- Bard E O'Neill, Political Violence and Insurgency: A Comparative Approach, Phoenix Press, Colorado, 1974.
- Chaidir Basrie, Bela Negara, Jakarta, UI Pres, 1998.
- Departemen Pertahanan RI, Menata Sistem Pertahanan, Jakarta, 2005.
- Edy Prasetyono, Reinterpretasi Sistem Pertahanan Nasional Indonesia, dalam Bantarto Bandoro (ed), Perspektif Baru Keamanan Nasional, Jakarta, CSIS, 2005.
- Fitria Mega, Peran Keluarga dan Lingkungan Kerja Terhadap Perkembangan Karier Polwan, Jakarta, Tesis Program Magister Pasca Sarjana UI, 2006.
- Freek Colombijn and J. Thomas Lindblad (eds), Roots of Violence in Indonesia, Netherland, KITLV Press, 2002.
- Homans G, dalam Truliyanti Sri hastuti Sutrasno, Hubungan Antara Perbedaan Persepsi Peran-Harapan Peran Dengan Prestasi, Jakarta, Tesis S-2 Universitas Indonesia, 1987.
- HJM. Noordhuizen, Civil-Military Cooperation dalam Purbo. S Suwondo, Sejarah Perang Dunia, Seskoad, Bandung, 2007.
- John Baylis Ken Booth dan John Garnet Phil Williams, Contemporary Strategy: Theories and Policies, Holmes & Meier Publishers Inc, New York, 1975.
- Mardalis, Metode Penelitian : Suatu Pendekatan Proposal, Jakarta, Bumi Aksara, Cet pertama, 1990.
- Markas Besar TNI AD, Buku Petunjuk Induk tentang Teritorial, Jakarta, 2002.

- Mardikawoto, Binter Diperlukan untuk Mewujudkan Sishanta, Buletin Teritorial, Edisi Nomor 03 Tahun 2005, Staf Teritorial TNI AD, Jakarta, 2005.
- M. Riefqi Muna (ed), Likuidasi Komando Teritorial dan Pertahanan Nasional, Ridep Institut, Jakarta, 2002.
- Prasetya Irawan, Logika dan Prosedur Penelitian, Jakarta, STIA-LAN Press, 2002.
- Purbo S. Suwondo, Beberapa Catatan dari Sejarah Pembinaan Teritorial, Majalah Karya Wira Jati No. 60 Tahun 1986.
- Purbo S. Suwondo, Sekuriti Nasional dengan Pemerintah Daerah dan Pembinaan Wilayah sebagai Satu Aspek dalam Ketahanan Nasional, Jakarta, 2002.
- Purbo S. Suwondo, Government and Rebellions in Southeast Asia, dalam Chandran Jeshurun(ed) ISEAS, Singapura, 1985.
- Rianto Adi, Heru Prasadja, Langkah-Langkah Penelitian Sosial, Jakarta, Penerbit Arcan, 1991.
- RM Sunardi, Pembinaan Kebangsaan Indonesia (Dalam Rangka Menjaga Integritas Negara dan Pembentukan Jati Diri Bangsa,) Jakarta, PT Kuaternita Aditama, 2005.
- RM. Sunardi RM, Pembinaan Ketahanan Bangsa, PT. Kuaternita Aditama, Jakarta, 2005.
- Robert Thompson, Revolutionary War, dalam Arthur F. Lykhe (ed), Military Strategy: Theory and Application, United State Army War College, Carlisle Barracks PA, 1989.
- Syarifudin Tippe, Binter dalam Perspektif Empiris dan Dinamis, Seskoad, Bandung, 2003.
- Sabin, TR, dalam Role Theory dalam Lindzey, Handbook of Social Psychology, Vol I, third printing, Massachussets USA, Addison Wesley Publishing Co, 1954
- Sayidiman Suryohadiprojo, Si Vis Pacem Para Bellum, Membangun Pertahanan Negara Yang Efektif, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- Staf G-5/Teritorial Hankam, Doktrin Teritorial Nusantara, Buku I dan II, Jakarta, 1973.
- Staf Teritorial Angkatan Darat, Pokok-pokok Penyelenggaraan Pembinaan Teritorial TNI AD, Jakarta, 2003.
- Tjokropranolo, Panglima Besar Jenderal Soedirman, Pemimpin Pendobrak Terakhir Penjajahan di Indonesia, PT Surya Persindo, Jakarta, 1992.
- Wan Usman, Daya Tahan Bangsa, Program Studi Pengkajian Ketahanan Nasional Program Pasca Sarjana UI, Jakarta, 2003.

Makalah/Paper

Alwin Nurdin, *Batalyon Dalam Operasi Anti-Gerilya Divisi Siliwangi/Territorium-III/Jawa Barat Juni 1954 s.d Juni 1956*, Naskah Sarasehan Sehari Dalam Rangka Peringatan HUT ke-53 Divisi Siliwangi, Bandung, 20 Mei 1999.

Bantarto Bandoro, *Keuntungan Nasional Indonesia dan Pemberdayaan Masyarakat : Beberapa Pemikiran Awal*, Makalah Seminar Nasional “Menyiapkan Pertahanan Negara Melalui Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Dalam Rangka Mengamankan Keuntungan Nasional Bersama Komponen Bangsa Lainnya” pada Tanggal 23 April 2008.

Burhan D Magenda, *Strategi dan Potensi Pertahanan Indonesia*, Pokok-pokok pikiran di depan Forum Komando Resimen Mahasiswa Nasional, 2 September 2007.

_____, *Pertahanan Negara Ditinjau dari Strategi Ketahanan Nasional*, Makalah Seminar Nasional “Menyiapkan Pertahanan Negara Melalui Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Dalam Rangka Mengamankan Keuntungan Nasional Bersama Komponen Bangsa Lainnya”, Jakarta, 23 April 2008.

Juwono Sudarsono, *Strategi Pertahanan Nasional : Revitaliasi Peran Perguruan Tinggi dalam Pengembangan Strategi Pertahanan Negara*, Makalah Seminar Nasional Dies 56 Tahun UGM : Strategi Pertahanan Nasional, Yogyakarta, 17 Desember 2005

Purbo S. Suwondo, *The Genesis of The Indonesian National Army and some political implication*, Makalah Seminar Internasional di Belanda tanggal 27-29 Maret 1996.

Wan Usman, *Makalah Seminar Kajian Intelijen Strategis*, Universitas Indonesia, Jakarta, 9 Maret 2006.

Ginandjar Kartasmita, *Pemberdayaan Masyarakat : Konsep Pembangunan yang Berakar pada Masyarakat*, Makalah Sarasehan DPD Golkar TK I Jawa Timur, Surabaya, 14 Maret 1997.

Subejo dan Supriyanto, *Metodologi Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat*, disampaikan pada Kuliah Intensif Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan, Study On Rural Empowerment, Dewan Mahasiswa Fakultas Pertanian UGM Tanggal 16 Mei 2004.

Peraturan:

Undang-undang No. 3 Tahun 2002, tentang Pertahanan
Undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI

Media Cetak:

Kompas, 23 Oktober 2004

Majalah Yudhagama No. 52 Tahun XVIII April 1997, Mabes TNI AD, Jakarta.

Majalah Palagan Nomor 26 Tahun VI Edisi Maret 2006, Mabes TNI AD, Jakarta.

Majalah Patriot, Edisi No.36 Tahun-IX Januari 2008, Mabes TNI AD, Jakarta.

Buletin Interaksi Teritorial, Edisi 2, April 2007, Pusterad, Jakarta.

Buletin Interaksi Teritorial Edisi 3, Mei 2007, Pusterad, Jakarta.

Buletin Interaksi Teritorial, Edisi 4, Juni 2007, Pusterad, Jakarta.

Buletin Interaksi Teritorial Edisi 5, Juli 2007, Pusterad, Jakarta

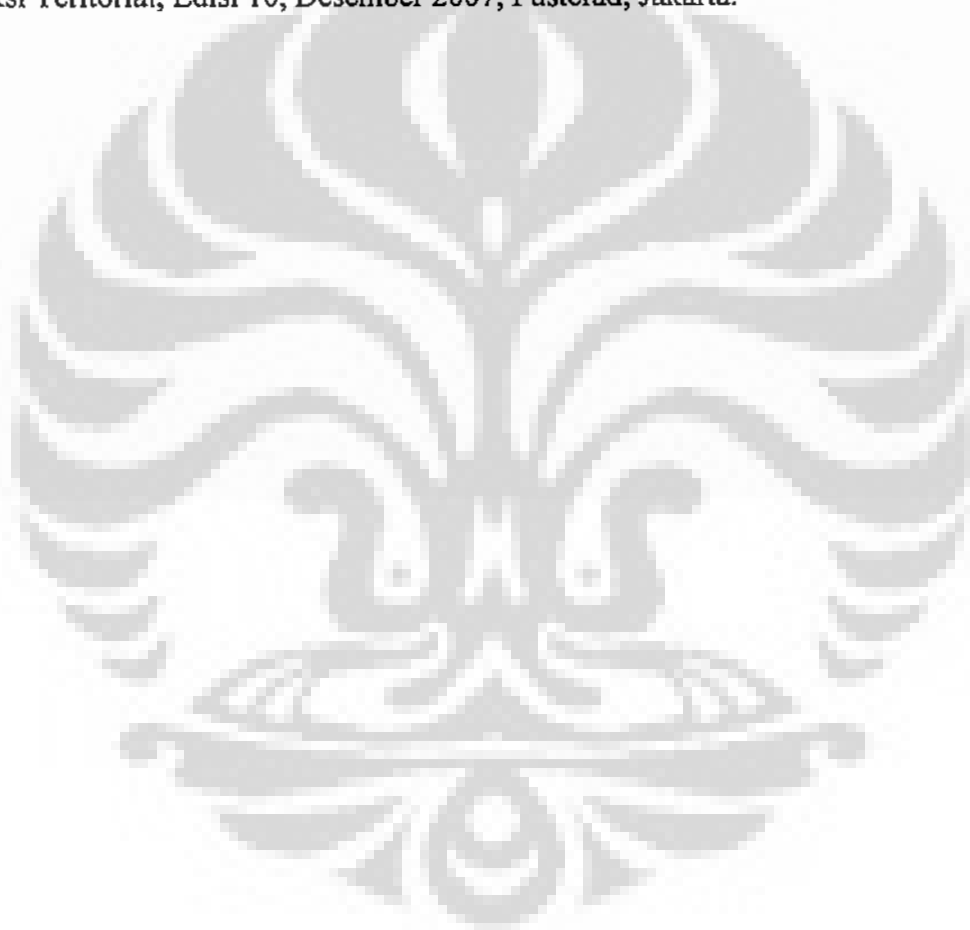
Buletin Interaksi Teritorial Edisi 6, Agustus 2007 Pusterad, Jakarta.

Buletin Interaksi Teritorial Edisi7, September 2007, Pusterad, Jakarta.

Buletin Interaksi Teritorial, Edisi 8, Oktober 2007, Pusterad, Jakarta.

Buletin Interaksi Teritorial, Edisi 9, Nopember 2007, Pusterad, Jakarta.

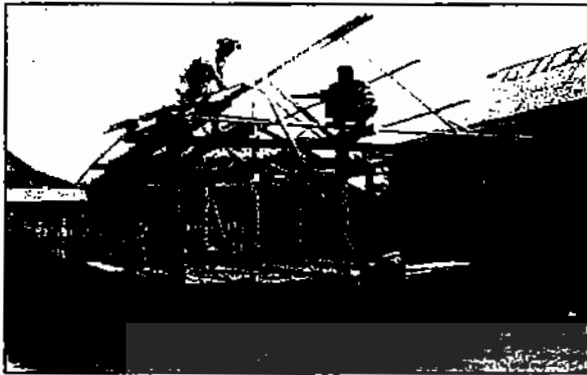
Buletin Interaksi Teritorial, Edisi 10, Desember 2007, Pusterad, Jakarta.





LAMPIRAN

LAMPIRAN-1 : DOKUMENTASI KEGLIATAN BINTER DI JAJARAN TNI AD



Karya Bahkti bedah rumah dengan program Aladin oleh Kodim 1420/Sidrap Sulawesi Selatan



Bhakti sosial pengobata massal oleh Kodim 0413/Bangka dalam rangka Hari Juang Kartika



Bhakti sosial pengobata massal oleh Kodim 0413/Bangka dalam rangka Hari Juang Kartika



Bhakti sosial pengobata massal oleh Kodim 0413/Bangka dalam rangka Hari Juang Kartika



Pembuatan PLTA di Ds.Campaga Kec. Tompobulu Kab. Bantaeng yang ddimotori oleh Babinsa



Masyarakat sedang menyiapkan Peralatan PLTA di Ds.Campaga Kec. Tompobulu Kab. Bantaeng.



Masyarakat sedang memikul Peralatan PLTA yang akan dipasang di Ds.Campaga Kec. Tompobulu Kab. Bantaeng.



Pengenalan wawasan kebangsaan oleh Kodim 0705/Magelang untuk meningkatkan sumber daya manusia



Pengenalan wawasan kebangsaan oleh Kodim 0705/Magelang untuk meningkatkan sumber daya manusia



Upacara pembukaan gerakan penanaman hutan yang dilaksanakan oleh Kodim 0815/ Mojokerto bersama masyarakat



Upacara pembukaan gerakan penanaman hutan yang dilaksanakan oleh Kodim 0815/ Mojokerto bersama masyarakat



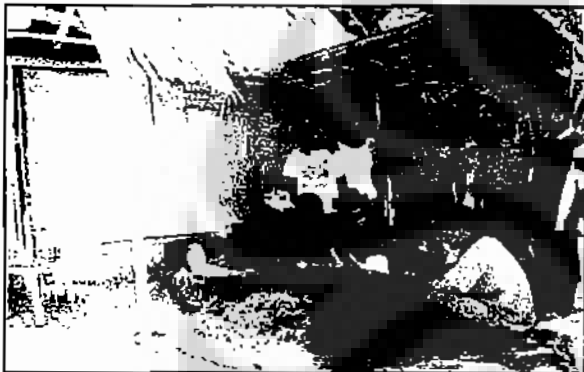
Penanaman pohon dilahan kritis oleh anggota Kodim 0815/Mojokerto dalam rangka gerakan nasional rehabilitasi hutan dan lahan



Budidaya peternakan tumpangsari yang digalakan oleh Kodim 1617/Jembrana Kodam IX/Udayana



Budidaya peternakan tumpangsari yang digalakan oleh Kodim 1617/Jembrana Kodam IX/Udayana



Budidaya tanaman rumput laut yang dimotori oleh Kodim 1302/Minahasa Sulawesi Utara



Budidaya tanaman rumput laut yang dimotori oleh Kodim 1302/Minahasa Sulawesi Utara



Penyerahan bibit tanaman secara simbolis oleh Irup pada kegiatan GNRHL diwilayah Kodim 0815/Mojokerto



Penanaman pohon secara simbolis oleh Muspida Kab. Mojokerto pada acara GNRHL di wilayah Kodim 0815/Mojokerto



Pengerasan badan jalan sepanjang 2Km oleh Kodim 0508/Bekasi bersama masyarakat pada program TMMMD ke-78 TA.2007



Kegiatan Karya Bhakti Kali Bersih yang dilaksanakan oleh Kodim 0418/Palembang bersama masyarakat



Karya Bhakti oleh Kodim 1013/Muara Teweh dalam rangka menyambut HUT ke-57 Kodam VI/Tanjungpura



Karya Bhakti pembersihan enceng gondok oleh Kodim 1302/Tondano bersama dengan instansi terkait dan masyarakat



Penanaman pohon oleh Muspida Kab. Mojokerto pada kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan



Penyerahan secara simbolis peralatan kebersihan oleh Dandim 1302/Minahasa menandai dimulainya pembersihan Danau Tondano



Karya Bhakti pembersihan enceng gondok oleh Kodim 1302/Tondano bersama dengan instansi terkait dan masyarakat



Karya Bhakti pembersihan enceng gondok oleh Kodim 1302/Tondano bersama dengan instansi terkait dan masyarakat



Kegiatan TNI Manunggal KB Kesehatan yang dilaksanakan oleh Kodim 0508/Bekasi



Kegiatan Karya Bhakti dalam rangka TMMD Sengkuyung II di Kab. Demak yang dimotori oleh Kodim 0716/Demak



Kegiatan Karya Bhakti dalam rangka TMMD Sengkuyung II di Kab. Demak yang dimotori oleh Kodim 0716/Demak



Peresmian jalan beton oleh wakil Bupati Demak yang dikerjakan selama TMMD Sengkuyung II TA 2007



Peresmian penggunaan jembatan balley oleh Dandim 0201/Medan yang untuk menunjang operasional PLN



Peresmian penggunaan jembatan balley oleh Dandim 0201/Medan yang untuk menunjang operasional PLN



Pengenalan wawasan kebangsaan oleh Kodim 0812/Lamongan untuk meningkatkan sumber daya manusia



Pelestarian Kesenian Kuda Kepang yang dimotori oleh Babinsa Ds. Katumbangan Lemo Kec Campagian Polewali Mandar



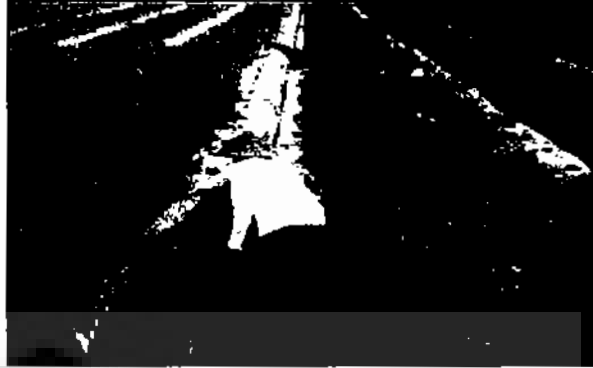
Pelestarian Kesenian Tari Waloka yang dimotori oleh 1613/Sumba Kodam IX/ Udayana Bali



Pelestarian Kesenian Tari Kataga yang dimotori oleh 1613/Sumba Kodam IX/ Udayana Bali



Pelestarian Kesenian Tari Waloka yang dimotori oleh 1613/Sumba Kodam IX/ Udayana Bali



Program pemberdayaan tanaman buah Semangka yang dimotori oleh Kodim 1617/Jembrana Bali



Program pemberdayaan tanaman buah Semangka yang dimotori oleh Kodim 1617/Jembrana Bali



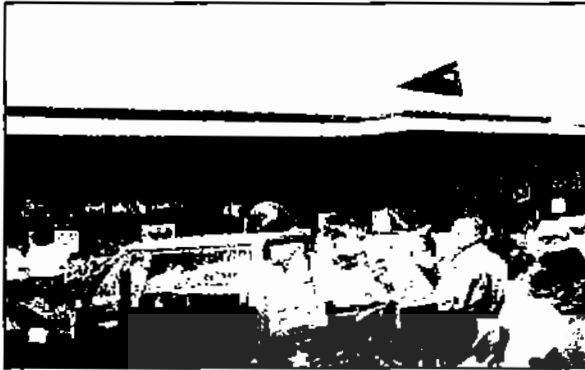
Program pemberdayaan Tenun Cag-cag Semangka yang dimotori oleh Kodim 1617/Jembrana Bali



Program motor pintar yang dilaksanakan Kodim 1202/Singkawang untuk membantu mencerdaskan masyarakat terpencil



Program motor pintar yang dilaksanakan Kodim 1202/Singkawang untuk membantu mencerdaskan masyarakat terpencil



Program motor pintar yang dilaksanakan Kodim 1202/Singkawang untuk membantu mencerdaskan masyarakat terpencil



Pengerukan Sungai Bandengan yang dilaksanakan Kodim 0715?kendal bekerja sama dengan Dinas PU dan dibantu rakyat



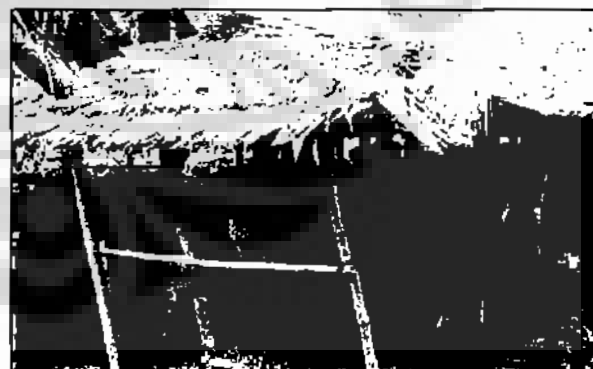
Pembuatan jalan beton bertulang sepanjang 1030 meter dalam rangka Karya Bhakti Mandiri Kodim 0716/Demak



Pembuatan jalan jembatan bersayap sepanjang 6,5 meter dalam rangka Karya Bhakti Mandiri Kodim 0716/Demak



Jalan beton bertulang sepanjang 1030 hasil Karya Bhakti Mandiri Kodim 0716/Demak bersama masyarakat



Penggalakan budidaya peternakan sapi potong yang dimotori oleh Kodim 1615/ Lombok Timur Kodam IX/Udayana



Anggota Kodim 0716/Demak bersama masyarakat sedang mengerjakan rehabilitasi jembatan beton bertulang



Kunjungan oleh Bintara Pembina Desa Koramil 1615-03/Selong Lombok Timur kepada kelompok peternak sapi



Karya Bhakti yang dilaksanakan oleh Kodim 1306/Donggala dalam rangka TMMD ke-78 di daerah Palu



Perbaikan rumah penduduk selama pelaksanaan program TMMD ke-78 Th.2007 di kota Palu



Pembuatan jalan dalam Program TMMD ke-78 di Kodim 1306/Donggala Sulawesi Tengah



Penggalakan budidaya peternakan sapi potong yang dimotori oleh Kodim 1615/Lombok Timur Kodam IX/Udayana

Lampiran -2 :Pokok-pokok Penyelenggaraan Pembinaan Teritorial TNI AD

1. Tugas TNI AD di Bidang Pembinaan Teritorial

a. Kedudukan satuan TNI AD. TNI AD sebagai salah satu bagian dari TNI, terorganisir dalam bentuk satuan tempur, satuan bantuan tempur, satuan bantuan administrasi dan Komando Kewilayahan (baca Koter) berdasarkan fungsi utama TNI AD. Disamping mengemban fungsi teknis yang menjadi tataran kewenangan dan merupakan tugas pokok, mengemban pula fungsi organik militer. Dengan demikian kedudukan satuan TNI AD di suatu wilayah disamping melaksanakan tugas pokoknya sebagai Pembina teknis pertempuran, juga melaksanakan kegiatan pembinaan teritorial di wilayah sesuai fungsi dan tanggung jawabnya dalam mendukung pencapaian tugas pokok.

b. Tugas Pokok, Tugas Bantuan dan Tugas-Tugas TNI AD.

1) Tugas Pokok TNI AD. Sebagai bagian integral dari TNI bertugas pokok menegakkan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah darat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia di wilayah daratan dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Disamping itu TNI AD sebagai bagian integral dari TNI, melaksanakan tugas Negara dan menyelenggarakan pendidikan wajib militer bala darat bagi warga Negara yang diatur undang-undang.

2) Tugas Bantuan TNI AD. Sesuai penjabaran tugas pokok TNI AD, maka tugas bantuan yang dilaksanakan TNI AD adalah:

- a) Membantu menyelenggarakan kegiatan kemanusiaan (civic mission).
- b) Memberikan bantuan kepada POLRI dalam rangka tugas keamanan atas permintaan yang diatur dalam undang-undang.
- c) Membantu secara aktif tugas pemeliharaan perdamaian dunia (peace keeping operation) di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

3) Tugas-tugas TNI AD, mengalir dari tugas pokok dan tugas bantuan tersebut, maka tugas-tugas TNI AD dirumuskan sebagai berikut:

- a) Menegakkan kedaulatan Negara di wilayah daratan.
- b) Menegakkan keutuhan wilayah Negara di daratan.
- c) Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia di wilayah daratan
- d) Melaksanakan tugas Negara dalam menyelenggarakan pendidikan dan latihan wajib militer bala darat bagi warga Negara yang diatur dalam undang-undang.
- e) Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan atas permintaan yang diatur dalam undang-undang

- f) Ikut aktif dalam kegiatan kemanusiaan (civic mission).
- g) Ikut aktif dalam tugas tugas pemeliharaan perdamaian dunia (peace keeping operation) di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa.

c. Fungsi-fungsi TNI AD. Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut maka TNI AD menyelenggarakan fungsi utama yaitu:

- 1) Pertempuran, yaitu menyelenggarakan pertempuran di darat sebagai bagian dari suatu komando operasi gabungan maupun dalam bentuk operasi darat secara mandiri dalam rangka pertahanan negara.
- 2) Pembinaan Kesatuan.
 - a) Penyiapan kekuatan, yaitu menyelenggarakan penyiapan kekuatan satuan TNI AD yang mempunyai kemampuan intelijen, tempur serta dukungan dalam rangka penyelenggaraan pertahanan Negara di darat yang bertujuan untuk mempunyai kemantapan dan kesiapan operasional.
 - b) Pengembangan kekuatan, yaitu mengembangkan kekuatan dan kemampuan TNI AD yang professional dalam rangka penyelenggaraan pertahanan negara di darat.
- 3) Administrasi, yaitu menyelenggarakan pembinaan personel, pembinaan tenaga manusia, materiel, instalasi, jasa, keuangan, informasi dan administrasi umum untuk mendukung pembinaan dan penggunaan kekuatan TNI AD.

d. Tugas-tugas Bidang Teritorial. Lingkup teritorial sangat luas, menyangkut segala aspek yang meliputi unsur geografi, demografi dan kondisi sosial masyarakat. Oleh karenanya, pembinaannya harus dilakukan secara komprehensif dan terus menerus. Jika dikaitkan dengan kepentingan pertahanan nasional, maka penanganan masalah teritorial harus dilakukan jauh sebelum perang, selama perang dan setelah perang. Komando kewilayahan (baca koter) dalam melaksanakan pembinaan teritorial, dilaksanakan secara proporsional dan professional tanpa terlibat dalam politik praktis dan tidak mencampuri urusan instansi lain. TNI AD bukanlah alat kekuasaan, akan tetapi merupakan alat pertahanan negara yang berdasarkan hukum negara.

Dalam pelaksanaannya, pembinaan teritorial dibedakan menjadi dua. Pertama, komando kewilayahan (baca koter) melaksanakan tugas sesuai dengan wilayahnya dimulai dari tingkat yang paling bawah yaitu Bintara Pembina Desa (babinsa) sampai dengan yang paling tinggi, Kodam. Kedua, satuan non kewilayahan, melaksanakan tugas pembinaan teritorial terbatas sesuai arahan komandan komando kewilayahan, agar supaya tidak terjadi benturan dalam pelaksanaan tugasnya.

Tugas satuan maupun aparat kewilayahan selanjutnya ditentukan sebagai berikut:

- 1) Markas Besar TNI AD, menyelenggarakan fungsi staf umum di bidang pembinaan teritorial yang meliputi:
 - a) Pembinaan geografi yaitu menyelenggarakan segala usaha, pekerjaan dan kegiatan mengenai penyusunan rencana

umum tata ruang wilayah pertahanan, logistik wilayah, pendayagunaan sumber daya alam/buatan, sarana dan prasarana nasional, pelestarian lingkungan hidup serta penanggulangan bencana alam dalam rangka mewujudkan ruang juang yang tangguh bagi kepentingan pertahanan Negara di daratan.

b) Pembinaan demografi yaitu menyelenggarakan segala usaha, pekerjaan dan kegiatan mengenai pembinaan pertumbuhan, penyebaran, komposisi dan komunikasi penduduk, komponen cadangan dan komponen pendukung pertahanan Negara serta peningkatan kemampuan bela Negara dalam rangka mewujudkan alat juang yang tangguh bagi kepentingan pertahanan Negara di daratan.

c) Pembinaan kondisi sosial yaitu menyelenggarakan segala usaha, pekerjaan dan kegiatan mengenai pementapan kondisi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan dalam rangka mewujudkan kondisi juang yang tangguh bagi kepentingan pertahanan negara di daratan.

d) Pembinaan komunikasi sosial yaitu menyelenggarakan segala usaha, pekerjaan dan kegiatan mengenai komunikasi sosial sebagai metode dan komunikasi sosial sebagai kemampuan aparat teritorial dalam berkomunikasi dengan seluruh komponen masyarakat dan aparat pemerintah terkait

guna terwujudnya saling pengertian dan kebersamaan yang memungkinkan timbulnya keinginan masyarakat untuk berpartisipasi dibidang pertahanan Negara di daratan.

e) Pembinaan Bhakti TNI yaitu menyelenggarakan segala usaha, pekerjaan dan kegiatan mengenai pelaksanaan Operasi Bhakti TNI sesuai wewenang yang dilimpahkan Panglima TNI dan Karya Bhakti dalam rangka mendukung pembangunan nasional dan peningkatan kemandirian TNI-Rakyat yang berdaya guna bagi kepentingan pertahanan Negara di daratan.

f) Pembinaan ketahanan wilayah yaitu menyelenggarakan segala usaha, pekerjaan dan kegiatan mengenai penyusunan, pengembangan, pengerahan dan pengendalian potensi wilayah dalam rangka mewujudkan stabilitas pertahanan yang mantap dan dinamis bagi kepentingan pertahanan Negara di daratan.

2) Komando Daerah Militer, menyelenggarakan pembinaan teritorial di wilayah yang meliputi:

a) Merencanakan dan menyiapkan rencana umum tata ruang wilayah pertahanan yang dipadukan dengan rencana pembangunan daerah dalam rangka menyiapkan daerah operasi untuk mendukung keberhasilan operasi tempur.

b) Menyelenggarakan wajib militer bagi warga Negara dan melatih rakyat dalam rangka menyiapkan komponen cadangan untuk kepentingan pertahanan Negara di darat.

- c) Menyelenggarakan komunikasi sosial dengan seluruh komponen masyarakat di wilayahnya, guna menunjang kemanunggalan TNI-Rakyat dalam rangka menciptakan kebersamaan pelaksanaan pertahanan Negara sesuai bidang masing-masing.
 - d) Merencanakan dan menyusun pelaksanaan Bhakti TNI sesuai permintaan pemerintah daerah.
 - e) Menyelenggarakan tugas-tugas kemanusiaan (civic mission)
 - f) Menyelenggarakan dan melaksanakan dukungan bantuan administrasi bagi instansi/organisasi/badan yang berada di daerahnya dalam rangka unsur pelayanan daerah.
- 3) Komando Resort Militer, menyelenggarakan pembinaan teritorial di wilayah yang meliputi:
- a) Merencanakan, menyusun dan menyiapkan rencana umum tata ruang wilayah pertahanan yang dipadukan dengan rencana pembangunan daerah dalam rangka menyiapkan daerah pangkal perlawanan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan operasi tempur.
 - b) Menyelenggarakan dan melatih rakyat yang dikoordinasikan dengan instansi terkait di daerahnya dalam rangka menyiapkan komponen cadangan maupun komponen pendukung pertahanan negara untuk kepentingan pertahanan.

- c) Menyelenggarakan komunikasi sosial dengan seluruh komponen masyarakat di wilayahnya, guna mendukung kemanunggalan TNI-Rakyat.
 - d) Menyusun dan mengajukan rencana Operasi Bhakti ke Komando Atas, sesuai permintaan pemerintah daerah.
 - e) Menyelenggarakan tugas-tugas kemanusiaan (civic mission)
 - f) Menyelenggarakan dan melaksanakan dukungan bantuan administrasi bagi instansi/organisasi/badan yang berada di wilayahnya dalam rangka unsur pelayanan wilayah
 - g) Merencanakan, menyusun, mengerahkan dan mengendalikan operasi/kegiatan teritorial untuk menyiapkan daya tangkal dan kemampuan perlawanan wilayah dalam rangka pertahanan daerah.
- 4) Komando Distrik Militer, menyelenggarakan pembinaan teritorial di wilayah, yang meliputi:
- a) Merencanakan dan menyiapkan rencana umum tata ruang wilayah pertahanan yang dipadukan dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dalam rangka pembinaan sumber daya pertahanan Negara di wilayahnya untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan operasi tempur.

- b) Menyelenggarakan pembinaan perlawanan rakyat dalam rangka menyiapkan komponen cadangan dan komponen pendukung pertahanan Negara.
 - c) Menyelenggarakan komunikasi sosial dan pembinaan keluarga besar TNI di daerahnya dalam rangka mendukung kemandirian TNI-Rakyat.
 - d) Merencanakan dan menyusun pelaksanaan Bhakti TNI sesuai dengan permintaan pemerintah daerah.
 - e) Menyelenggarakan tugas-tugas kemanusiaan (civic mission)
 - f) Menyiapkan data teritorial di daerahnya untuk kepentingan pertahanan negara di darat.
- 5) Komando Rayon Militer, menyelenggarakan pembinaan teritorial di wilayah, yang meliputi:
- a) Melaksanakan pembinaan teritorial sesuai petunjuk Komandan Kodim.
 - b) Melaksanakan pembinaan data geografi yang meliputi fasilitas dan prasarana pertahanan di pedesaan, medan-medan yang mempunyai nilai taktis/pertahanan, medan latihan dan pangkal perlawanan dalam rangka penyiapan pertahanan darat di wilayahnya.

- c) Melaksanakan pembinaan data demografi berupa pencatatan dan pengendalian komponen cadangan dan komponen pendukung.
 - d) Melaksanakan pembinaan data kondisi sosial berupa pencatatan dan pengendalian Ipoleksosbudmil.
 - e) Melaksanakan komunikasi sosial dengan seluruh komponen masyarakat di wilayahnya, guna mendukung kemandirian TNI-Rakyat.
 - f) Membantu pengawasan dan pengurusan pengungsi akibat bencana alam, kerusuhan sosial dan korban perang sesuai petunjuk Komandan Kodim.
 - g) Melaksanakan latihan pendahuluan dasar kemiliteran bagi komponen cadangan dan komponen pendukung pertahanan negara.
- 6) Bintara Pembina Desa. Menyelenggarakan pembinaan teritorial di wilayah, yang meliputi:
- a) Melatih satuan perlawanan rakyat.
 - b) Memimpin perlawanan rakyat pedesaan.
 - c) Memberikan penyuluhan kesadaran bela negara.
 - d) Memberikan penyuluhan pembangunan masyarakat desa di bidang pertahanan darat.
- e. Sesuai fungsinya, TNI AD sebagai penyelenggara pertahanan negara di wilayah darat sebagai berikut:

1) Masa damai. Tugas-tugas TNI AD di bidang teritorial pada masa damai meliputi:

a) Tugas yang berkaitan dengan unsur geografi.

(1) Melakukan penilaian dari aspek militer terhadap seluruh geografi di Indonesia.

(2) Melakukan pendataan geografi berkaitan dengan kepentingan militer diseluruh wilayah Indonesia.

(3) Memberikan masukan kepada pemerintah tentang tata ruang wilayah nasional dan daerah, sehingga menjamin terpeliharanya ruang juang untuk penyelenggaraan pertahanan negara.

(4) Melaksanakan penanggulangan bencana alam bersama komponen bangsa lainnya.

b) Tugas-tugas yang berkaitan dengan unsur demografi.

(1) Membantu pelaksanaan sosialisasi kesadaran bernegara dalam mendukung ketahanan nasional pada setiap strata pendekatan yang diselenggarakan oleh Departemen Pendidikan.

(2) Membantu pelaksanaan sosialisasi kesadaran bela negara masyarakat di lingkungan pemukiman, pendidikan dan pekerjaan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan antar departemen.

(3) Membantu pemerintah dalam pelaksanaan pendataan keluarga prasejahtera, keluarga sejahtera I, keluarga sejahtera II dan keluarga sejahtera III dalam rangka mewujudkan kemampuan awal bela negara guna mendukung penyiapan dan kemampuan bela negara.

(4) Melaksanakan sosialisasi dan membantu terwujudnya penyebaran penduduk secara merata dan seimbang di seluruh wilayah dengan memperhatikan keadaan daerah pangkal perlawanan.

(5) Melaksanakan koordinasi dengan instansi fungsional terkait dalam rangka pendataan penduduk di seluruh wilayah nasional menurut tingkatan umur, pendidikan, profesi, angkatan kerja dan status kewarganegaraan.

(6) Melaksanakan pendataan tentang calon kekuatan komponen cadangan dan komponen pendukung dalam sishanta.

(7) Melaksanakan koordinasi dan pendataan Balacad di pusat dan daerah.

(8) Melaksanakan sosialisasi kecintaan terhadap tanah air.

c) Tugas-tugas yang berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat:

- (1) Melaksanakan pemantauan terhadap perkembangan kondisi sosial masyarakat.
 - (2) Membantu pemerintah/instansi lain dalam mengatasi permasalahan sosial yang timbul.
- d) Tugas-tugas yang berkaitan dengan komunikasi sosial adalah melaksanakan komunikasi sosial dengan seluruh komponen masyarakat di wilayah.
- e) Tugas-tugas yang berkaitan dengan Bhakti TNI
- (1) Karya Bhakti. Kegiatan yang dilakukan oleh satuan dan masyarakat dengan sasaran fasilitas umum dan sosial dengan tujuan membantu masyarakat untuk mendorong dan memelihara fasilitas yang ada serta memantapkan kemandirian TNI-Rakyat. Dilaksanakan secara rutin tiap bulan dan insidental pada hari-hari besar nasional maupun hari ulang tahun satuan.
 - (2) Operasi Bhakti. Kegiatan yang melibatkan TNI, departemen terkait, lembaga pemerintah non-departemen, Pemda dan masyarakat, dengan sasaran meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah pedesaan dan daerah miskin/kumuh perkotaan, dengan tujuan memantapkan kemandirian TNI-Rakyat. Kegiatan dilaksanakan berdasarkan pada program kerja

dan non program kerja dengan dukungan anggaran dan waktu yang ditentukan.

2) Pada masa perang.

a) Tugas yang berkaitan dengan unsur geografi yaitu menyiapkan dan menggunakan seluruh wilayah nasional sebagai ruang juang pelaksanaan pertahanan negara.

b) Tugas yang berkaitan dengan unsur demografi adalah menggunakan, mengendalikan dan mengorganisir seluruh komponen cadangan dan komponen pendukung untuk persiapan melaksanakan pertahanan darat yang menjadi tugas dari komando TNI AD bidang teritorial.

c) Tugas yang berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat adalah dengan menciptakan ketahanan kondisi sosial untuk mendukung kemampuan pertahanan darat.

d) Tugas yang berkaitan dengan komunikasi sosial adalah dengan melaksanakan komunikasi sosial seluruh komponen masyarakat di wilayah dalam rangka pertahanan negara.

e) Tugas Bhakti TNI dengan melaksanakan Operasi Bhakti dan Bhakti Sosial dalam mengendalikan kerusakan daerah dan mengurangi penderitaan masyarakat akibat perang serta pengendalian pengungsi.

3) Masa setelah perang, melaksanakan operasi pembinaan teritorial dalam rangka rehabilitasi kondisi wilayah akibat perang melalui:

a) Membantu pemerintah dalam merehabilitasi fasilitas sosial dan umum yang rusak akibat perang melalui Bhakti TNI meliputi:

- (1) Merehabilitasi rumah sakit
- (2) Merehabilitasi sarana transportasi darat.
- (3) Merehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan.
- (4) Merehabilitasi tempat-tempat ibadah.

b) Membantu pemerintah dalam pembinaan kembali masyarakat yang mengungsi akibat perang.

c) Membantu pemerintah dalam menyalurkan sembilan kebutuhan bahan pokok kepada masyarakat yang terkena langsung dampak perang.

d) Memberikan tenaga manusia (anggota TNI) kepada pemerintah untuk membantu mengembalikan jalannya roda pemerintahan pasca perang.

e) Memberikan bantuan pengamanan kepada aparat kepolisian dalam menghadapi gangguan Kamtibmas.

2. Kegiatan yang dilaksanakan.

a. Pembinaan Geografi.

1) Tujuan, Pembinaan geografi pada umumnya diarahkan untuk memelihara, memanfaatkan dan mengidentifikasi geografi bagi kepentingan penyiapan medan pertahanan darat dan dukungan logistiknya.

2) Sasaran, sasaran yang diinginkan adalah membentuk dan mengembangkan lima aspek medan yang dalam penataannya disesuaikan dengan karakteristik geografi dan diwadahi dalam produk rencana umum tata ruang wilayah pertahanan darat, sehingga seluruh wilayah mampu mendukung kepentingan pertahanan negara dengan tetap memelihara sumber daya alam, sarana dan prasarana ekonomi bagi kepentingan logistik wilayah.

3) Satuan jajaran Koter melaksanakan dan mengkoordinasikan pemeliharaan kondisi geografi dengan instansi fungsional terkait sebagai wujud pelaksanaan pembinaan teritorial. Karena pada dasarnya dalam memelihara data geografi untuk kepentingan pertahanan tidak dapat dilaksanakan hanya oleh unsur komando kewilayahan (baca koter), namun harus ada keterpaduan dengan instansi fungsional terkait dan pemerintah daerah khususnya dalam menyiapkan rencana umum tata ruang wilayah pertahanan.

b. Pembinaan Demografi.

1) Tujuannya adalah mendata, membina dan memelihara potensi demografi untuk diarahkan menjadi kekuatan demografi sebagai alat juang yang tangguh untuk kepentingan pertahanan negara di darat.

2) Sasaran.

- a) Terdatanya penduduk sesuai profesi, tingkat pendidikan dan umur serta persebarannya untuk kepentingan pertahanan negara di darat.
- b) Terwujudnya dan terbinanya kemampuan dan kekuatan komponen cadangan dan komponen pendukung yang sewaktu-waktu dapat dikerahkan melalui mobilisasi.
- c) Terwujudnya masyarakat Indonesia yang memiliki kesadaran dan kemampuan bela negara yang tinggi.

3) Langkah kegiatan.

- a) Melaksanakan inventarisasi potensi masyarakat yang ada di wilayahnya, selanjutnya dikelompokkan sesuai tingkat profesi, pendidikan dan umur. Data tersebut dibina dalam arti dipelihara, sehingga sewaktu-waktu apabila dibutuhkan untuk keperluan pertahanan mudah untuk dimobilisasi sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- b) Menciptakan daya tangkal dan efek tangkal di lingkungan masyarakat, dengan menyelenggarakan pelatihan terhadap warga negara sesuai program yang telah dikoordinasikan dengan instansi fungsional terkait dan pemerintah daerah, sehingga selalu memiliki kesiapan sewaktu-waktu diperlukan untuk mendukung operasi

pertahanan di wilayah darat, disamping memiliki daya tangkal terhadap lingkungan atau wilayahnya.

c) Menyelenggarakan pembinaan warga masyarakat dengan cara mendata ulang organisasi ketahanan wilayah dan memberdayakan sarana dan prasarana ketahanan wilayah untuk dijadikan wilayah mandiri yang mengandung aspek ketahanan nasional.

d) Meningkatkan kepekaan, kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mempertahankan diri dari ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang membahayakan keutuhan dan kedaulatan wilayah melalui pembinaan mitra karib dan sistem Komando Kendali Komunikasi dan Informasi (K3I) bidang teritorial.

c. Pembinaan Kondisi Sosial.

1) Tujuan, mensosialisasikan kesadaran masyarakat dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta kesadaran bela negara, karena bela negara merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa dan untuk mensosialisasikan pentingnya memelihara stabilitas wilayah yang mantap dan dinamis.

2) Sasaran.

a) Terciptanya kesadaran masyarakat dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Menyadari kebhinnekaan dari bangsa Indonesia dimana diperlukan

nasionalisme yang tinggi dari masyarakat untuk menghindari disintegrasi dan menumbuhkan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dan selanjutnya menumbuhkan kesadaran bela negara.

b) Terwujudnya daya tangkal masyarakat di wilayah terhadap segala bentuk ancaman yang mungkin.

c) Terpeliharanya kemandirian TNI AD-Rakyat secara mantap, sehingga tercipta persatuan dan kesatuan sebagai satu bangsa yang memiliki tanggung jawab yang sama serta terciptanya kesetiakawanan sosial.

d) Lestarinya nilai-nilai budaya bangsa yang tinggi, sehingga akan selalu dapat menangkal pengaruh berbagai budaya yang tidak sesuai dengan norma kebudayaan bangsa Indonesia.

e) Tercegahnya isu-isu yang dapat menyesatkan dan merugikan masyarakat melalui isu suku, agama dan ras (SARA) sebagai isu politik yang dapat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa.

f) Terciptanya kesadaran masyarakat dalam memelihara lingkungan sebagai bentuk peran serta atau partisipasi dalam pembangunan.

3) Langkah Kegiatan.

a) Aspek Ideologi. Terbentuk dan meningkatnya sikap waspada masyarakat terhadap ideologi selain Pancasila dan bahaya laten komunis.

(1) Pemutakhiran data organisasi terlarang

(2) Membuat laporan dan evaluasi bidang ideologi

b) Aspek politik, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional bidang politik.

(1) Sosialisasi paradigma baru peran TNI

(2) Mendata kelompok radikal (raka, raki dan rala) yang ada di daerah.

(3) Silaturahmi dan tatap muka antara TNI AD dengan keluarga besar TNI AD dan Yawan TNI AD di pusat dan daerah.

c) Aspek ekonomi, meningkatnya pengetahuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi tepat guna bidang pertanian, peternakan/perikanan dan pertukangan, dengan kegiatan yang dilakukan sebagai berikut:

(1) Para komanda komando teritorial melaksanakan pembinaan dan mengendalikan penyaluran sembilan bahan pokok dan bahan-bahan penting lainnya di daerah dalam rangka pembinaan daerah rawan pangan melalui koordiansi dengan instansi terkait (Bulog/Dolog, Deperindag dan Pemda) dalam rangka

menstabilkan harga, melaksanakan penyuluhan dan tatap muka dengan para pedagang, grosir dan distributor.

(2) Membina para pengusaha dan orang kaya untuk membuat usaha baru yang dapat memberi peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan, dilaksanakan melalui koordinasi dengan instansi yang berkompeten dalam bidang usaha, agar dapat memberikan penyuluhan dan kesempatan untuk membangun dan mendirikan tempat usaha baru.

(3) Membina masyarakat agar sadar berpartisipasi dalam pembangunan daerahnya, dilaksanakan dengan cara mendorong masyarakat agar memiliki keinginan untuk membangun lingkungannya, memberi contoh dan mentauladani hal-hal yang berhubungan dengan pembangunan, mengajak masyarakat untuk memulai membangun lingkungannya sendiri terlebih dahulu.

(4) Meningkatkan produksi serta meluaskan wilayah pemasaran bagi hasilnya, yang dilakukan dengan cara membina kerjasama antara swasta, BUMN dan Koperasi sebagai tiga pilar utama ekonomi nasional; menyampaikan ide-ide atau konsep pembangunan ekonomi disektor perdagangan,

produksi, distribusi, jasa melalui pemanfaatan sumber daya manusia, sumber daya alam, membina sektor ekonomi yang sifatnya membantu, mendorong dan mendinamisasi aparat pemerintah maupun semangat masyarakat.

d) Aspek Sosial Budaya.

(1) Terwujudnya kesadaran dan ketaatan terhadap hukum dan aturan yang berlaku, dilakukan melalui ceramah kadarkum dan pelaksanaan HAM dalam operasi; mengadakan kegiatan oleh raga dengan melibatkan ormas, organisasi pemuda, pelajar dan mahasiswa yang bertepatan dengan hari-hari nasional; melaksanakan koordinasi dengan dinas terkait guna mendukung pelaksanaannya, seperti Dinas Pendidikan, Direktorat Hukum Angkatan Darat dan Pemda.

(2) Membina nilai-nilai budaya nasional dan dikembangkan agar memiliki ketahanan di bidang sosial budaya untuk menghadapi era globalisasi yang dilakukan dengan jalan menanamkan rasa cinta tanah air pada masyarakat terutama di kalangan pemuda; melestarikan budaya nasional dan daerah secara menyeluruh.

(3) Pembinaan terhadap kerukunan hidup beragama di kalangan masyarakat dengan jalan: membentuk jiwa saling menghormati di kalangan masyarakat terutama di bidang pelaksanaan ibadah agama; membentuk jiwa saling membantu di kalangan masyarakat yang tidak memandang kepercayaan yang dianutnya dan membina sifat toleransi agama.

(4) Membina masyarakat untuk sadar akan pentingnya mengikuti pelaksanaan program keluarga berencana, yang dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan tentang kebaikan dan keuntungan keluarga berencana; melaksanakan program pemerintah seperti keluarga berencana dll.

(5) Membina generasi muda, pelajar dan mahasiswa agar terhindar dari perbuatan-perbuatan tercela serta ikut membina oleh raga, dilakukan dengan cara membina dan menghimpun organisasi kepemudaan yang ada diwilayahnya; mendorong untuk berpartisipasi aktif dalam organisasi; mengadakan temu wicara dan tatap muka dengan tokoh pemuda yang ada di wilayahnya dan mengadakan pertandingan oleh raga antar pemuda yang bertepatan dengan hari-hari nasional.

e) Aspek Hankam

(1) Terbentuknya ketahanan lingkungan dan siskamswakarsa serta partisipasi masyarakat dalam kegiatan keamanan lingkungan, yang dilakukan dengan cara memberikan ceramah tentang ketentuan-ketentuan pelibatan TNI AD dalam menanggulangi masalah keamanan dalam negeri dalam keadaan damai; ceramah tentang pembinaan keamanan wilayah; melaksanakan koordinasi dengan Direktorat Hukum Angkatan Darat (Ditkumad) dan instansi terkait.

(2) Membina kesadaran bela negara di lingkungan masyarakat yang ditempuh melalui: pembinaan kepada masyarakat agar dapat menerima krisis ekonomi dengan sadar, membentuk kemauan masyarakat agar memiliki jiwa rela berkorban, membentuk semangat perlawanan

(3) Terbentuknya sistem pengamanan swakarsa yang tercermin dalam setiap sikap kehidupan masyarakat, dilaksanakan melalui pembinaan terhadap sistem pengamanan swakarsa, pembinaan terhadap mantapnya sistem, prosedur dan mekanisme penanggulangan bahaya, pembinaan terhadap kemauan

masyarakat untuk ikut serta dalam pelaksanaan pengamanan swakarsa.

(4) Membina sifat kebersamaan di lingkungan masyarakat, mencegah timbulnya kerusuhan, dan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk bela negara yang dilakukan dengan cara menangkal timbulnya penyebab kerusuhan, memperkecil timbulnya ketimpangan dan keresahan dalam masyarakat, mencegah timbulnya pertentangan dalam masyarakat, mencegah meningkatnya angka kriminalitas, menindak awal sedini mungkin awal peristiwa; menyelenggarakan sisbinkam secara gotong royong, terpadu, saling dukung oleh segenap aparat negara baik tahap penangkalan, pencegahan dan penindakan awal dengan memanfaatkan tokoh masyarakat, rakyat terlatih dan potensi sosial.

d. Pembinaan Komunikasi Sosial.

1) Tujuan

a) Membantu lembaga fungsional dalam membina kesadaran masyarakat dalam bela negara.

b) Memberikan masukan kepada instansi fungsional dalam rangka penyiapan dan penyusunan kekuatan pertahanan wilayah.

- c) Menumbuhkan keterpaduan dalam menyusun rencana dan struktur pertahanan nasional di daerah.
- 2) Sasaran.
- a) Sasaran ke dalam
 - (1) Menunjang pelaksanaan fungsi teritorial dalam upaya membangun kesadaran pertahanan aspek darat.
 - (2) Mengurangi timbulnya sikap mental aparat kewilayahan yang dapat merugikan citra TNI AD.
 - (3) Meningkatnya ketrampilan dalam memahami permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan tugas fungsi teritorial.
 - b) Sasaran keluar
 - (1) Terwujudnya kesamaan visi, misi dan interpretasi dari segenap komponen bangsa terhadap sistem pertahanan semesta khususnya aspek darat.
 - (2) Terwujudnya ketahanan wilayah yang kondusif guna mendukung pelaksanaan pembangunan wilayah khususnya aspek darat.
- 3) Langkah kegiatan.
- a) Menyelenggarakan forum komunikasi sosial dengan komponen bangsa dan seluruh lapisan masyarakat sebagai sarana mensosialisasikan peran TNI AD dan meningkatkan kemanunggalan TNI AD-Rakyat.

b) Menyelenggarakan pembinaan terhadap keluarga besar TNI, sehingga memiliki visi, persepsi dan interpretasi yang sama dalam mensosialisasikan upaya reformasi internal dalam rangka kembali ke jati diri TNI AD.

e. **Pembinaan Bhakti TNI.**

Pembinaan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memantapkan kemandirian TNI-Rakyat dengan mendorong peran serta dan kepedulian masyarakat terhadap pembangunan di daerahnya, dengan sasaran terhadap masyarakat di daerah pedalaman, terisolir, pesisir pantai dan daerah kumuh perkotaan. Sedangkan langkah-langkah kegiatan yang dilakukan adalah:

1) **Karya Bhakti.**

a) Kegiatan karya bhakti dilaksanakan oleh satuan atau bersama masyarakat dengan sasaran fasilitas umum dan sosial, misalnya merehabilitasi sarana ibadah; pembersihan pasar, saluran air/irigasi, perbaikan jalan dan lain sebagainya.

b) Tujuannya adalah membantu masyarakat untuk mendorong dan memelihara fasilitas yang ada serta memantapkan kemandirian TNI-Rakyat.

c) Waktu pelaksanaan bersifat jangka pendek sesuai dengan sasaran/obyeknya dengan pengorganisasian yang disusun oleh satuan sendiri disesuaikan dengan kebutuhan.

2) **Operasi Bhakti.**

- a) Perintah pelaksanaan atas petunjuk Kasad selaku penanggung jawab operasi (PJO).
- b) Rapat koordinasi pencapaian sasaran fisik pimpinan Sekjen Depdagri, sedangkan untuk pencapaian sasaran non fisik dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Departemen Agama RI.
- c) Rapat koordinasi teknis tempat di Departemen diatur secara bergantian diikuti oleh seluruh Asisten Teritorial Kasdam, Bupati, Dandim, Ketua DPRD yang daerahnya melaksanakan TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) dan seluruh Tim Asistensi dari departemen dan non departemen.
- d) Pembukaan dan penutupan operasi bhakti secara serentak di seluruh wilayah Indonesia dengan inspektur upacara dari pejabat yang ditunjuk.
- e) Satuan yang terlibat dari unsur komando kewilayahan (baca koter) yang didukung oleh satuan tempur, satuan bantuan tempur dan satuan bantuan administrasi dari ketiga angkatan.
- f) Anggaran/biaya pembangunan didukung oleh pemerintah daerah setempat dan instansi terkait, sedangkan kebutuhan satuan tugas didukung dari Mabes TNI.
- g) Selain TMMD juga dilaksanakan TNI Manunggal Sembako, TNI Manunggal Pertanian, TNI Manunggal sosial sejahtera dan TNI Manunggal Reboisasi.